

**BUKU AJAR**



# **Pendidikan Bela Negara**



**Oleh :**

**Dr. Ir. Zainal Abidin, MS  
Djoko Poernomo, Sip, MM  
Dra. Endang Iryanti, MM  
Dr. Lukman Arif, M.Si**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
SEPTEMBER 2014**

## **Kata Sambutan Rektor Atas Terbitnya Naskah Buku Ajar :**

### **“Pendidikan Bela Negara”**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena pada kesempatan ini buku yang telah dinanti nantikan ini telah bisa terwujud. Buku yang diberi judul Buku Ajar Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Bela Negara (MPKDIK Bela Negara) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya untuk menanamkan kesadaran bela negara bagi setiap warga negara khususnya para mahasiswa.

Hadirnya buku ini dirasa sangat tepat, terutama saat pemerintah selalu mendengungkan pendidikan berkarakter. Dunia pendidikan diharapkan sebagai motor penggerak untuk memfasilitasi pembangunan berkarakter, sehingga anggota masyarakat mempunyai kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan demokratis dengan tetap memperhatikan sendi-sendi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan norma-norma sosial di masyarakat yang telah menjadi kesepakatan bersama. Pembangunan karakter dan pendidikan karakter menjadi suatu keharusan, karena pendidikan tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi cerdas, juga mempunyai budi pekerti dan sopan santun, sehingga keberadaannya sebagai anggota masyarakat menjadi bermakna, baik bagi dirinya maupun masyarakat pada umumnya. Kita ingin membangun manusia Indonesia yang berakhlak, berbudi pekerti, dan berperilaku baik dan memiliki wawasan kebangsaan. Bangsa kita ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia.

Melalui Buku Ajar Pendidikan Bela Negara ini diharapkan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat dapat menjadi masyarakat yang baik (*good society*). Buku Pendidikan Bela Negara ini menjadi sarana yang efektif dalam mewujudkan pendidikan dan pembangunan karakter bangsa dalam arti luas. Bangsa yang berkarakter unggul, disamping tercermin dari moral, etika dan budi pekerti yang baik, juga ditandai dengan semangat, tekad dan energi yang kuat, dengan pikiran yang positif dan sikap yang optimis, serta dengan rasa persaudaraan, persatuan dan kebersamaan dan wawasan kebangsaan yang tinggi.

Semoga buku ini memberi inspirasi dan dapat dijadikan rujukan oleh yang lain, terutama kalangan akademisi dan semoga menjadi amal jariyah untuk kita semua.

**Surabaya, 17 September 2014**

**Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP**  
Rektor UPN “Veteran” Jatim

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT; karena hanya atas karunia dan rahmatNya lah buku ini dapat kami selesaikan. Buku ini adalah merupakan buah dari proses panjang yang kami lakukan bersama sama dengan teman Dosen dalam kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) baik Mata Kuliah Pancasila maupun Pendidikan Kewarganegaraan.

Buku yang diberi judul Buku Ajar MPK “Pendidikan Bela Negara” ini merupakan buku pegangan wajib bagi mahasiswa disetiap program studi yang menempuh Mata Kuliah Pendidikan Bela Negara dibawah naungan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur. Buku ini akan mengantarkan mahasiswa untuk bisa memahami dan mengimplementasikan dalam dunia nyata tentang esensi dan nilai-nilai bela negara.

Sebagai bagian dari pendidikan yang berkarakter, buku ini akan diawali dengan sajian mengenai pentingnya Pendidikan Bela Negara. Dalam sajian ini juga dikemukakan tentang beberapa landasan yang menjadi dasar dari Pendidikan Bela Negara itu sendiri. Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (3) dinyatakan bahwa “Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Untuk menunaikan tugas mulia tersebut, agar dapat dilakukan dengan baik, maka perlu suatu proses pendidikan yang memadai agar apa yang diharapkan dapat dicapai. Untuk kepentingan inilah Mata Kuliah Pendidikan Bela Negara menjadi hal yang penting. Untuk menunjang maksud tersebut, maka keberadaan Buku Pendidikan Bela Negara menjadi wajib hukumnya.

Bagian berikutnya dalam buku ini akan diketengahkan mengenai substansi dari esensi, nilai-nilai dan konsepsi mengenai Bela Negara. Pada bagian ini mahasiswa tidak saja akan mendalami tentang pengertian bela negara tetapi juga bagaimana kesadaran bela negara itu ditumbuhkembangkan sehingga menjadi bagian wawasan dan pola pikir yang integral dalam diri mahasiswa sehingga mereka memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi problema yang ada dalam konteks kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kemampuan dan ketangguhan pribadi ini menjadi sesuatu yang penting saat-saat dimana masyarakat kita berada dalam suatu perubahan yang tidak menentu. Jati diri individu, masyarakat, dan bangsa menjadi penting untuk terus ditumbuhkembangkan sehingga perubahan tersebut dapat dihadapi tanpa mengorbankan kepribadian bangsa. Ancaman yang akan membahayakan kepribadian dan integritas bangsa ini adalah merupakan sesuatu yang menarik dan akan menjadi bagian akhir dalam bagian ini. Buku ini diakhiri dengan mengetengahkan bagaimana implementasi bela negara dalam pembangunan nasional. Pada bagian ini akan menyoroti beberapa dimensi aktual implementasi bela negara dari aspek kehidupan nasional.

Selesainya penyusunan buku ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik pada saat penulisan rencana pembelajaran maupun proses penyusunan materi ajar sampai dengan terselesaikannya penyusunan buku ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini tidak terlalu berlebihan jika Tiem Penyusun Buku ini menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MS. Selaku Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak memberi motivasi dan ide-ide segar dalam proses penyusunan buku ini.
2. Tim Dosen Pancasila, Kewarganegaraan dan Mata Kuliah Pendidikan Bela Negara, dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga kebaikannya dalam membantu tersusunnya buku ini dicatat sebagai amal ibadah dan selalu mendapat balasan dari Allah SWT.

Tim Penyusun buku ini menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik konstruktif sangat kami harapkan untuk kesempurnaan buku ini. Akhirul kata semoga buku ini dapat memberi manfaat guna menambah pengetahuan bagi yang membacanya.

Surabaya, 10 September 2014

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

	Hal
SAMBUTAN REKTOR UPN “VETERAN” JAWA TIMUR.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB 1</b> <b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I        Kompetensi Dasar.....	1
II       Gambaran Umum.....	1
III       Relevansi Terhadap pengetahuan.....	1
IV       Sub-sub Bab.....	1
1.     Latar Belakang Pendidikan Bela Negara.....	1
2.     Landasan-Landasan Pendidikan Bela Negara .....	6
3.     Maksud dan tujuan Pendidikan Bela Negara.....	15
4.     Latihan Soal .....	15
<b>BAB 2</b> <b>KESADARAN BELA NEGARA.....</b>	<b>17</b>
I        Kompetensi Dasar.....	17
II       Gambaran Umum.....	17
III       Relevansi Terhadap pengetahuan .....	17
IV       Sub-sub Bab.....	17
1.     Kesadaran Bela Negara.....	17
2.     Nilai-Nilai Bela Negara.....	19
3.     Latihan Soal.....	27
<b>BAB 3</b> <b>KONSEPSI BELA NEGARA.....</b>	<b>28</b>
I        Kompetensi Dasar.....	28
II       Gambaran Umum.....	28
III       Relevansi Terhadap pengetahuan.....	28
IV       Sub-sub Bab.....	28
1.     Tataran Bela Negara.....	28
2.     Bela Negara dalam Sistem Pertahanan Negara....	33
3.     Hakikat Ancaman.....	35
4.     Latihan Soal.....	54

BAB 4	WIDYA MWAT YASA DAN JATI DIRI.....	55
	I Kompetensi Dasar.....	55
	II Gambaran Umum.....	55
	III Relevansi Terhadap pengetahuan.....	55
	IV Sub-sub Bab.....	55
	1. Widya Mwat Yasa sebagai Jati diri UPN “Veteran” Jatim...	55
	2. Jati Diri.....	60
	3. Karakter Bangsa .....	64
	4. Tiga Pilar dalam menumbuhkan Jatidiri UPN “Veteran”....	69
	5. Integritas.....	74
	6. Latihan Soal.....	76
BAB 5	KEBIJAKAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA.....	77
	I Kompetensi Dasar.....	77
	II Gambaran Umum.....	77
	III Relevansi Terhadap pengetahuan.....	77
	IV Sub-sub Bab.....	77
	1. Landasan Kebijakan.....	77
	2. Pemberdayaan SDM dan SDA melalui latihan dasar Bela Negara dan Pengabdian Sesuai profesi.....	79
	3. Latihan Soal.....	81
BAB 6	BELA NEGARA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL.....	82
	I Kompetensi Dasar.....	82
	II Gambaran Umum.....	82
	III Relevansi Terhadap pengetahuan.....	82
	IV Sub-sub Bab.....	82
	1. Bela Negara sebagai Modal Dasar Pembangunan Nasional.....	82
	2. Pemerintahan Yang Baik, bersih, Dan Berwibawa.....	88
	3. Kepemimpinan Yang Berwawasan Bela Negara.....	89
	4. Kewirausahaan Yang Menunjang Kesadaran Bela Negara.	94
	5. Pengembangan Pembinaan dan Pembudayaan Kesadaran Bela Negara.....	96
	6. Latihan Soal.....	104
BAB 7	PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.....	105
	I Kompetensi Dasar.....	105
	II Gambaran Umum.....	105
	III Relevansi Terhadap pengetahuan.....	105

IV	Sub-sub Bab.....	105
1.	Pengertian Korupsi.....	105
2.	Nilai dan Prinsip Anti Korupsi.....	108
3.	Pencegahan dan Gerakan anti korupsi.....	108
4.	Peran dan Keterlibatan Mahasiswa pada gerakan Anti Korupsi.....	109
5.	Latihan Soal.....	110

DAFTAR PUSTAKA

# **BAB 1**

# **PENDAHULUAN**

## **I. Capaian Pembelajaran (Kompetensi Dasar)**

Mahasiswa memahami, mampu menjelaskan, terjadi perubahan pola berpikir tentang hak dan kewajiban bela negara, dan mampu menerapkan dalam kehidupan sesuai profesi, khususnya pemahaman tentang : dasar pemikiran, maksud dan tujuan, ruang lingkup Pendidikan Bela Negara, landasan Pendidikan Bela Negara yang meliputi landasan yuridis, filosofis, historis, sosiologis dan religius.

## **II. Gambaran Umum**

Menjelaskan pengertian tentang Bela Negara yang didalamnya mengandung Dasar pemikiran, maksud dan tujuan, ruang lingkup Pendidikan Bela Negara, landasan Pendidikan Bela Negara yang meliputi landasan yuridis, filosofis, historis, sosiologis dan religius.

## **III. Relevansi terhadap pengetahuan**

1. Mampu Menggambarkan dan Menjelaskan Latar Belakang Pendidikan Bela Negara
2. Mampu menjelaskan Landasan-Landasan Pendidikan Bela Negara
3. Mampu menjelaskan Maksud dan tujuan Pendidikan Bela Negara
4. Latihan Soal

## **IV. Sub-sub Bab**

### **1. Latar Belakang Pendidikan Bela Negara**

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, mempunyai Tujuan Nasional : ***Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ; memajukan kesejahteraan umum ; mencerdaskan kehidupan bangsa ; serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.*** Tujuan Nasional tersebut diamanatkan dalam alinea ke empat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Didalamnya sekaligus terkandung tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan negara sepanjang sejarahnya. Perwujudan dan pencapaian tujuan-tujuan luhur tersebut tentu saja

tidak lepas dan tidak sepi dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Semuanya bersifat *“merintang”* bahkan *“membahayakan”* negara. Oleh karena itu harus sedapat mungkin dicegah, dihadapi dan diatasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk itu partisipasi dan keikutsertaan setiap dan seluruh warga negara merupakan keharusan *eksistensial* dan *konstitusional* yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Partisipasi itu sesungguhnya adalah *hak* dan *kewajiban* setiap warga negara serta merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen warga negara. Secara konstitusional tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, yang berbunyi : **“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”** Oleh sebab itu tidak satupun warga negara yang dewasa serta sehat jasmani dan rohani boleh menghindari keharusan dengan berbagai alasan. Untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban tersebut setiap warga negara harus dilandasi dengan *integritas yang tinggi*, memiliki *jatidiri sebagai bangsa Indonesia*.

### 1.1. Bela Negara

Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan *“bela negara”* ? Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan istilah *“bela”* sebagai menjaga baik-baik, memelihara, merawat, melepaskan dari bahaya, memihak untuk melindungi dan mempertahankan *sesuatu*.

Sesuatu yang harus dijaga, dipelihara, dirawat, dilindungi dan dipertahankan dalam konteks ini adalah *negara*. Tegasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan demikian *“membela negara”* dapat diartikan sebagai menjaga, memelihara, melindungi dan mempertahankan eksistensi negara bahkan melepaskannya dari bahaya.

Kemudian muncul pertanyaan : “Mengapa negara harus dibela ?” Jawabannya sederhana, yaitu karena negara sebagai kesatuan politik masyarakat memegang peran dan fungsi yang sangat besar dan penting bagi setiap dan segenap warganya dalam kerangka pengembangan dirinya sebagai manusia maupun sebagai bangsa. Dalam konteks ini setiap negara manapun di dunia ini memangku dan mengemban tiga tugas pokok , yaitu :

- a. Melindungi seluruh penduduk dalam wilayah kekuasaannya terhadap :
  - 1). Segala ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

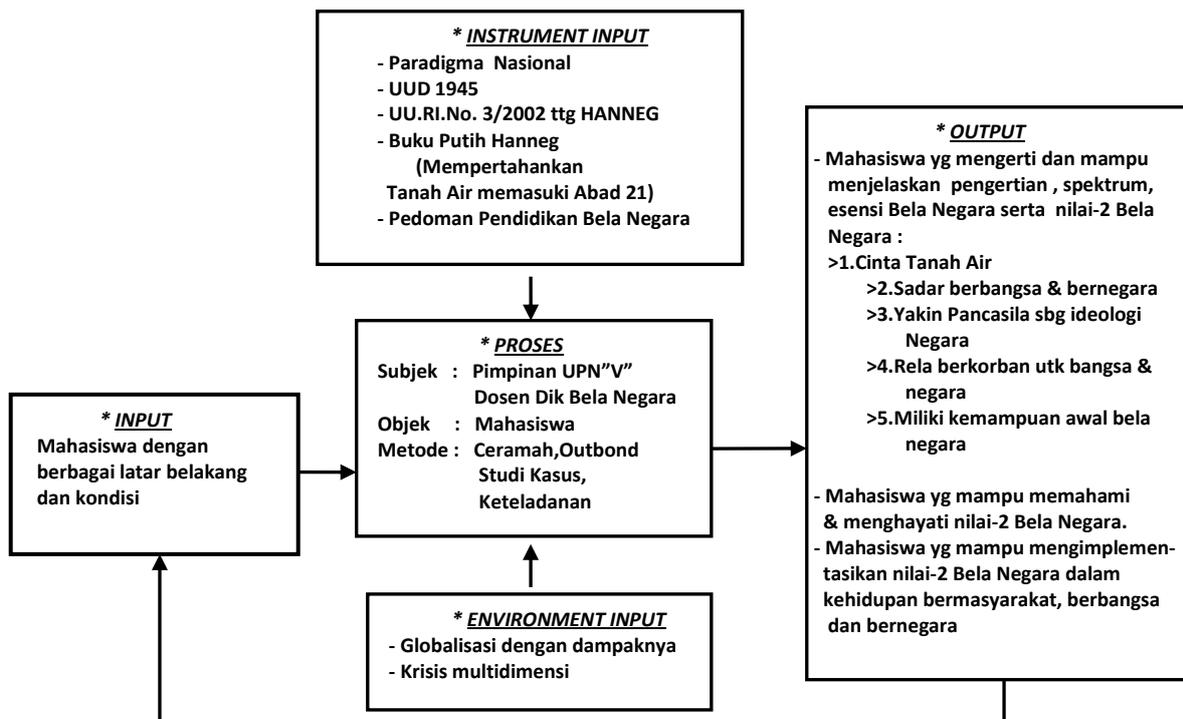
- 2). Ancaman penyakit dan/atau segala bentuk bahaya lainnya, termasuk bencana alam, bahaya lalu lintas, terorisme, narkoba, ideologi-ideologi berbahaya dan lain-lain.
- b. Mendukung atau langsung menyediakan pelbagai pelayanan bagi kehidupan masyarakat dalam dalam bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, fasilitas komunikasi dan belbagai pelayanan sosial lain. Negara juga mengembangkan upaya meningkatkan kemampuan warganya minimal dapat bebas dari kemiskinan dan ketergantungan ekonominya.
  - c. Menjadi wasit yang tidak memihak kepada salah satu pihak dalam suatu konflik sosial dengan menyediakan suatu sistem peradilan yang menjamin keadilan yang mendasar dalam hubungan sosial masyarakat.

Singkatnya oleh negara, harapan serta cita-cita setiap dan semua warganya dapat terwujud. Atau dengan kata lain tanpa negara semua harapan dan cita-cita warga negara sulit dibayangkan. Namun demikian untuk keberhasilan tugas pokok negara secara umum tersebut diatas dalam hal ini, Republik Indonesia yang memiliki tujuan nasional (yang diamanatkan dalam alinea ke empat UUD 1945) diperlukan timbal balik dari setiap warganya. Timbal balik tersebut adalah adanya hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya bela negara.

## **1.2. Perlunya Pendidikan Bela Negara.**

Patut disadari sepenuhnya bahwa kesadaran bela negara bukanlah sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya dalam diri setiap warga negara. Diperlukan upaya-upaya sadar dan terencana secara matang untuk menanamkan dalam diri warga negara landasan dan nilai-nilai bela negara sebagai berikut, yaitu : (a). *cinta terhadap tanah air*, (b). *sadar berbangsa dan bernegara*, (c). *yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara* dan (d). *rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia* serta (e). *memiliki kemampuan awal bela negara*. Kelima nilai dasar bela negara hendaknya dipandang sebagai keutamaan-keutamaan hidup yang harus dihayati oleh para warga negara pada semua lapisan. Demikian *pendidikan* dipandang sebagai jalan atau sarana yang paling tepat untuk menyadarkan para warga negara akan pentingnya nilai-nilai bela negara. Karena sebagai sarana penyadaran (*konsientisasi*), pendidikan menerangi *cipta* (akal), menggugah dan

menghangatkan *rasa* (emosi), dan memperteguh *karsa* (kehendak) para warga negara sehingga mereka memiliki rasa-memiliki (*sense of belonging*), rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) dan komitmen yang tinggi terhadap nasib bangsa dan negaranya. “*Outcome*” atau hasil yang diharapkan dari pendidikan kesadaran bela negara adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya membela negara, dan yang mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Proses dan hasil Pendidikan Bela Negara yang diharapkan tergambar pada Pola Pikir berikut :



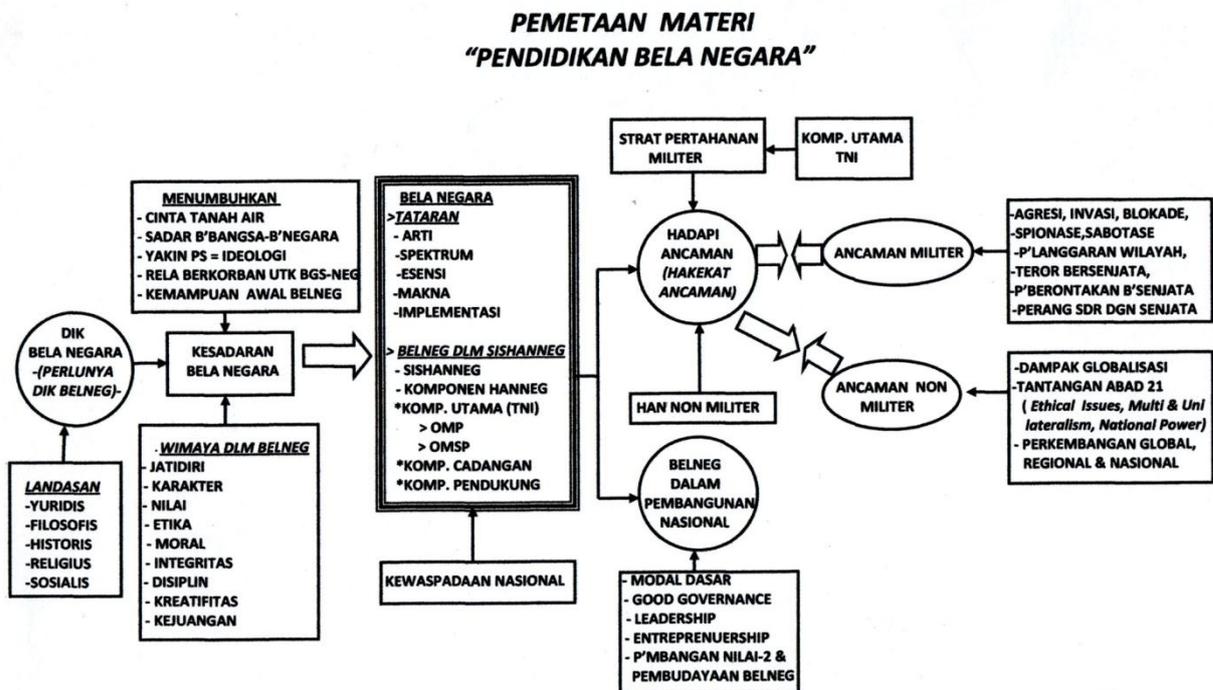
**Gambar – 1 : POLA PIKIR PENDIDIKAN BELA NEGARA**

Kementerian Pertahanan sebagai instansi yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pembinaan kesadaran bela negara, mengklasifikasikan sasaran pembinaan dalam tiga lingkup yaitu : *pendidikan, pekerjaan dan pemukiman*. Tugas ini direalisasikan dalam kerja sama yang erat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang khusus mengemban tugas kependidikan bagi seluruh warga negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai Program Pendidikan Kewarganegaraan di semua tingkat pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Pendidikan Tinggi ( pasal 37 Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu kurikulum wajib ). Mengingat tugas utama dan pertama pendidikan kesadaran bela negara, yang diemban oleh Kementerian Pertahanan adalah menanamkan nilai-nilai keutamaan bela

negara bagi warga negara dan merupakan pendidikan dasar bagi warga negara, maka pendidikan kesadaran bela negara sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan kewarganegaraan (*civic education*). Adanya program pendidikan kesadaran bela negara dapat lebih menyadarkan warga negara, bahwa hal bela negara bukanlah semata-mata *amanat konstitusi* yang pelaksanaannya bersifat “perintah”, melainkan lebih merupakan *amanat kodrat kemanusiaan*. Kemanusiaan kita, kodrat kita sebagai *homo sociale*-lah yang menggerakkan kita sebagai warga negara untuk membela mati-matian negara, apapun konsekuensi yang harus kita hadapi. Kita adalah makhluk ciptaan yang selalu ingin hidup bersama orang lain dalam suatu jaringan “saling tergantung” orang lain dalam suatu ikatan sosial. Oleh karena itu tugas membela negara merupakan suatu kewajiban, bahkan suatu keharusan dan keniscayaan *eksistensial* warga negara, yang keluar dari eksistensi kita sebagai *homo sociale*. Mengapa ? Karena tugas membela negara dan/atau mempertahankan eksistensi negara, baik kedaulatannya, keutuhan wilayahnya, maupun keselamatan segenap rakyatnya, dari segala bentuk ancaman, fisik dan non-fisik, militer dan non-militer adalah tugas eksistensial yang bersifat tetap dari sebuah negara yang setelah terbentuk dan sepanjang sejarahnya. Cara pandang yang eksistensial ini memudahkan kita dalam seluruh proses pendidikan dan / atau pembentukan kesadaran bela negara dalam diri para warga negara. Dalam hal ini bela negara tidak hanya dipandang sebagai suatu tugas kenegaraan, melainkan juga sebagai suatu *kehormatan dan kepercayaan* yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negara yang patut dibanggakan dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, penuh semangat rela berkorban demi pengabdian kepada ibu pertiwi, bangsa dan negara.

Cara pandang “bela negara” sebagai amanat *kemanusiaan* ini berkaitan erat dengan hakikat negara sebagai persekutuan hidup bersama atau ikatan sosial manusia yang terbesar, dimana individu warga negara dapat mewujudkan dimensi politis kehidupannya. Perlu kita ingat bahwa hanya didalam negara-lah, individu warga negara melangsungkan proses *personisasi dirinya*, proses penyempurnaan dirinya menjadi pribadi yang utuh sepanjang hidup. Dengan demikian negara sesungguhnya melekat pada diri manusia. Maka bila negara terancam eksistensi, individu warga negarapun rancam eksistensinya. Konsekuensi logisnya ialah bela negara adalah tugas kemanusiaan yang sangat fundamental dan eksistensial, yang tidak dapat ditawar-tawar. Menolak membela negara sama artinya menolak membela dan mempertahankan kehidupannya sendiri.

Materi-materi yang diberikan dalam Pendidikan Bela Negara mulai landasan-landasan, menumbuhkan kesadaran bela negara, bela negara itu sendiri (yang meliputi tataran dan kedudukan bela negara dalam sistem pertahanan negara), ancaman yang harus dihadapi, dan hal-hal terkait dengan bela negara termasuk Widya Mwat Yasa yang merupakan jatidiri UPN “Veteran” digambarkan pada pemetaan materi berikut.



**Gambar – 2 : PEMETAAN MATERI “PENDIDIKAN BELA NEGARA”**

## 2. Landasan-landasan Pendidikan Bela Negara

Pendidikan kesadaran bela negara memerlukan landasan-landasan yang jelas dan kokoh, agar pelaksanaannya tepat sasaran. Landasan-landasan tersebut meliputi landasan : yuridis, filosofis, historis, sosiologis dan religius.

### 2.1. Landasan Yuridis

Dalam penyelenggaraan bela negara dan pendidikan kesadaran bela negara diperlukan dasar-dasar hukum sebagai landasan yuridis sebagai pedoman dan titik tolak penyelenggaraannya. Dasar-dasar hukum tersebut adalah :

#### 2.1.1. Bela Negara

Ketentuan tentang hak dan kewajiban bela negara termuat dalam :

- a. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 :

*“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”*

- b. Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 :

*“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara dan usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”*

- c. Pasal 68 Undang-Undang R.I. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

*“Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”*

- d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara : *“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara “*

- e. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I. No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara : *warga negara juga dapat diwajibkan/secara sukarela menjadi anggota komponen cadangan dan anggota komponen pendukung, sebagai salah satu wujud bela negara.*

### **2.1.2. Pendidikan Bela Negara.**

Ketentuan tentang pendidikan kesadaran bela negara termuat dalam :

- a. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara *“Keikutsertaan warga negara dalam upaya belanegara sebagaimana yang dimaksud ayat (1), diselenggarakan melalui :*

- 1). Pendidikan Kewarganegaraan.*
- 2). Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.*
- 3). Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib.*
- 4). Pengabdian sesuai dengan profesi.*

- b. Pasal 3 Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : *“Tujuan pendidikan ialah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Sedang fungsi pendidikan ialah*

*mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencedaskan bangsa”*

## **2.2. Landasan filosofis.**

### **2.2.1. Upaya Membangun Kesadaran Bela Negara.**

Diatas telah dikemukakan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan-tujuan luhur tersebut didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa dan negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Pencapaian tujuan-tujuan tersebut di atas dilakukan melalui berbagai upaya pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya yang paling mendasar adalah menemukan dan menerapkan cara yang paling efektif untuk menyadarkan warga negara agar tergerak ikut serta dalam pembelaan negara. Dengan demikian *pendidikan kesadaran bela negara* berperan penting untuk membangkitkan kesadaran setiap dan seluruh warga negara akan hak dan kewajibannya dan semua potensi dirinya untuk membela bangsa dan negara.

Selain melalui pendidikan, upaya membangun kesadaran bela negara dapat dilakukan dengan pemberian *motivasi* dalam berbagai bentuk dan cara. Motivasi mempunyai kekuatan tersendiri dalam mempengaruhi sikap dan pola pikir warga negara. Motivasi itu dapat juga muncul secara spontan dalam diri para warga negara, karena mereka menyaksikan langsung kemampuan negara dalam mengemban amanat rakyat dan mereka melihat dan merasakan langsung bahwa *negara sungguh-sungguh bermanfaat* bagi kehidupan mereka. Tanpa negara mereka tidak berdaya mengembangkan dirinya. Kemampuan dan manfaat negara itu tampak di dalam inisiatif negara negara menyediakan berbagai kebutuhan mereka, menyiapkan aneka fasilitas yang memudahkan mereka meraih kesejahteraan hidup, melindungi mereka dari berbagai ancaman, menciptakan iklim kebebasan, kesamaan, keadilan dan solidaritas. Menyaksikan semuanya itu, mereka termotivasi untuk bangkit membela negara, dan tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak memenuhi hak dan kewajibannya membela negara, baik di masa damai maupun di masa perang.

Disisi lain, motivasi untuk membela negara dapat muncul, karena para warga negara merasa *terhormat* jika mereka mengorbankan waktu,, tenaga dan pikirannya bagi kepentingan umum bangsa dan negara. Bagi para warga negara. pengorbanan demi

pengabdian kepada bangsa dan negara merupakan suatu kehormatan dan kepercayaan. Dengan begitu, setiap warga negara akan berusaha menjadi orang yang dengan sukarela mau berkorban untuk bangsa dan negaranya. Namun demikian demi rasa keadilan dan kepastian bagi mereka dalam menunaikan hak dan kewajibannya membela negara, maka hal ihwal bela negara harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Singkat kata, proses motivasi akan berhasil jika setiap warga negara dan seluruh warga negara Indonesia selain mengenal dan memahami keunggulan dan kelebihan negara dan bangsa Indonesia, juga sekaligus mengenal dan memahami kemungkinan ancaman, gangguan hambatan dan hambatan terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Dalam rangka itu amat bermanfaat jika dikemukakan bahan-bahan untuk memotivasi sebagai berikut :

- a. Pengalaman sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
- b. Posisi geografis Nusantara yang strategis.
- c. Keadaan penduduk (demografis).
- d. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
- e. Keanekaragaman budaya bangsa.
- f. Perkembangan dan kemajuan Iptek
- g. Kemungkinan timbulnya perang.

## **2.2.2. Pendidikan kesadaran bela negara dari aspek ilmu filsafat.**

### **2.2.2.1. Aspek Ontologis.**

Ontologis berbicara mengenai hal “*ada*” dan “*yang mungkin ada*” Yang ada dan yang mungkin ada itu adalah kenyataan. Dalam konteks pendidikan kesadaran bela negara, ontologi meneropongi negara dan nilai-nilai dasar bela negara. Negara diteropong sejauh negara menampakkan diri sebagai suatu kekuatan sosial, suatu persekutuan hidup yang riil, yang terbentuk karena *konsensus bersama* seluruh rakyat yang terhimpun di dalamnya, dan karena itu harus *dibela*. Nilai-nilai dasar bela negara, yaitu :

- 1) Cinta terhadap tanah air
- 2) Sadar berbangsa dan bernegara
- 3) Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara
- 4) Rela berkorban untuk bangsa dan negara.
- 5) Memiliki kemampuan awal bela negara.

Nilai-nilai tersebut diteropong dan merupakan keutamaan-keutamaan hidup warga negara yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Sejarah membuktikan, bahwa keberadaan nilai-nilai dasar bela negara tersebut sudah ada sejak bangsa Indonesia mengawali kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar itulah yang mendasari semangat pergerakan perjuangan memerdekakan bangsa ini dari cengkeraman penjajah, dan yang mendasari serta mendorong proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dengan demikian nilai-nilai dasar bela negara memainkan peran yang sangat penting dalam kerangka penguatan eksistensi bangsa dan negara guna menjaga, memelihara dan mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

#### 2.2.2.2. **Aspek Epistemologis.**

Istilah “epistemologi” berasal dari bahasa Yunani “episteme” yang berarti mendudukan, menempatkan atau meletakkan sesuatu. Untuk menempatkan sesuatu yang ada itu membutuhkan metode. Jadi, epistemologi merupakan metode untuk menempatkannya menjadi suatu kenyataan yang lebih jelas dan terukur.

- 1) Secara substansial, pendidikan kesadaran bela negara adalah sebuah metode, yang dapat menggugah penghayatan peserta didik dan berbuah kesadaran, sehingga mereka mampu mengembangkan potensi dirinya, baik intelektual, emosional maupun perilaku, untuk berperan serta dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.
- 2) Penyampaian materi pendidikan kesadaran bela negara yang berbasis kompetensi menggunakan pendekatan *konstruktivistik*, yang berfokus pada peserta didik, dalam hal ini mahasiswa dengan metode antara lain : *student active learning, problem based learning, contextual learning, inquiry, cooperative learning* dan lain-lain.

#### 2.2.2.3. **Aspek Aksiologis.**

Aksiologi berbicara tentang manfaat dari “yang ada” itu untuk menghasilkan suatu tindakan. Dalam konteks pendidikan kesadaran bela negara, yang ada itu adalah negara dan nilai-nilai dasar bela negara yang diberikan melalui proses pendidikan kesadaran bela negara, Melalui berbagai substansi kajian diharapkan kedua hal itu mampu menumbuhkan kesadaran bela negara dalam diri mahasiswa dan tindakan konkret bela negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

### 2.3. **Landasan Historis.**

Masa lampau negeri ini tidak lepas dari catatan hitam penjajahan, baik oleh Belanda maupun Jepang. Kelahirannya sebagai suatu negara merdeka dan berdaulat,

dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlangsung dalam suatu rangkaian bertahap yang berawal dari tahap perjuangan kemerdekaan dan memuncak pada momen proklamasi kemerdekaan sebagai tahapan yang mengantarkan bangsa Indonesia sampai pintu gerbang kemerdekaan. Itulah yang terumuskan dalam Alinea Kedua Pembukaan Undang-Undang 1945. Jadi kemerdekaan negeri ini bukanlah hadiah cuma-cuma dari penjajah, melainkan hasil perjuangan yang menelan korban yang tak terkirakan.

Tahap perjuangan kemerdekaan berawal dari berbagai pergerakan yang berwawasan “kedaerahan” seperti Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Indische Party (1912), Indische Sosial Democratische Vereininging (1913), Trikoro Darmo (1915) sebagai embrio Jong Java (1918), Nahdhatoel Oelama (1926), dan Indonesia Moeda (1931). Semua pergerakan diatas beserta pergerakan-pergerakan lainnya dengan berbagai macam subkultur etnis, seperti Jong Ambon, Jong Sumatra, Jong Celebes dan sebagainya, melahirkan suatu pergerakan yang inklusif, yaitu **pergerakan nasioalisme** yang berjatidiri “Indonesianess” dengan mengaktualisasikan tekad politiknya dalam **Soempah Pemoeda, 28 Oktober 1928**. Para mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda mendeklarasikan Manifesto Politik pada tahun 1925. Dari keanekaragaman subkultur di atas terkristalisasilah suatu **core culture** (*budaya inti*) yang kemudian menjadi basis eksistensi negara-bangsa (*nation state*) Indonesia, yaitu **nasionalisme**. Jadi, pada tahapan penjajahan, semua suku bangsa dan subkultur yang berada dibawah tekanan penjajahan Belanda, oleh kesadaran akan keterjajahannya, mulai bangkit dan menegaskan diri sebagai satu **bangsa (tunggal)**, yaitu **bangsa Indonesia**. Itulah sebabnya, nasionalisme jaman penjajahan ini dapat disebut sebagai nasionalisme *anti-kolonialisme, anti-imperialisme dan anti-diskriminasi*. Ciri nasionalisme ini terungkap jelas dalam Sumpah Pemuda :

- ❖ *Kami putra dan putri Indonesia mengaku **berbangsa yang satu, bangsa Indonesia**.*
- ❖ *Kami putra dan putri Indonesia mengaku **bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia**.*
- ❖ *Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi **bahasa persatuan, bahasa Indonesia**.*

Dengan demikian, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dapat disebut sebagai awal tumbuhnya kesadaran berbangsa (*nasionalisme*) Indonesia yang berfungsi sebagai penggerak jiwa manusia diseantero Nusantara untuk membentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat :Indonesia. Fungsi itu berjalan dan mewujud dalam peristiwa

proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pengesahan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan semangat merdeka dan berdaulat seluruh bangsa dibawah kepemimpinan para pendiri negara, yang kemudian secara formal dirumuskan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dewasa ini semangat yang sama kiranya perlu terus diaktualisasikan dan diwujudkan dalam sikap dan perilaku warga negara yang rela berkorban membela negara demi menjamin kelangsungan dan pengembangan perikehidupan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi sekarang ini, peristiwa sejarah sebagai wujud hak dan kewajiban bela negara itu dapat dikelompokkan berdasarkan periodisasi sebagai berikut :

- a) Periode 1945 – 1949, yakni perang kemerdekaan menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pada periode ini wujud hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara lebih terlihat dalam keikutsertaan dalam perang kemerdekaan, baik bersenjata maupun tidak bersenjata. Hal ini selaras dengan pidato Jendral Soedirman pada tanggal 12 Nopember 1945 menyatakan : “Bahwa Negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerja sama yang erat-eratnya dengan golongan serta badan-badan diluar tentara”.
- b) Periode 1950 – 1965. Pada periode ini bangsa Indonesia mengalami berbagai bentuk gangguan keamanan dalam negara. Periode ini juga diwarnai dengan perjuangan Trikora merebut kembali Irian barat dan perjuangan Dwikora. Oleh sebab kondisis demikian ini, perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara sudah mengarah pada perwujudan keindonesiaan yang dicita-citakan, namun mengingat kondisi dan situasi, warna perjuangan melalui kegiatan peratahanan dan keamanan, baik bersenjata maupun tidak bersenjata, lebih mengemuka. Pada periode ini juga dilaksanakan Konferensi Asia Afrika (1955), Pemilu untuk Anggota DPR/Konstituante (1955), Pembentukan Gerakan Non Blok (GNB), keluarnya Indonesia sebagai anggota PBB, berlakunya Nasakom / demokrasi terpimpin, makin kuatnya PKI, dibubarkannya partai-partai yang bertentangan dengan PKI, dibentuknya Front Nasional yang lebih menentukan politik / kebijakan pemerintah dan terjadinya peristiwa G.30.S / PKI.
- c) Periode 1966 – 1998 atau periode Orde Baru. Bangsa Indonesia memasuki periode pembangunan dengan tantangan yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Pada periode ini perwujudan hak dan kewajibanwarga negara dalam pembelaan

negara tampak dalam kegiatan terpadu keamanan dan pertahanan, yang terfokus pada stabilitas nasional.

- d) Periode reformasi sejak tahun 1998, tantangan kebangsaan Indonesia semakin maya karena pengaruh arus globalisasi yang menuntut transparansi dan kehidupan bangsa yang lebih demokratis. Pada periode ini hakikat dan hak dan kewajiban bela negara terarahkan kepada peningkatan ketahanan nasional, sama seperti periode Orde Baru, dengan menitikberatkan demokratisasi dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Dari rangkaian peristiwa sejarah upaya bela negara sebagaimana diuraikan diatas, tampak dinamika kehidupan bangsa untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Seluruh warga negara menjalankan hak dan kewajibannya dalam wujud yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi dan berkembang pada zamannya. Pada periode perang fisik, para warga negara menjalankan hak dan kewajibannya dengan mengangkat senjata, sedangkan pada masa damai sekarang ini, perwujudan cita-cita dan tujuan nasional dilakukan melalui pembangunan nasional, dimana para warga negara memperlihatkan komitmen kebangsaannya melalui profesionalismenya di bidang masing-masing.

#### **2.4. Landasan Sosiologis**

Landasan Sosiologis bagi pendidikan kesadaran bela negara bertumpu pada *negara* sebagai kesatuan atau ikatan sosial terbesar yang memiliki kekuasaan tertinggi atas bentuk-bentuk masyarakat lainnya, dan *manusia* (rakyat, warga negara) sebagai makhluk sosial yang membentuk negara. Sebagaimana kita tahu, oleh *kesosialannya*, manusia selalu mau atau tergerak untuk hidup bersama orang lain. Kecenderungan ini menghasilkan berbagai tangkatan kesatuan atau ikatan sosial, mulai dari *keluarga* sebagai unit terkecil masyarakat, lalu meluas kepada *masyarakat*, hingga *bangsa dan negara*.

Di dalam ketentuan-ketentuan sosial itu, manusia individual berinteraksi dengan sesamanya di dalam lingkungan sekitar tempat ia tinggal dan beraktivitas. Dalam dunia modern dewasa ini, ia tidak saja berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya, tetapi juga dengan lingkungan seluas dunia melalui segala sarana teknologi modern. Ia di satu pihak (dapat) mempengaruhi sesama dan masyarakat dengan pola pikir dan seluruh sikap hidupnya, tetapi di pihak lain ia juga dipengaruhi oleh masyarakat dengan paham-paham, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut masyarakat, bangsa dan negara. Lingkungan tempat ia tinggal dan beraktivitas menetapkan apa yang baik yang boleh dilakukan dan apa yang buruk yang tidak boleh dilakukan. Ia akan diterima oleh lingkungan sosialnya

sejauh ia mengakui dan menghayati paham, nilai dan norma yang dianut masyarakat, serta turut serta dalam berbagai tugas social demi terciptanya kebaikan umum. Sebaliknya ia akan ditolak jika ia hidup dan bertingkah laku tidak selaras paham, nilai, dan norma yang dianut masyarakat, dan dengan begitu tidak memberikan sumbangan apapun bagi kebaikan umum masyarakat. Di dalam kesatuan-kesatuan social itu, manusia individual menjalani proses *personisasi*, proses penyempurnaan diri sebagai pribadi. Di sana pula ia mewujudkan dimensi politis kehidupannya dengan melakoni peran-peran social demi kebaikan umum masyarakat. Dengan peran-peran social itu serta seluruh kehidupannya, ia membaktikan diri bagi kebaikan umum seluruh masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam konteks *negara* sebagai kesatuan atau ikatan social terbesar yang dibentuk oleh rakyat atas dasar *konsensus bersama*, individu warga negara bertumbuh dalam kesempurnaan dirinya sebagai manusia. Negara, sesuai tugas pokoknya, menyediakan berbagai fasilitas yang memungkinkan warga negara mengembangkan dirinya dan mengusahakan kesejahteraan. Maka pada gilirannya, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu disamping hak-haknya, terhadap negara. Salah satu hak dan kewajiban dasar warga negara adalah hak dan kewajiban membela negara.

## **2.5. Landasan Religius.**

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya bukan negara agama dan juga bukan negara sekular. Namun hampir seluruh rakyatnya menganut salah satu dari agama-agama besar dunia, dan percaya akan suatu Wujud Tertinggi yang Esa. Oleh karena itu, sejak awal para pendirinya mendasarkan bangunan bangsa dan negara ini di atas landasan iman-kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dijiwai semangat kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kerakyatan untuk menciptakan suatu keadilan social bagi seluruh rakyatnya.

Keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya diyakini terutama sebagai rahmat Allah. Hal itu tampak jelas di dalam rumusan Alinea Ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 : *"Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya"*.

Oleh sebab itu, nasib bangsa dan negara ini ke depannya, tidak bisa bertumpu semata-mata pada kekuatan duniawi dan manusiawi seluruh rakyatnya, tetapi lebih-lebih harus bertumpu pertama-tama pada iman-kepercayaan yang kukuh akan penyertaan Allah yang Maha Kuasa.

Pendidikan kesadaran bela negara disamping mendasarkan diri pada kelima landasan diatas, harus pula dilandaskan pada kekuatan iman-kepercayaan tiap-tiap dan seluruh warga negara dalam agama masing-masing. Kecuali itu, dalam konteks pembelaan negara, adalah suatu kesalahan besar apabila kemerdekaan bangsa dan negara yang sudah dikaruniakan oleh Allah yang Maha Kuasa, dibiarkan diporak-porandakan oleh berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, bukan terus dibela dan dipertahankan. Dalam iman-kepercayaan yang kukuh akan penyertaan Allah dalam seluruh perjuangan anak-anak bangsa ini, sambil terus berusaha melepaskan diri dari segala praktik-praktik penyelenggaraan negara yang tidak selaras dengan ajaran Tuhan (KKN, perilaku diskriminasi, mental feodalisme dll), kiranya seluruh anasir negatif : ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, diatas dapat teratasi dengan gilang-gemilang.

### **3. Maksud dan tujuan Pendidikan Bela Negara**

#### **3.1. Maksud Pendidikan Bela Negara**

Pendidikan Bela Negara dimaksudkan sebagai cara untuk memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara, dengan menumbuhkan kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara, serta memberikan kemampuan awal bela negara, baik psikis maupun fisik.

#### **3.2. Tujuan Pendidikan Bela Negara.**

Pendidikan Bela Negara ertujuan :

- a) Agar peserta didik/mahasiswa mengerti dan mampu menjelaskan pengertian, spektrum, esensi dan makna bela negara serta nilai-nilai bela negara yakni : cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan benegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara.
- b) Agar peserta didik/mahasiswa mampu memahami dan menghayati nilai-nilai bela negara.
- c) Agar peserta didik/mahasiswa mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai bela negara serta mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### 4. Latihan Soal Dan Diskusi

- 1) Cari pasal-pasal dalam UUD dan UU yang berisi tentang hak dan kewajiban bela negara bagi warga negara
- 2) Pelajari kembali sejarah perjuangan mulai sebelum kemerdekaan, persiapan kemerdekaan, setelah merdeka dan setelah era reformasi. Diskusikan dengan kelompok kelas saudara.

# **BAB 2**

## **KESADARAN BELA NEGARA**

### **I. Capaian Pembelajaran (Kompetensi Dasar)**

Mahasiswa Mampu memahami, mampu menjelaskan, terjadi perubahan pola berpikir tentang hak dan kewajiban bela negara khususnya mendiskripsikan tentang kesadaran bela negara, dapat menyebutkan 5 (lima) nilai-nilai bela negara dan menjelaskan makna nilai tersebut.

### **II. Gambaran Umum**

Menjelaskan tentang kesadaran bela negara, dapat menyebutkan 5 (lima) nilai-nilai bela negara (Keyakinan akan kesaktian Pancasila, Cinta Tanah air, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara, Kemampuan Awal Bela Negara).

### **III. Relevansi terhadap pengetahuan**

1. Mampu Menjelaskan Kesadaran Bela Negara
2. Mampu menjelaskan Nilai-Nilai Bela Negara
3. Latihan Soal

### **IV. Sub-sub Bab**

#### **1. Kesadaran Bela negara.**

Kesadaran tidak dapat secara tegas didefinisikan. Dalam arti luas “kesadaran” adalah kesanggupan kodrati manusia yang membuat dia mengakui dirinya sebagai keadaannya sendiri. Kesadaran menurut *Schneider dan Velmans (2007)*, adalah : “*Apa pun yang kita sadari pada saat tertentu merupakan bagian dari kesadaran kita, membuat pengalaman sadar merupakan hal yang paling umum dikenal dan paling misterius dalam aspek kehidupan kita*”

Kesadaran meliputi seluruh indra kita, akal pikiran kita, perasaan kita dan kehendak kita, singkatnya keseluruhan kehidupan kita. Bandingkanlah misalnya keadaan *hidup-sadar* dengan *keadaan tidak sadar* dari seseorang yang jatuh pingsan, atau dari seseorang yang sedang tidur pulas. Kita disebut sebagai “orang sadar” manakala

menyadari segala hal yang terjadi atas kita dalam tahap tertentu. Istilah “sadar diri” digunakan untuk menekankan bentuk pengetahuan yang lebih reflektif, dalam mana kita secara formal mengakui keadaan kita sebagai keadaan milik kita sendiri.

Pada dasarnya kesadaran merupakan kesanggupan alamiah manusia untuk mengenal diri sendiri, karena manusia pada hakikatnya makhluk yang sadar diri, makhluk yang bisa mengambil jarak dari dirinya sendiri untuk merenungkan dirinya sendiri. Kesadaran berkaitan erat dengan hati nurani. Hati nurani disebut juga kesadaran moral, kesadaran etis, kesadaran manusia terhadap hal yang baik dan buruk. Dari hal tersebut, kita bertanya : apakah membela negara itu merupakan hal yang baik atau buruk? Orang yang memiliki hati nurani yang bening, akan secara jujur mengatakan jika apa yang kita lakukan itu buruk, pasti orang lain juga mengatakan buruk, dan sebaliknya apa yang kita lakukan itu baik, orang lain pasti juga akan mengatakan baik. Tidak mungkin kita mengatakan baik, padahal orang lain mengatakan buruk, dan sebaliknya apa yang kita sangka buruk, ternyata baik bagi orang lain. Kalau terjadi pertentangan tentang apa yang kita lakukan maka perbuatan itu perlu ditinjau kembali. Disinilah pentingnya setiap orang menjaga kesadarannya melalui refleksi yang mendalam ketika ia hendak mengambil keputusan dan melakukan suatu tindakan. Terlebih lagi apabila keputusan dan tindakan itu berkaitan dengan pembelaan terhadap kepentingan bangsa dan negara.

Pembelaan negara merupakan hak dan sekaligus kewajiban dasar warga negara. Atas dasar itu warga negara dengan asumsi ini, warga negara wajib membela negara apabila kemerdekaan bangsa dan negara serta kedaulatan negara terancam bahaya. Hal ini sesuai dengan pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai yakni “*kita cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan*”. Dengan demikian membela negara dalam rangka mempertahankan kemerdekaan tidak bertentangan dengan hati nurani dan kesadaran kita sebagai warga negara dalam bela negara sebagaimana telah diperintahkan negara melalui peraturan perundang-undangan yang ada sekarang, tidak bertentangan dengan etika politik atau prinsip-prinsip moral dasar negara modern. Namun demikian kesadaran bela negara bukanlah sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya dalam diri para warga negara. Diperlukan upaya-upaya sadar dan terencana secara matang untuk menanamkan dalam diri para warga landasan dan nilai-nilai bela negara sebagai berikut :

- a. Cinta terhadap tanah air.
- b. Sadar berbangsa dan bernegara.
- c. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara.

- d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia.
- b. Memiliki kemampuan awal bela negara.

## **2. Nilai-nilai Bela Negara.**

### **2.1. Cinta terhadap Tanah Air.**

Cinta tanah air adalah perasaan cinta terhadap bangsa dan negara. Karena cinta terhadap tanah air maka dengan sepenuh hati rela berkorban untuk membela bangsa dan negara dari setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Pada hakikatnya cinta tanah air adalah kebanggaan menjadi bagian dari tanah air dan bangsa yang pada ujungnya ingin berbuat sesuatu untuk mengharumkan nama tanah air dan bangsa. Untuk memahami pentingnya mewujudkan cinta tanah air, dapat kita wujudkan setiap hari dengan bagaimana sikap kita dalam menjalani hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan pantang menyerah, peduli dan saling membantu antara umat. Itu merupakan cerminan cinta tanah air. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Negara dan bangsa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita., yang akan selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Negara dan bangsa tidak akan terlepas dari kehidupan kita.

Cinta tanah air dapat pula diartikan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki setiap individu pada negara dimana dia tinggal. Kesemuanya itu tercermin pada perilaku membela, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat dan budaya yang ada di negaranya serta melestarikan alam dan lingkungannya.

Beberapa sikap dan perilaku yang mencerminkan bahwa kita mencintai tanah air, antara lain :

- a. Bangga sebagai orang Indonesia,
- b. Memakai produk dalam negeri,
- c. Mentaati semua peraturan-perundangan,
- d. Taat membayar pajak
- e. Dengan ikhlas mengikuti upacara bendera.
- f. Menjaga kelestarian lingkungan,
- g. Saling hormat-menghormati sesama warga negara, dan masih banyak lagi sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa cinta tanah air.

### **2.2. Sadar berbangsa dan bernegara.**

*Bangsa* adalah sekelompok manusia yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat-istiadat, budaya, sejarah dan berpemerintahan sendiri. Sedangkan *berbangsa* adalah sekelompok manusia tersebut memiliki landasan etika, bermoral dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna social dan adil. *Negara* adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Sedangkan *bernegara* adalah sikap dari kelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses dalam satu wilayah atau satu negara.

*Kesadaran* dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas/rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak yang pada umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya. *Berbangsa dan bernegara* merupakan suatu konsep atau istilah yang seorang individu terikat dan atau menjadi satu bagian dari suatu bangsa (nation) dan negara (state).

Jadi *kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia* mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan/kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia.

Bagaimana kesadaran berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia ? Apakah masih kuat atau cenderung lemah? Bila melemah apa gejalanya dan penyebabnya ?

*Gejala* melemahnya kesadaran berbangsa dan bernegara antara lain dapat kita lihat dari perilaku individu sebagai rakyat maupun pejabat yang masih menunjukkan tindakan-tindakan yang melanggar kaidah hukum, seperti mafia hukum, pencemaran lingkungan, tindakan kriminalitas, pembalakan liar, lebih mementingkan diri dan kelompok, korupsi, bersikap kedaerahan yang berlebihan, anarkis, penggunaan narkoba, kurang menghargai karya bangsa sendiri, mendewakan produk bangsa lain dan masih banyak lagi perilaku yang memperlemah kesadaran berbangsa dan bernegara.

Merosotnya kesadaran berbangsa dan bernegara secara umum diakibatkan oleh empat *penyebab* yang sekaligus merupakan tantangan kedepan, yaitu :

- 1) Globalisasi yang didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi, membuat antara bangsa dan negara seolah-olah tidak ada batas lagi (*borderless*), bahkan seolah-olah kita menjadi warga dunia sehingga identitas sebagai

bangsa mandiri dan memiliki karakteristik tersendiri menjadi lebur dengan bangsa lain yang juga hilang identitasnya. Akibatnya tumbuh dan muncul budaya dunia/global. Identitas sebagai bangsa semakin tidak jelas. Kedaulatan semakin menjadi mitos. Ketergantungan antar negara semakin tinggi.

- 2) Kepinginan perasaan kedaerahan semakin menebal. Otonomi daerah telah merangsang nafsu putra-putri daerah untuk menguasai tempat basah. Posisi politis strategis dimanfaatkan untuk memperkaya diri dan keluarga serta membangun “kerajaan” atau “trah” atau “dinasti” baru. Mereka kehilangan wawasan dan solidaritas bangsa dan tanggung jawab untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
- 3) Budaya konsumisme dan hedonistik memunculkan gaya hidup (*live style*) mewah. Konsumisme adalah sikap ketagihan para konsumen terhadap produk kapitalis. Kapitalis tidak hanya memproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi juga menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru untuk kepuasan masyarakat. Dengan gaya hidup mewah sudah tidak memperhatikan lagi azas manfaat tapi cenderung mengikuti *trend* gaya hidup konsumtif hedonis. Dampaknya kurang menghargai produk lokal yang dipandang kurang memberikan prestise gaya hidup modern yang diartikan salah.
- 4) Munculnya ideologi-ideologi totaliter yang meng-klaim memiliki kebenaran yang mutlak serta menuntut ketaatan tanpa reserve. Ideologi komunisme dan naziisme merupakan ideologi totaliter yang dikelompokkan sebagai ideologi ekstrim kiri. Sedangkan ideologi religius fundamentalis dikelompokkan sebagai ideologi totaliter ekstrim kanan. Keduanya dapat mengancam kesadaran terhadap berbangsa dan bernegara. Ada kesan bahwa dengan harga mati Pancasila sebagai ideologi yang tidak perlu dipermasalahkan lagi, seolah-olah Pancasila tidak perlu dipermasalahkan lagi, toh masyarakat sudah menerima. Kita dan pemerintah lupa bahwa generasi selalu berganti. Oleh karena itu harus terus-menerus diberikan pendidikan politik bagi generasi baru demi kelanggengan dan kesinambungan NKRI.

Disamping *gejala* dan *penyebab* memudarnya rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, ada beberapa faktor *penghambat* yaitu :

- a. Rasa malu berbangsa dan bernegara Indonesia.
- b. Ketidak-tahuan akan nilai-nilai positif / kekayaan NKRI.
- c. Menurunnya tingkat keamanan Indonesia.
- d. Ketidak-percayaan terhadap pemerintah.
- e. Ketidak-sederhanaan kehidupan para pemimpin.
- f. Ketidak-tegasan hukum.

- g. Munculnya rasa ingin menonjolkan kelompok atau golongan masing-masing.
- h. Merosotnya nilai toleransi dan saling menghargai.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan adanya faktor-faktor *pendukung* yang harus terus-menerus diupayakan, untuk terciptanya rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu :

- a) Tingkat ke-amanahan dan keteladanan seorang pejabat/pemimpin.

Apabila pejabat/pemimpin amanah dalam menjalankan serta memberikan teladan yang baik, tentu semua oknum akan berlaku jujur dalam menjalankan tugas dan masyarakat akan mengikuti hal-hal yang baik tersebut.

- b) Pemerataan kesejahteraan.

Dengan adanya pemerataan kesejahteraan maka setiap warga akan merasakan adanya aturan yang sama dan perlakuan yang sama sebagai warga negara. (Ingat salah satu tujuan nasional yang diamanatkan dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 : ....*memajukan kesejahteraan umum*.....)

- c) Keadilan dalam memberikan hak dan kewajiban sesama warga negara.

Beberapa hak dan kewajiban setiap warga negara telah diamanatkan dalam konstitusi kita (UUD 1945). Sebaliknya kewajiban pemerintah belum sepenuhnya menyentuh atau menjawab apa yang menjadi hak warga negara. Misalnya, pasal 31 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, namun kita masih melihat masih banyak warga negara yang belum mendapatkan pendidikan yang layak.

- d) Kepercayaan kepada wakil rakyat dan pemerintah.

Dengan memberikan kepercayaan kepada pemerintah akan tumbuh rasa bangga bahwasanya mempunyai negara yang dapat dibanggakan. Serta wakil rakyat –pun akan senang hati menjalankan amanah yang diberikan warga negara/rakyat.

- e) Tegasnya peraturan dan perundangan.

Republik Indonesia adalah negara hukum dengan tiga prinsip dasar yang harus dipatuhi segenap warga dan pejabat. (*supremasi hukum di atas segala-galanya, kesetaraan di depan hukum, penegakkan hukum tanpa melanggar hukum*). Dengan hukum dan aturan yang tegas akan menumbuhkan rasa percaya dan bangga terhadap negara.

- f) Rasa memiliki, bangga serta menyadari berbangsa dan bernegara yang satu Indonesia. (*ingat Sumpah Pemuda* )

g) Mengetahui lebih banyak hal-hal yang positif serta kekayaan Indonesia, jangan selalu *negative thinking* terhadap bangsa dan negara Indonesia.

### **2.3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara.**

Ideologi berasal dari bahasa Inggris *idea* yang berarti gagasan, pemikiran pengertian, dan *logy* yang berarti ilmu, pengetahuan. Dalam bahasa Yunani *idean* yang berarti mengetahui, melihat dengan budi, dan *logos* yang berarti ajaran atau ilmu. Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide (*sciences of ideas*) atau pengertian-pengertian dasar. Pengertian ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis dan berorientasi pada tingkah laku dalam berbagai bidang kehidupan, diantaranya kehidupan politik, hukum, pertahanan keamanan, ekonomi, sosial-budaya serta bidang keagamaan / kepercayaan.

Jadi Pancasila sebagai ideologi negara, adalah ideologi yang bersumber dari seluruh nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai Pancasila menjadi sumber inspirasi dan cita-cita hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara adalah nilai-nilai Pancasila merupakan suatu dasar nilai untuk mengatur pemerintahan negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sumber semangat bagi para penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar tetap diliputi dan diarahkan pada azas kerokhaniaan negara seiring dengan perkembangan jaman dan dinamika masyarakat.

Pancasila sebagai konsep, gagasan atau himpunan dan ide-ide sesungguhnya telah teruji, baik dalam kajian ilmiah apalagi dalam menghadapi ujian dan ancaman yang secara fisik ingin merubah Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, telah terjadi beberapa peristiwa yang sadar atau tidak ingin merubah ideologi Pancasila. Antara lain pemberontakan PKI Madiun pada 1948, pemberontakan DI/TII, pemberontakan PRRI/Permesta, pemberontakan G.30.S/PKI. Namun kesemuanya itu dapat ditumpas oleh bangsa Indonesia yang tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Kita tidak berlebihan bila mengatakan bahwa Pancasila terbukti sakti dalam menghadapi berbagai ujian dan gangguan. Pancasila sejak lama telah terbukti sakti, sakti dalam arti bukan mistik atau klenik, namun sakti dalam arti ketika diserang dari berbagai penjuru, dari berbagai paham selalu dapat mempertahankan keberadaannya sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara.

Dalam era global saat ini yang ditunjang dengan kemajuan teknologi utamanya Teknologi Informasi dan Transportasi, telah mengubah tata cara kehidupan berbangsa dan bernegara, antar bangsa dan negara seolah-olah sudah tidak ada batasnya (*borderless*). Kehidupan masyarakat semakin demokratis, diwarnai dengan aktifitas untuk menanamkan nilai-nilai diluar ideologi Pancasila. Bahkan ada upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara. Disisi lain masyarakat kita semakin mudah terprovokasi, mudah marah, siap menang namun tidak siap kalah, serta memaksakan kehendak yang berujung pada timbulnya konflik horizontal. Kondisi yang memprihatinkan ini adalah indikasi bahwa makin tergerusnya nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila yang sudah ada jauh sebelum negeri ini berdiri harus kita hidupkan kembali, harus kita revitalisasi.

Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai salah satu nilai dari kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada setiap warga negara. Pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara serta bukti nyata akan kesaktian Pancasila dalam perjalanan sejarah bangsa harus tertanam dalam sanubari setiap warga negara yang memiliki hak dan kewajiban dalam upaya bela negara.

#### **2.4. Relia berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia.**

*Patriotisme* adalah sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. *Patriotisme* berasal kata *patriot* dan *isme* yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan (dalam bahasa Inggris *patriotism* atau *heroism*). Pengorbanan ini dapat berupa harta benda atau jiwa raga. *Patriotisme* pada dasarnya berkaitan erat dengan nasionalisme. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kesadaran keanggotaan suatu bangsa yang secara potensial maupun aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabdikan jati diri, integritas, kemakmuran dan kekuatan suatu bangsa (Saptono, 2009). Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa keduanya sama-sama berorientasi pada kecintaan pada bangsa dan negara. Karena itu *patriotisme* sering disinonimkan dengan nasionalisme.

Sejarah perjuangan Indonesia telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah banyak berkorban untuk mencapai kemerdekaan. Selama 350 tahun lebih bangsa ini hidup dalam kesengsaraan dibawah kekuasaan penjajah. Pengalaman pahit selama itu dijadikan sebagai motivasi atau penggerak untuk meraih kemerdekaan sehingga benar-benar terbebas dari berbagai penderitaan. Peristiwa 10 Nopember 1945 merupakan bukti nyata perjuangan bangsa Indonesia yang memiliki semangat patriotik. Mereka tetap mempertahankan kemerdekaan dan tidak ingin bangsa lain kembali menjajah tanah air

Indonesia. Tidak sedikit yang gugur dalam peristiwa heroik tersebut. Jiwa raga dan harta mereka korbakan. Kecintaan terhadap tanah air, bangsa dan negara merupakan dorongan utama para pejuang saat itu. Perjuangan serta pengorbanan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dilandasi kecintaan mereka terhadap tanah air, bangsa dan negara.

Saat ini perjuangan dan pengorbanan secara fisik melawan penjajah sudah tidak ada lagi, Tetapi patriotisme jiwa kepahlawanan dengan berjuang serta berkorban demi bangsa dan negara dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 perlu ditingkatkan lagi. Secara konstitusional perjuangan dan pengorbanan ini telah diamanatkan dalam pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya bela negara*". Pengorbanan ini demi tetap tegaknya NKRI, kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan seluruh rakyat dari segala bentuk ancaman baik ancaman fisik maupun non-fisik.

Rela berkorban demi bangsa dan negara yaitu dengan rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan harta-benda untuk kepentingan umum. Atau dengan pengertian lain adalah pengabdian tanpa pamrih yang diberikan oleh warga negara terhadap tanah tumpah darah dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan tanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan kejayaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ditengah arus globalisasi saat ini, dimana sifat dan perilaku individu yang kurang peduli dengan kehidupan sekitarnya semakin menonjol, muncul pertanyaan : masih adakah warga negara kita yang dengan ikhlas dan rela berkorban demi bangsa dan negara dari warga negara kita ? Ternyata masih banyak diantara warga negara kita yang dengan sukarela dan bergotong royong mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai misal pelaksanaan siskamling/ronda malam yang dilaksanakan demi keamanan lingkungan perumahan. Melaksanakan siskamling adalah merupakan wujud kerelaan berkorban anggota masyarakat untuk kepentingan dan keamanan bersama. Beberapa penerima Anugerah Kalpataru dalam bidang penyelamatan lingkungan adalah bukti bahwa masih ada warga negara yang dengan sukarela berkorban untuk kepentingan bersama. (membuat bendungan, membuat jalan tembus, menyelamatkan hutan mangrove dan lain sebagainya). Beberapa kegiatan di lingkungan pendidikan tinggi juga menunjukkan kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa dan negara. Antara lain, program KKN, dibalik adanya nilai akademik bagi mahasiswa, mereka juga menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima di bangku kuliah untuk kemaslahatan kehidupan masyarakat. Penciptaan peralatan Teknologi Tepat Guna dan disumbangkan kepada masyarakat akan dapat meningkatkan taraf kehidupan

masyarakat terutama yang didaerah tertinggal. Sekelompok anak muda / mahasiswa dengan sukarela membuat rumah singgah dan memberikan pendidikan non-formal kepada anak-anak jalanan (dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai salah satu tujuan nasional). Para sukarelawan yang terjun dalam menanggulangi bencana alam juga bukti masih adanya kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara. Dan masih banyak lagi kegiatan yang menunjukkan adanya kerelaan berkorban demi bangsa dan negara.

Namun disisi lain, masih banyak warga negara yang tidak peduli dengan nasib bangsa dan negaranya. Mereka telah terbawa arus glogalisasi yang membuatnya terlena dengan paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu pemahaman kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara yang merupakan salah satu nilai-nilai bela negara harus ditanamkan dan disadarkan kepada segenap warga negara melalui pendidikan formal dan non formal serta keteladanan dari berbagai pihak termasuk para pemimpin bangsa.

## **2.5 Memiliki kemampuan awal bela negara.**

Nilai bela negara terakhir adalah memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis maupun fisik. Secara *psikis*, yaitu memiliki kecerdasan emosional, spiritual dan intelegensia (EQ, SQ, IQ), senantiasa memelihara jiwa dan raganya serta memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras dan tahan uji. Dan tidak kalah pentingnya secara psikis adalah mentaati semua peraturan perundangan. Sedangkan secara *fisik* yaitu memiliki kondisi kesehatan yang prima, ketrampilan jasmani untuk mendukung kemampuan awal bela negara secara psikis dengan gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Potensi atau kemampuan awal bela negara secara psikis maupun fisik dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Sebagai contoh kecerdasan emosional (EQ) dilatih atau dibiasakan dengan pengendalian diri, bersikap sopan santun, rendah hati.

Kecerdasan spiritual (SQ) ditingkatkan dengan senantiasa rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Kecerdasan intelegensia (IQ) dikembangkan dengan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan. Kemampuan awal bela negara secara fisik dapat dikembangkan dengan menjaga kesehatan agar tetap prima dengan jalan menjaga asupan makanan yang bergizi (empat sehat lima sempurna), mempertahankan kesamaptaan jasmani dengan olahraga.

### 3. Latihan Soal

Dalam tataran Bela Negara kita kenal adanya : *Pengertian Bela Negara – spektrum Bela Negara – esensi Bela Negara – makna Bela Negara – implementasi Bela Negara.*

- a. Berikan penjelasan singkat dari 5 (lima) hal tersebut.
- b. Dengan dilandasi amanat dalam UUD 1945 khususnya tentang pembelaan negara, Kementerian Pertahanan RI, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI **bersinergi** dalam upaya pembelaan negara → berikan penjelasan tentang hal tersebut dan bagaimana implementasinya (penerapannya).
- c. Apa yang Saudara ketahui tentang Perang di Era Global ? Bagaimana upaya menghadapinya ?
- d. Bagaimana tekad, sikap, dan perilaku Saudara sebagai warga negara mencerminkan bahwa Saudara mencintai tanah air ? Tunjukkan masing-masing dua contoh.

# **BAB 3**

## **KONSEPSI BELA NEGARA**

### **I. Capaian Pembelajaran (Kompetensi Dasar)**

Mahasiswa memahami, mampu menjelaskan, terjadi perubahan pola berpikir tentang hak dan kewajiban bela negara, khususnya tentang Tataran Bela negara, Sistem Pertahanan Negara, spektrum bela negara dan Hakekat Ancaman.

### **II. Gambaran Umum**

Menjelaskan Konsepsi Pendidikan Bela Negara, yang meliputi : Pengertian Bela Negara, Prinsip-prinsip Pembelaan Negara, Tujuan Bela Negara, Bela Negara dalam Sishanneg, Spektrum Bela Negara, dan Hakekat ancaman.

### **III. Relevansi terhadap pengetahuan**

1. Mampu Menjelaskan Tataran Bela Negara
2. Mampu menjelaskan Bela Negara Dalam Sistem Pertahanan Negara
3. Mampu menjelaskan Hakekat Ancaman
4. Latihan Soal

### **IV. Sub-sub Bab**

#### **1. Tataran Bela Negara.**

##### **1.1. Pengertian Bela Negara.**

Tidak perlu diragukan lagi bahwa “bela negara” merupakan persoalan penting bagi kelangsungan hidup suatu negara-bangsa (*nation states*). Sejak terbentuknya negara modern, persoalan itu menjadi semakin terkait dengan banyak hal, mulai dari rasa nasionalisme, semangat patriotisme, sampai dengan bagaimana aktualisasi bela negara dalam bentuk program (tindakan nyata). Berbagai definisi sekalipun berubah jarang bergeser dari esensinya semula – keharusan untuk menjawab operasionalisasi sehingga rumusan definitif menjadi operasional.

Hingga kini belum ada definisi operasional tentang bela negara, Undang undang yang kini tidak berlaku lagi, yaitu UU.RI. No. 20 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara, mendefinisikan bela negara adalah “*tekad, sikap dan*

*tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*". Selanjutnya upaya bela negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara sebagai penuaian hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Di era reformasi UU.RI.No. 20 tahun 1982 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan UU.RI.No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam undang-undang ini menyebut tentang bela negara pada pasal 9 ayat 2 (*.....Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara.....dst*), tapi tidak mendefinisikannya. Hanya dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan "*Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa*". Dari penjelasan tersebut tersirat tidak mengubah esensi bela negara, sekalipun mengubah pemahaman tentang "pertahanan negara". Masih sangat mungkin untuk menggunakan rumusan awal dalam UU.RI.No. 20 tahun 1982 yang menyatakan bahwa bela negara adalah "tekad, sikap dan tindakan warga negara" untuk ikut serta mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara".

Dalam UU.RI.No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih, bela negara disebutkan sebagai berikut : "*bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara*"

Rumusan tentang bela negara yang secara tersurat berbeda dalam beberapa undang-undang. Tetapi bila kita cermati apa yang tersirat adalah adanya kesamaan "*reference object*" yaitu kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa serta kesamaan sumber maupun bentuk ancaman yang harus diwaspadai. Dengan

demikian Kementerian Pertahanan R.I. menyederhanakan/merumuskan pengertian bela negara sebagai *“sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara”* Sedangkan upaya bela negara selain merupakan kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan semangat rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Cara warga negara membela negara dapat dilakukan melalui pertahanan militer maupun non-militer sesuai dengan bentuk ancamanya.

## **1.2. Spektrum Bela Negara.**

Sebelum penjelasan tentang spektrum bela negara, perlu kita ingat apa itu spektrum. Spektrum adalah suatu kondisi yang tidak terbatas pada serangkaian situasi tertentu terhadap nilai-nilai, tetapi dapat bervariasi dan tidak terbatas dalam sebuah peristiwa yang secara terus-menerus. Penggunaan istilah spektrum pertama kali (abad 17) dalam bidang ilmiah diaplikasikan pada ilmu pengetahuan alam tepatnya bidang optik. Yaitu ketika menggambarkan pelangi yang memiliki beberapa warna dalam cahaya tampak ketika dipisahkan menggunakan prisma. Sejak saat itu telah diterapkan analogi diberbagai bidang selain optik, seperti spektrum opini politik, spektrum aktivitas medis dan berbagai bidang lain. Dalam penggunaannya, nilai-nilai dalam spektrum tidak dapat dikaitkan dengan tepat angka-angka dalam pengukuran.

Demikian juga dengan spektrum bela negara, dalam menghadapi ancaman harus diketahui watak ancaman. Ketentuan perundangan yang berlaku, misalnya UU.RI.No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, tersirat pemahaman ancaman secara multidimensional, tanpa pembatasan apakah itu ancaman bersifat militer ataupun non-militer. UU.RI.No.34 tahun 2004 tentang TNI, membatasi peran utama TNI untuk menghadapi ancaman militer (bersenjata).

Dengan adanya ancaman militer dan non-militer, maka cara menghadapinya dikaitkan dengan struktur kekuatan pertahanan negara. Ancaman militer dihadapi dengan membangun spektrum keras bela negara berupa pelatihan dasar kemiliteran dan pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib serta sebagai anggota komponen cadangan dan anggota komponen pendukung pertahanan negara. Namun spektrum keras ini dapat juga dilakukan oleh seluruh warga negara tanpa harus ia menjadi anggota TNI. Bila suatu profesi benar-benar dibutuhkan oleh pertahanan negara,

misalnya dengan senjata konvensional, dan alat utama sistem senjata (Alutsista) yang memerlukan keahlian tertentu merupakan wujud lain dari spektrum keras bela negara diluar menjadi anggota TNI.

Sedangkan implementasi menghadapi ancaman non-militer dilakukan melalui spektrum lunak, yang dapat dilakukan dalam profesi masing-masing warga negara. Wujudnya dilakukan dengan sungguh-sungguh memegang teguh etika profesi yang mencerminkan dari sikap moral dan kesadaran profesionalismenya dalam mendukung politik kebangsaan dan pertahanan.

Jadi spektrum bela negara sangat luas mulai yang paling halus sampai dengan yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Bela negara semestinya tidak dipahami sebagai upaya bersifat militer, apalagi semata-mata tugas TNI, selayaknya bela negara menjadi kewajiban segenap warga negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya.

### **1.3. Esensi Bela Negara.**

Esensi adalah hakikat, inti atau hal yang pokok dari sesuatu. Kaitannya dengan bela negara maka esensi bela negara adalah inti atau hal yang pokok dari bela negara itu sendiri. Kita pahami bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara adalah : *cinta terhadap tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara*. Maka setiap warga negara yang memahami dan menghayati serta mengimplementasikan nilai-nilai bela negara tersebut maka dia telah menghayati esensi bela negara. Dengan kata lain esensi atau hal yang pokok dari bela negara adalah *bersikap dan berbuat serta bertindak yang terbaik bagi negara dan bangsa*. Dalam setiap perbuatan, sikap dan perilaku warga negara telah dilandasi dengan nilai-nilai bela negara. (Perhatikan uraian tentang masing-masing nilai-nilai bela negara di atas).

### **1.4. Makna Bela Negara.**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna berarti *arti, maksud*. Sepintas hampir sama dengan pengertian. Pengertian adalah definisi, sedangkan makna lebih mendalam dalam pemahamannya, tergantung pada penggunaannya. Sesuai kamus tersebut ada makna ekstensi, makna emotif, makna gramatikal, makna kognitif, makna

luas, makna sempit, makna kontekstual dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan bela negara maka makna bela negara lebih tepat bila digolongkan dengan makna luas yaitu arti yang lebih luas dari arti (definisi) yang sesungguhnya. Ataupun dapat digolongkan dengan makna kontekstual yaitu adanya hubungan antara arti (definisi) sesungguhnya dengan situasi yang menggunakan arti tersebut. Bila bela negara didefinisikan dengan *“tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara”* Maka makna bela negara adalah :

- a. Sebagai panggilan konstitusional.
- b. Nilai luhur yang mutlak perlu dalam semua bidang kehidupan bangsa dan negara.
- c. Harus dimasyarakatkan dan diberdayakan secara nyata.

### **1.5. Implementasi Bela Negara.**

Berdasarkan pasal 27 ayat (3) UUD 1945, upaya bela negara merupakan keharusan *eksistensial* dan *konstitusional* bagi setiap warga negara. Implementasi atau penerapan bela negara dilakukan oleh setiap warga negara dewasa yang sehat jasmani dan rohani. Warga negara kita terdiri dari berbagai golongan dan profesi. Dengan demikian implementasi atau penerapan bela negara perlu ada ketentuan ataupun arahan yang jelas. Kementerian Pertahanan sebagai instansi yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pembinaan kesadaran bela negara, mengklasifikasikan sasaran pembinaan dalam tiga lingkup yaitu : *pendidikan, pekerjaan dan permukiman*. Tugas ini direalisasikan dalam kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional yang khusus mengemban tugas pendidikan bagi seluruh warga negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional mempunyai program Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan salah satu kurikulum wajib bagi semua tingkat pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Pendidikan Tinggi. Mengingat tugas utama dan pertama pendidikan kesadaran bela negara, yang diemban oleh Kementerian Pertahanan menanamkan nilai-nilai keutamaan bela negara, maka pendidikan kesadaran bela negara sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian maka implementasi bela negara adalah :

- a. Dijadikan gerakan nasional pendidikan mencapai watak dan kepribadian serta perilaku seganap warga negara.
- b. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sesuai dengan pasal 9 ayat (2) UU.RI.No. 3 tahun 2003 tentang Pertahanan Negara diselenggarakan melalui :

- 1). Pendidikan Kewarganegaraan.
- 2). Pelatihan Dasar Kemiliteran secara wajib.
- 3). Pengabdian sesuai dengan profesi.
- 4). Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib.

## **2. Bela Negara dalam Sistem Pertahanan Negara.**

### **2.1. Sistem Pertahanan Negara.**

Pertahanan Negara sesuai dengan pasal 30 UUD 1945 adalah resultante dari pasal 27 ayat (3) UUD 1945 (tentang upaya bela negara). Kemudian lebih rinci diatur dengan UU.RI.No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Beberapa ketentuan pokok dalam undang-undang ini yang terkait dengan bela negara antara lain :

- a) Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- b) Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dengan demikian, semua bentuk pertahanan negara harus mengacu pada tujuan tersebut. Oleh karena itu pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan.
- c) Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman.
- d) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui :
  - 1) Pendidikan Kewarganegaraan.
  - 2)..Pelatihan Dasar Kemiliteran secara wajib.
  - 3). Pengabdian sesuai dengan profesi.
  - 4). Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib.

### **2.2. Komponen-komponen Pertahanan Negara.**

Dalam sistem pertahanan semesta, maka pertahanan negara melibatkan seluruh komponen pertahanan negara yang terdiri atas komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung.

### 2.2.1. Komponen Utama.

Komponen Utama dalam Sistem Pertahanan Negara adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. TNI Ketentuan tentang peran, fungsi, tugas pokok dan hal-hal yang terkait dengan kedudukan TNI diatur dengan UU.RI.NO. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

- a) TNI *berperan* sebagai alat negara di bidang pertahanan yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara
- b) Dalam sistem pertahanan negara, TNI *berfungsi* sebagai :
  - 1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
  - 2) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud tersebut di atas.
  - 3) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- c) *Tugas pokok* TNI adalah menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut dilakukan dengan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

### 2.2.2. Komponen Cadangan.

Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen Utama. (pasal 1 ayat 6 UU.RI.No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara). Ketentuan tentang peran, fungsi, tugas pokok dan hal-hal yang terkait dengan Komponen Cadangan belum diatur dengan undang-undang. Namun sebagai gambaran keterkaitan dengan bela negara dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Komponen Cadangan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI sebagai Komponen Utama dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa danri segala ancaman.

- b) Komponen Cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara dan seluruh sumber daya nasional lainnya dalam usaha bela negara.
- c) Komponen Cadangan berunsurkan warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional.

### **2.2.3. Komponen pendukung.**

Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. (pasal 1 ayat 7 UU.RI.No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara). Seperti halnya dengan Komponen Cadangan, peran, fungsi, tugas pokok dan hal-hal yang terkait dengan Komponen Pendukung belum diatur dengan undang-undang.

## **3. Hakikat ancaman.**

### **3.1. Pengertian ancaman.**

Pengertian sederhana dari "*ancaman*" adalah niat, pernyataan, situasi, kondisi, tindakan atau perbuatan yang diperkirakan membahayakan atau merugikan. Bila dikaitkan dengan upaya pembelaan negara, maka pengertian ancaman adalah : *setiap usaha atau kegiatan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa*. Bentuk ancaman yang harus dihadapi dan ditanggulangi dengan upaya bela negara dapat berupa ancaman militer dan ancaman non militer.

### **3.2. Perkiraan ancaman.**

Dalam membicarakan bela negara sudah barang tentu kita harus memahami ancaman apa yang akan dan harus dihadapi. Geopolitik Indonesia sebagai negara yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta Samodra Pasifik dan Samodra Hindia, menyebabkan kondisi nasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan konteks strategis. Posisi seperti ini berimplikasi pada terjalinnya silang hubungan antara kepentingan negara-negara lain dengan kepentingan nasional Indonesia. Mencermati dinamika konteks strategis baik global, regional maupun domestik, maka ancaman yang sangat mungkin dihadapi Indonesia ke depan, dapat berbentuk ancaman keamanan tradisional dan ancaman non-tradisional. Ancaman tradisional atau agresi militer dari negara lain terhadap Indonesia diperkirakan kecil kemungkinannya. Peran PBB dan reaksi dunia internasional diyakini mampu mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi

penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara untuk memaksakan kehendaknya terhadap negara lain.

Ancaman dari luar lebih besar kemungkinannya bersumber dari kejahatan terorganisir lintas negara (*international crime*) yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, dengan memanfaatkan kondisi dalam negeri yang tidak kondusif. Perkiraan ancaman dan gangguan yang dihadapi Indonesia ke depan meliputi terorisme, gerakan separatisme, kejahatan lintas negara (penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, pencemaran dan perusakan lingkungan/ekosistem, imigrasi gelap, pembajakan/perompakan), aksi radikalisme, konflik komunal dan dampak bencana alam.

Dalam menghadapi ancaman dari luar berupa kekuatan militert negara lain, TNI melaksanakan tugas *Operasi Militer Perang (OMP)*. Meskipun perkiraan ancaman tradisional berupa agresi atau invasi negara lain sangat kecil kemungkinannya, namun tidak membuat kesiapsiagaan pertahanan negara menjadi kendor. Dalam konteks ini upaya penyelenggaraan pertahanan negara lebih diarahkan pada upaya preventif guna mencegah dan mengatasi dampak keamanan yang lebih besar melalui kehadiran dan kesiapan kekuatan TNI.

Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia diperkirakan lebih besar kemungkinannya berasal dari ancaman non-tradisional, baik yang bersifat lintas negara maupun yang timbul di dalam negeri. Oleh karena itu kebijaksanaan strategis pertahanan Indonesia yang diarahkan untuk menghadapi dan mengatasi ancaman non-tradisional merupakan prioritas dan mendesak. Dalam pelaksanaannya mengedepankan TNI dengan menggunakan *Operasi Militer Selain Perang (OMSP)*. TNI melaksanakan OMSP bersama-sama segenap komponen bangsa lain dalam suatu keterpaduan usaha sesuai dengan tingkat eskalasi ancaman yang dihadapi. Terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan, TNI akan senantiasa mengedepankan upaya pencegahan sebagai cara terbaik guna menghindari korban dan dampak lain yang lebih besar.

Penggunaan kekuatan TNI dalam tugas OMSP diarahkan untuk kepentingan pertahanan yang bersifat mendesak. Tugas-tugas mendesak tersebut meliputi mengatasi gerakan separatisme bersenjata, menghadapi pemberontakan bersenjata, mengatasi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan prseiden dan wakil presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem

pertahanan semesta, membantu tugas pemerintah daerah, membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Inonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam – pengungsian – pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (S.A.R.), membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap perompakan – pembajakan – penyelundupan.

### **3.3. Ancaman militer.**

Ancaman militer memiliki karakter yang beragam ,dapat berupa jenis ancaman yang sifatnya terorganisasi dengan menggunakan, yang dinilai mempunyai kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat pula berupa jenis ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara atau ancaman bersenjata yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara , dan keselamatan segenap bangsa .

#### **3.3.1. Bentuk ancaman militer.**

Ancaman Militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah,pemberontakan bersenjata ,sabotase, sepionase , aksi teror bersenjata ,ancaman keamanan laut dan udara ,serta konflik komunal . Rincian ancaman Militer dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 pada penjelasan pasal 7 ayat ( 2) adalah sebagai berikut :

- a) Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara,keutuhan wilayah, dan keselatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara,antara lain :
- 1) Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain, terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - 2) Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - 3) Blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara, Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata negara lain

- 4) Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat atau satuan laut atau satuan udara Tentara Nasional Indonesia.
  - 5) Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah NKRI berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian.
  - 6) Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayah oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  - 7) Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melakukan tindakan seperti tersebut diatas
- b) Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain , baik yang menggunakan kapal atau pesawat non komersial.
  - c) Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer
  - d) Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.
  - e) Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negara atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara ,keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa .
  - f) Pemberotakan bersenjata.
  - g) Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya .

### **3.3.2. Strategi Pertahanan Militer**

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, ancaman militer mendapatkan perhatian utama karena berakibat langsung terhadap keadulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, dalam menghadapinya diperlukan strategi pertahanan yang efektif untuk dapat melindungi NKRI dengan segala kepentingannya.

Strategi dalam menghadapi ancaman militer disesuaikan dengan sumber, serta bentuk dan besarnya ancaman aktual yang mengancam Indonesia. Upaya menghadapi ancaman agresi, yakni invasi suatu negara terhadap Indonesia dihadapi dengan strategi pertahanan yang mendayagunakan segenap kekuatan pertahanan secara total dengan mengerahkan Komponen Cadangan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat Komponen Utama serta mengerahkan secara langsung/tidak langsung Komponen Pendukung guna meningkatkan kedua komponen lainnya, karena yang dipertaruhkan adalah hidup atau matinya NKRI. Sebaliknya, dalam menghadapi ancaman militer dengan jenis bukan invasi, penggunaan kekuatan pertahanan negara disesuaikan dengan skala ancaman serta tingkat resiko yang ditimbulkannya.

Sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU.RI.No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai Komponen Utama didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Tugas utama TNI adalah menghadapi ancaman militer yang berbentuk agresi militer yang dilakukan suatu negara dengan tujuan menduduki sebagian atau seluruh wilayah NKRI. Agresi militer ini dihadapi dengan strategi pertahanan berlapis. Meskipun TNI merupakan Komponen Utama pertahanan negara, namun dalam menghadapi ancaman militer, khususnya agresi militer suatu negara, lapis diplomasi sebagai pertahanan non-militer tetap menjadi lapis pertama untuk mencegah terjadinya perang atau mengurangi dampak perang. Lapis diplomasi diselenggarakan dengan didukung oleh lapis perlawanan tidak bersenjata dan lapis pertahanan militer dengan menyiagakan segenap kekuatan TNI di seluruh Indonesia, bila perlu diperbesar dengan Komponen Cadangan melalui mobilisasi.

Sebagai kelanjutan dan sekaligus memperkuat upaya-upaya diplomasi, lapis perlawanan tidak bersenjata diberdayakan sebesar-besarnya sebagai wujud penolakan bangsa Indonesia terhadap suatu negara yang hendak menyerang Indonesia. Lapis perlawanan tidak bersenjata dalam menghadapi agresi negara dikembangkan melalui usaha-usaha psikologis, seperti unjuk rasa di seluruh wilayah Indonesia untuk menolak kekuatan militer yang hendak menyerang atau menginvasi Indonesia, serta usaha lain untuk membangkitkan nasionalisme bangsa Indonesia. Ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer dihadapi dalam kerangka menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Bentuk ancaman militer yang dimaksud antara lain, adalah pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan bersenjata, gerakan separatis bersenjata, sabotase, spionase, aksi terror bersenjata yang dilakukan

oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri, ancaman keamanan di laut atau di udara yurisdiksi nasional, dan konflik komunal.

Untuk menghadapi ancaman militer bukan agresi, upaya yang dilaksanakan adalah mengerahkan kekuatan siap nasional yang besarnya disesuaikan dengan besarnya ancaman, dengan pelaksanaannya berdasarkan keputusan politik atau melalui suatu mekanisme atau prosedur tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Strategi pertahanan menghadapi ancaman militer yang bukan agresi dihadapi dengan kekuatan TNI sebagai lapis pertahanan militer, baik secara matra atau secara gabungan dalam suatu susunan Tri Matra Terpadu. Besarnya kekuatan yang dikerahkan disesuaikan dengan bentuk, derajat, dan besarnya ancaman yang dihadapi.

Dalam melaksanakan pertahanan menghadapi ancaman, TNI menerapkan dua jenis operasi yakni Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

### **3.3.3. Operasi Militer Perang.**

Operasi Militer untuk Perang (OMP) adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.

### **3.3.4. Operasi Militer Selain Perang.**

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk :

- a. Mengatasi gerakan separatis bersenjata
- b. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
- c. Mengatasi aksi terorisme.
- d. Mengamankan wilayah perbatasan.
- e. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
- f. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
- g. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
- h. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
- i. Membantu tugas pemerintah daerah.

- j. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban yang diatur dalam undang-undang.
- k. Membantu pengamanan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan asing yang sedang berada di Indonesia.
- l. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.
- m. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue).
- n. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap perampokan, pembajakan dan penyelundupan.

### 3.4. Ancaman Non-Militer

Ancaman Non Militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nonmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa .

#### 3.4.1. Bentuk-bentuk Ancaman non Militer.

Ancaman non militer digolongkan kedalam ancaman yang berdimensi Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, informasi dan teknologi, serta keselamatan umum. Contoh ancaman non militer antara lain *the brain war*, berupa konflik ideologi, perbedaan keunggulan, persaingan daya cipta dalam percaturan ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan , dan lain sebagainya.

Bentuk-bentuk ancaman non militer dapat digolongkan menjadi 2 (dua) :

- a) Pertama, adalah yang berkaitan langsung dengan pertahanan negara , misalnya kesengajaan penyebaran penyakit sebagi bagian dari perang biologi
- b) Kedua, adalah ancaman non militer yang tidak berkaitan langsung dengan pertahanan negara,, misalnya penyebaran penyakit secara alamiah , baik epidemik maupun pandemik ; contoh lain dari ancaman non militer golongan ini adalah krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998.

Ancaman non militer yang bentuk ke dua ini merupakan ancaman yang sifatnya tidak secara langsung mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Namun resiko yang ditimbulkan berimplikasi mengganggu stabilitas nasional. Terganggunya stabilitas nasional tidak saja menghambat pembangunan nasional, tetapi lambat-laun dapat berkembang menjadi permasalahan kompleks yang

yang mengancam kredibilitas pemerintah dan eksistensi bangsa. Dengan demikian dalam melihat ancaman non militer berdasarkan eskalasi ancaman mulai dari yang ringan sampai dengan tingkatan yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara dan bangsa. Untuk menilai ancaman non militer dapat dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat sesuai dengan tingkat eskalasinya.

Sifat ancaman non militer harus dihadapi pula dengan pendekatan non militer, sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU. RI. Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa, sedangkan TNI sebagai pendukung.

Dalam era global dewasa ini yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi, sebagaimana kita rasakan bersama sekarang. Telah mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional yang dipengaruhi arus globalisasi dewasa ini mengisyaratkan adanya kompleksitas tantangan dan ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ancaman yang semula bersifat fisik (konvensional), yang biasanya dihadapi dengan kekuatan fisik (*hard power*), kini telah berkembang menjadi multidimensional (fisik dan non fisik) dengan dominasi ancaman yang bersifat non fisik, serta berasal dari luar dan dari dalam negeri. Sebuah bentuk peperangan baru yang memanfaatkan perkembangan pesat teknologi informasi, termasuk perkembangan di bidang *new composite material* seperti kimia dan biologi.

Kecenderungan tersebut sudah barang tentu mempengaruhi karakteristik ancaman dengan munculnya issue-isue keamanan baru, yang diantaranya beraspek maya, dikenal dengan istilah *cyber-war* atau *the brain-war*, seperti perang selisih keunggulan, perang daya cipta dalam peredaran ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan. Perang juga diawali dengan merubah paradigma berpikir dan selanjutnya dapat berdampak pada aspek lainnya dengan memanfaatkan kelemahan dan celah rentannya kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat berpengaruh pada mudarnya energi kolektif bangsa, bahkan dapat membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bentuk Perang dalam Era Globalisasi adalah perang informasi, perang ekonomi, perang budaya, perang politik bahkan perang peradaban. Disinilah peran *soft power* (keuatan non militer) menjadi sangat penting dan mengemuka dalam menghadapi

ancaman perang modern ini .Namun demikian disisi lain globalisasi juga memberikan dampak positif, antara lain ditandai dengan semakin eratnya hubungan antar bangsa di dunia, yang menciptakan suatu *kesaling-tergantungan* antar negara-negara se antero dunia. Keeratan hubungan tersebut antara lain akan bermanfaat untuk menyelesaikan masalah global yang perlu ditanggulangi bersama , *seperti energy security, global climate change, terrorist financing ( The Real Triple Treaths)*. Disisi lain globalisasi juga berdampak negatif, yang ditandai dengan timbulnya persaingan antar bangsa, sehingga setiap negara dituntut untuk memiliki daya saing dan keunggulan diberbagai bidang kehidupan.

Menghadapi hakekat ancaman yang beragam, dan kompleks tersebut, semakin menguat keyakinan bangsa Indonesia akan sistem pertahanan semesta dalam menghadapi dinamika ancaman sekarang dan kedepan. Implementasi pendekatan komprehensif dan integratif karena pertahanan negara tidak cukup didekati dari aspek militer semata, akan tetapi memerlukan pendekatan terpadu secara non militer dengan pendekatan secara militer, sebagai satu kesatuan pertahanan .(*Total defence* ).

Hal ini juga telah diatur dalam UU.RI. Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa sistem pertahanan negara adalah bersifat semesta , yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, dan dilaksanakan secara menyeluruh . total dan terpadu. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama , dengan didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung . Sistem pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman non militer , menempatkan lembaga pemerintah diluar diluar bidang pertahanan , sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa, termasuk mahasiswa, para intelektual Indonesia yang merupakan bagian dari *civil society*. Bersinergi dengan itu , maka pembangunan pertahanan Indonesia, baik militer maupun non militer juga harus dilaksanakan secara terpadu, sehingga menghasilkan suatu kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang memiliki efek penangkalan yang tinggi dalam menjaga keutuhan dan tetap tegaknya NKRI.

### **3.4.2. Perkembangan Global, Regional dan Nasional.**

Dalam membahas perkiraan ancaman terutama ancaman non-militer, harus kita waspadai *perkembangan Global, Regional dan Kondisi Nasional*. Perkembangan-perkembangan tersebut langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi

perikehidupan masyarakat Indonesia yang berpotensi menjadi ancaman terhadap kedaulatan NKRI, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

a. Perkembangan Global.

Globalisasi serta kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya di bidang Informasi, komunikasi dan transportasi telah merubah tatanan kehidupan masyarakat dunia. Batas pergaulan antar masyarakat dunia menjadi semakin tidak terbatas (*borderless*). Batas antar negara seakan-akan menjadi “kabur” dan informasi dapat dengan cepat merebak keseluruh penjuru dunia serta seluruh lapisan masyarakat. Pada tatanan hubungan antar bangsa telah terjadi perubahan yang cukup fundamental yang ditandai dengan perubahan suasana lingkungan strategis yakni adanya perkembangan tata nilai universal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pemahaman Demokratisasi, HAM, Lingkungan Hidup yang salah langkah serta Pasar Bebas, juga adanya paham radikalisme dan terorisme telah merubah tatanan kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Kondisi tersebut berpengaruh pada bidang sosial, budaya, iptek, ideologi, politik, ekonomi dan juga pertahanan keamanan. yang tidak mungkin untuk dihindari.

b. Perkembangan Regional.

Globalisasi yang terus berkembang mempengaruhi kondisi regional. Salah satu respon yang muncul adalah penguatan regional di berbagai bidang seperti yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang tergabung dalam Piagam ASEAN masing-masing mengharapkan dapat memperoleh manfaat untuk memajukan negaranya melalui pelaksanaan Piagam ASEAN. Sehingga hubungan antar negara anggota termasuk hubungan masyarakatnya akan semakin berkembang dan terbuka luas diberbagai aspek kehidupan terutama di bidang ekonomi dan sosial-budaya. Interaksi kehidupan masyarakat akan semakin kuat sehingga akan terjadi perubahan kultur sesuai dengan intensitas kehidupan dimana pengaruh negara-negara yang lebih maju akan lebih kuat. Sejalan dengan perkembangan tersebut maka mobilitas masyarakat akan semakin tinggi sehingga batas-batas negara anggota semakin kabur. Dalam kondisi ini akan sangat mungkin terjadi kegiatan-kegiatan yang bersifat illegal yang dilakukan oleh oknum / kelompok tertentu untuk tujuan tertentu sehingga dapat merugikan bangsa dan negara.

c. Kondisi nasional.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang didiami oleh lebih dari 300 suku bangsa membentuk kondisi yang sangat majemuk. Kondisi heterogen tersebut ber-

implikasi pula terhadap kategorisasi issue-issue keamanan sesuai dengan besarnya untuk dikelompokkan dalam issue keamanan nasional, provinsi atau lokal. Situasi dan kondisi nasional yang berkembang, disamping dipengaruhi oleh perkembangan secara global maupun regional, pada kenyataannya nampak pada segenap aspek/gatra kehidupan bangsa, baik dalam gatra alamiah maupun gatra sosial.

1) Aspek / Gatra Geografi.

Posisi Indonesia dipersimpangan antara dua benua dan dua samodra sangat strategis untuk kepentingan lalu lintas perekonomian dunia. Namun juga menimbulkan kerawanan akan timbulnya disintegrasi bangsa. Ribuan pulau yang dihubungkan oleh laut memiliki karakteristik yang berbeda-beda menyebabkan munculnya kerawanan sosial yang disebabkan oleh perbedaan daerah yang misalnya daerah yang kaya dengan sumber alamnya dengan daerah yang tidak memiliki kekayaan alam, dimana sumber kehidupan sehari-hari hanya dari subsidi pemerintah dan daerah lain atau tergantung dari daerah lain. Daerah yang berpotensi memisahkan diri adalah yang paling jauh dari ibukota. Atau daerah yang besar pengaruhnya dari negara tetangga atau daerah perbatasan

2) Aspek / Gatra Demografi.

Jumlah penduduk yang besar dengan penyebaran tidak merata, kualitas SDM yang rendah, sempitnya lahan pertanian mengakibatkan semakin tingginya kemiskinan karena rendahnya tingkat pendapatan, ditambah lagi mutu pendidikan yang rendah menyebabkan sulitnya kemampuan bersaing dan dapat dengan mudah dipengaruhi oleh tokoh elit politik / intelektual untuk mendukung kepentingan pribadi atau golongan.

3) Aspek / Gatra Kekayaan Alam.

Kekayaan alam Indonesia yang melimpah baik hayati maupun non hayati tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Walaupun belum keseluruhan dapat digali dan dikembangkan secara optimal, namun potensi ini perlu didayagunakan dan dipelihara sebaik-baiknya untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dalam peran sertanya secara berkeadilan guna mendukung kepentingan nasional. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah dan penyebarannya yang tidak merata dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya dis-integrasi bangsa, karena

masalah ini meliputi hal-hal seperti pengelolaan, pembagian bagi hasil, pembinaan apabila terjadi kerusakan dari pengelolaan.

4) Aspek / Gatra Ideologi.

Pancasila yang merupakan dasar negara dan alat pemersatu bangsa Indonesia dalam penghayatan dan pengamalannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Bahkan saat ini sering diperdebatkan. Ideologi Pancasila cenderung tergugah dengan adanya kelompok-kelompok tertentu yang mengedepankan paham liberal atau kebebasan tanpa batas. Demikian pula paham keagamaan yang bersifat ekstrim kiri atau kanan. Gerakan-gerakan kelompok radikal merupakan salah satu ancaman nyata. Motif yang melatarbelakangi gerakan-gerakan tersebut dapat berupa dalih agama, etnik, atau kepentingan rakyat. Pada saat ini terdapat oknum atau kelompok radikal yang menggunakan atribut keagamaan berusaha mendirikan negara dengan ideologi lain. Bila kondisi ini tidak ditangani dengan bijaksana pada akhirnya dapat menimbulkan kemungkinan dis-integrasi bangsa.

5) Aspek / Gatra Politik.

Ancaman berdimensi politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri ancaman berdimensi politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi atau blokade politik merupakan bentuk-bentuk ancaman nir-militer yang berdimensi politik sering digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Menggunakan issue global sebagai kendaraan untuk menekan Indonesia. Pelaksanaan HAM, demokratisasi, penanganan lingkungan hidup serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel selalu menjadi komoditas politik bagi masyarakat internasional untuk mengintervensi suatu negara.

Ancaman berdimensi politik dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa. Atau dengan cara menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman separatisme juga merupakan bentuk ancaman politik di dalam negeri. Hal lain yang juga menonjol adalah timbulnya penguatan identitas lokal sebagai respon masyarakat dalam menyikapi pemberlakuan Otonomi Daerah.

Penguatan identitas lokal banyak dimunculkan dalam kemasan issue putra daerah, hak adat, dan hak ulayat. Kondisi yang berkembang sangat kontraproduktif dengan prinsip bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Penguatan identitas lokal yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menyulut konflik horisontal yang berdimensi suku, agama, ras dan antar golongan serta antar kepentingan.

6) Aspek / Gatra Ekonomi.

Perekonomian tidak saja menjadi alat stabilitas dalam negeri, tetapi juga merupakan salah satu alat penentu posisi tawar setiap negara dalam hubungan antar negara atau pergaulan internasional. Negara yang kondisi perekonomiannya lemah menghadapi kesulitan dalam berhubungan dengan negara lain yang posisi perekonomiannya lebih kuat. Ancaman yang berdimensi ekonomi dikelompokkan jadi dua yaitu internal dan eksternal. Indonesia hadapi ancaman internal berupa inflasi, pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas. Eksternal berbentuk indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing lemah, ketidaksiapan hadapi era globalisasi (pasar bebas) dan tingkat ketergantungan yang tinggi.

7) Aspek / Gatra Sosial Budaya.

Ancaman yang berdimensi sosial budaya dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Yang dari dalam didorong oleh issue-issue kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketidakadilan. Hal tersebut menjadi awal timbulnya permasalahan separatisme, terorisme, kekerasan yang berakar berurat berkembang, dan bencana akibat perbuatan manusia. Masalah ini lama kelamaan menjadi "*kuman penyakit*" yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Watak kekerasan yang melekat dan berurat berakar berkembang seperti api dalam sekam yang menjadi pendorong konflik horisontal antar masyarakat atau konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan daerah. Pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung tidak seimbang dengan daya dukung dan kondisi lingkungan hidup yang terus menurun. Bersamaan dengan itu merebak berbagai wabah penyakit pandemik (flu burung, demam berdarah, HIV/AIDS).

Ancaman dari luar timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam globalisasi. Penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri sulit dibendung dan berpengaruh pada nilai-nilai di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi

mengakibatkan dunia menjadi kampung global yang interaksi antar masyarakat berlangsung dalam waktu yang aktua. Tidak hanya terjadi transfer informasi, tetapi juga transformasi dan sublimasi nilai-nilai luar secara serta merta sulit dikontrol. Akibatnya terjadi benturan peradaban yang lambat laun nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa semakin rapuh oleh nilai-nilai individualisme. Juga terjadi konflik vertikal antar pemerintah pusat dengan daerah, maupun konflik horisontal yang berdimensi etnoreligius masih menunjukkan potensi yang harus diperhitungkan. Bentuk-bentuk ancaman social budaya tersebut bila tidak dapat ditangani dengan cepat dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

8) **Aspek / Gatra Pertahanan dan Keamanan.**

Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini menjadi bersifat multidimensional yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan komunikasi. Demikian pula sarana dan prasarana pendukung didalam pengamanan bentuk ancaman yang bersifat multidimensi yang bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Adanya ketidaksamaan persepsi tentang ancaman pertahanan dan keamanan dapat menimbulkan tidak efektifnya penanganan ancaman yang muncul sehingga cenderung dapat mengganggu stabilitas nasional.

### **3.4.3. Tantangan di abad 21.**

Tantangan di abad 21 tidak lepas dari dampak globalisasi. Berakhirnya perang dingin telah merubah tatanan kehidupan bangsa-bangsa didunia secara universal. Telah terjadi perubahan politik dunia. Perubahan politik dunia yang terjadi di era globalisasi, telah menghadirkan suatu kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik global, regional maupun nasional. Perkembangan tersebut antara lain menyebabkan terjadinya perubahan pada situasi keamanan dunia dengan munculnya isu-isu keamanan baru.

Dimasa lalu, issue keamanan tradisional cukup menonjol, yakni yang berhubungan dengan geopolitik dan geostrategi khususnya pengaruh kekuatan blok Barat dan blok Timur. Pada masa itu kekhawatiran dunia terutama pada masalah pengembangan kekuatan militer dan senjata strategis serta hegemoni. Issue keamanan pada dekade terakhir ini makin kompleks dengan meningkatnya terorisme, perompakan dan

pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, penangkapan ikan secara illegal, dan kejahatan lintas negara lainnya. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut makin kompleks karena dikendalikan oleh aktor-aktor dengan jaringan lintas negara yang sangat rapi, serta memiliki kemampuan teknologi dan dukungan finansial.

Seiring dengan perkembangan global tersebut, di Indonesia berlangsung Gerakan Reformasi, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis, bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejauh ini reformasi nasional telah memberi isyarat perubahan positif dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia, melalui penataan sistem pemerintahan, baik politik, hukum, ekonomi, maupun pertahanan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Telah terjadi perubahan lingkungan strategis yang diwarnai berbagai issue politik, ekonomi mempengaruhi aspek keamanan global, regional maupun domestik. Issue politik, ekonomi dan keamanan merupakan aspek-aspek yang saling kait-mengkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

a) *Pada lingkup global*, berakhirnya perang dingin ternyata tidak menjamin terwujudnya stabilitas keamanan dunia. Dunia masih tetap diwarnai oleh isu-isu keamanan tradisional seperti sengketa perbatasan, perlombaan persenjataan atau proleferasi senjata nuklir dan senjata pemusnah massal. Kompleksitas permasalahan keamanan global makin bertambah dengan adanya praktek-praktek hegemoni yang dikembangkan melalui penguatan aliansi, kemampuan militer, keunggulan teknologi termasuk keunggulan di bidang ekonomi. Disadari bahwa hubungan antar negara yang dibangun atas dasar saling percaya dan menghormati dapat meredam potensi konflik. Namun semakin lebarnya jurang kemampuan antara negara maju dan negara berkembang terutama di bidang ekonomi, teknologi dan militer, dapat menjadi penghalang dalam menjamin hubungan antar bangsa. Dalam kondisi demikian, perlombaan untuk merebut pengaruh melalui praktek-praktek hegemoni di berbagai bidang tidak jarang menjadi sumber konflik yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia.

Kekuatiran dan ketidakpastian yang melanda bangsa-bangsa di dunia menjadi semakin kompleks dengan timbulnya isu keamanan baru yakni keamanan non-tradisional, seperti terorisme, konflik antar etnis, pembajakan di laut atau di udara, kriminalitas lintas negara, antara lain : penyelundupan berbagai komoditi termasuk senjata, obat-obatan terlarang/narkoba, pencurian sumber daya alam (*illegal fishing, illegal logging*), penyelundupan manusia (*trafficking*). Peningkatan

kriminalitas lintas negara tersebut antara lain didorong oleh adanya jaringan berskala internasional yang didukung dengan kemampuan teknologi dan finansial serta jaringan yang rapi tersebar di sejumlah negara.

- b) *Pada lingkup regional*, perkembangan dan kecenderungan global merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamika keamanan kawasan regional. Kecenderungan yang muncul di kawasan ini adalah terjadinya pergeseran masalah keamanan regional, antara lain berbagi konflik yang menyangkut klaim teritorial, jalur komunikasi laut dan jalur perdagangan melalui laut. Isu-isu keamanan non-tradisional pada lingkup global, juga menjadi isu utama kawasan regional. Interaksi dan dinamika hubungan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Rusia dan Uni Eropa merupakan faktor yang berpengaruh dalam peta keamanan di Asia Pasifik.
- c) *Pada lingkup domestik*, Indonesia sebagai bangsa yang berada ditengah-tengah perkembangan dunia, tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global dan regional. Dinamika politik, sosial dan keamanan yang terjadi di kawasan , ikut berpengaruh terhadap perkembangan sosial politik dan keamanan yang terjadi di Indonesia. Isu keamanan domestik yang timbul pada dekade terakhir ini tidak terlepas dari kontribusi faktor-faktor eksternal, baik langsung maupun tidak langsung. Selain faktor eksternal, terdapat pula sejumlah faktor internal yang berpotensi stabilitas keamanan nasional. Faktor-faktor tersebut antara lain, dampak heterogenitas suku bangsa Indonesia, situasi ekonomi yang menyebabkan beban hidup semakin berat, serta faktor politik dan sosial. Akumulasi faktor eksternal dan internal tersebut kemudian muncul dalam berbagai bentuk ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional, dan dapat mengganggu stabilitas kawasan.

Geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menyebabkan kondisi nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi strategis. Mencermati dinamika konteks strategis baik global, regional maupun domestic, maka ancaman yang sangat mungkin dihadapi Indonesia dapat berbentuk ancaman keamanan tradisional maupun ancaman keamanan non-tradisional. Ancaman keamanan tradisional berupa invasi atau agresi militer dari negara lain ke Indonesia diperkirakan kecil kemungkinannya. Peran PBB dan reaksi dunia internasional diyakini mampu mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara untuk memaksakan kehendaknya terhadap negara lain. Ancaman

dari luar lebih besar kemungkinan bersumber dari kejahatan terorganisir lintas negara, dengan memanfaatkan kondisi dalam negeri yang tidak kondusif. Perkiraan ancaman dan gangguan yang dihadapi Indonesia meliputi terorisme, gerakan separatisme, kejahatan lintas negara (penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem, imigran gelap, pembajakan/perompakan), aksi radikalisme, konflik komunikasi, dan dampak bencana alam.

#### **3.4.4. Pertahanan Non Militer dan Pembinaannya.**

Sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU.RI. No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Substansi dari pasal tersebut merefleksikan bahwa pertahanan negara merupakan fungsi pemerintahan negara yang cakupannya tidak hanya terbatas pada pertahanan militer, tetapi juga termasuk ke dalam fungsi lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan.

Telah disebut di atas bahwa ancaman non-militer pada dasarnya tidak secara langsung kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Namun pada skala tertentu dapat bereskalasi atau berkembang luas sehingga mengganggu stabilitas nasional, yang pada akhirnya mengancam eksistensi negara. Ancaman non-militer ditangani dengan pendekatan non-militer, sedangkan fungsi pertahanan militer dapat digunakan pada kondisi tertentu sebagai unsur bantuan. Disinilah esensi dari Sistem Pertahanan Semesta yang diwujudkan dengan keterlibatan dengan lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan untuk memerankan fungsi pertahanan sipil dalam penanganan ancaman non-militer.

Postur pertahanan non-militer merupakan refleksi dari hasil pembangunan seluruh sumber daya nasional. Unsur-unsur pertahanan non-militer berada dalam lingkup wewenang dan tanggung jawab setiap instansi di luar bidang Kementerian Pertahanan. Oleh karena itu pembangunan postur pertahanan non-militer menjadi tanggung jawab seluruh Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPND), yang pelaksanaannya tertuang dalam sektor masing-masing, serta pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Pertahanan.

Pembinaan pertahanan non-militer dalam rangka menghadapi ancaman non-militer diselenggarakan untuk menyiapkan pembangunan manusia Indonesia yang selaras dengan pembangunan nasional. Dalam rangka itu tiap-tiap Kementerian berkewajiban menyusun kebijakan dan strategi di bidangnya masing-masing. Pembinaan pertahanan non-militer bertujuan untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas secara utuh dan menyeluruh agar memiliki daya saing di era global, serta membina segenap sumber daya nasional untuk mewujudkan Indonesia yang aman, bersatu dan berkeadilan.

Pembangunan manusia yang berkualitas dilakukan melalui pendidikan, termasuk di dalamnya Pendidikan Kesadaran Bela Negara. Warga negara yang memiliki kesadaran bela negara dapat diarahkan untuk terwujudnya pertahanan non-militer dalam rangka perwujudan Sistem Pertahanan Semesta. Warga negara yang memiliki kesadaran bela negara dapat mengabdikan dirinya sebagai Komponen Cadangan dan dikembangkan secara bertahap dan berlanjut sampai mencapai kekuatan yang proporsional. Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat Komponen Utama (TNI) dalam menghadapi ancaman militer, sedangkan Komponen Pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.

#### **3.4.5. Pembinaan Kekuatan Pertahanan Non-militer.**

Pertahanan negara non-militer harus dapat ditempatkan dalam konteks sebagai bentuk diplomasi, pelayanan publik, meningkatkan daya saing dalam ekonomi, memperkuat ikatan sosial budaya, menjaga ketersediaan pasokan energi dan jaminan beroperasinya sistem distribusinya secara baik, pelabuhan yang aman, bandara yang aman dan efisien, pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta jaminan keamanan sosial. Dari konteks tersebut, jelas bahwa dimensi pertahanan negara tidak saja bersifat fisik yang berorientasi pada pertahanan militer yang mengandalkan kekuatan bersenjata, tetapi semua aspek kehidupan memiliki dimensi pertahanan negara yang dapat disinergikan.

Penyinerjian tersebut tertuang dalam pasal 1 titik 2 UU. RI. No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi : *Sistem Pertahanan Negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, sumber daya nasional lainnya yang*

*disiapkan secara dini oleh pemerintah an diselenggarakan total, terpadu, terarah dan berlanjut, untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala ancaman”*

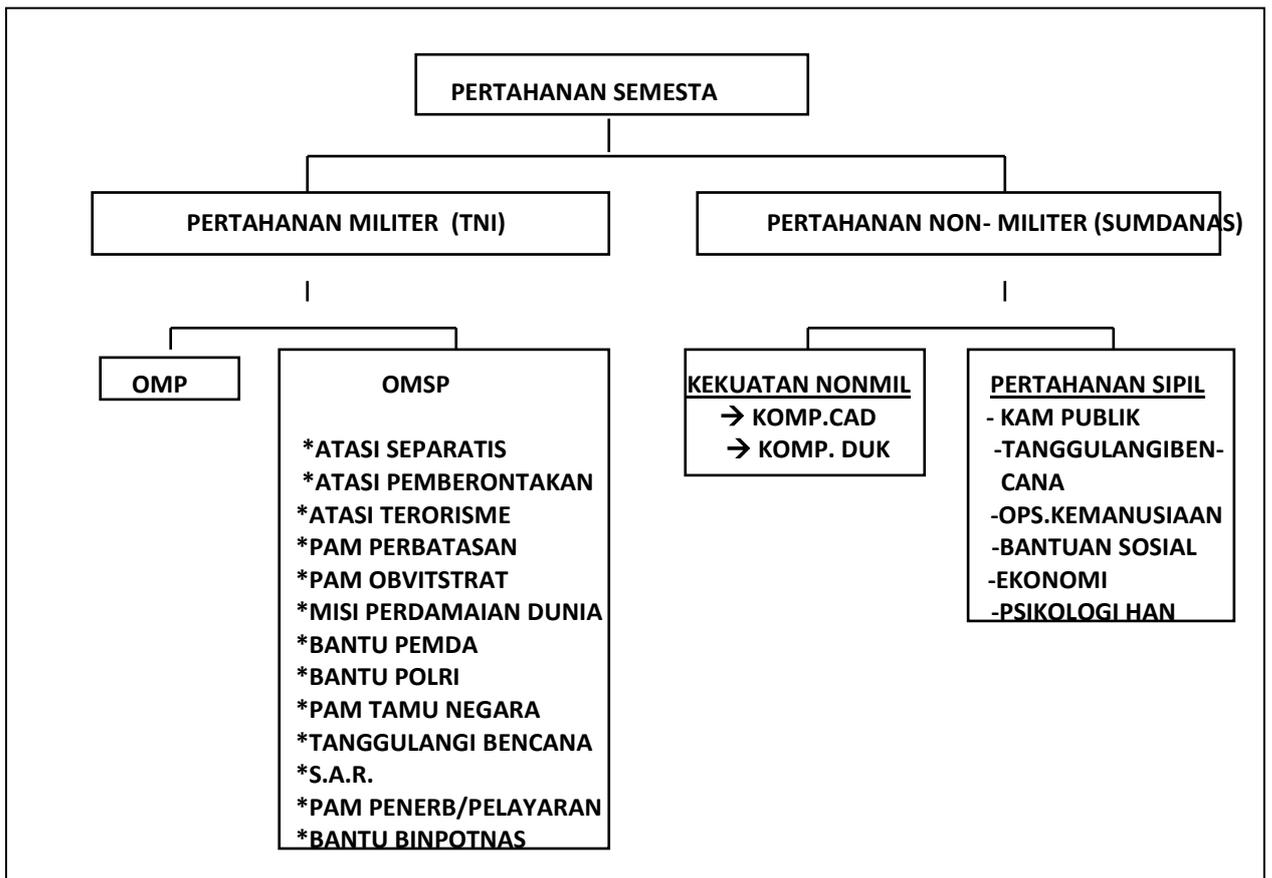
Sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buata, dan saran prasarana nasional dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Potensi sumber daya nasional adalah segala sumber daya yang dapat didayagunakan melalui proses transformasi menjadi potensi kekuatan pertahanan negara yang pada saatnya diperlukan dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan pertahanan negara. Transformasi dari sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara salah satunya dimaksudkan untuk Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, dalam rangka memperkuat dan memperbesar Komponen Utama pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer.

Kesemestaan yang merupakan sifat Sistem Pertahanan Negara (*Total Defence*) dalam konteks pertahanan negara mempunyai dua fungsi, yaitu dalam bentuk Pertahanan Militer (*Military Defence*) dan Petahanan Non-militer (*Non Military Defence*) yang dilaksanakan TNI meliputi fungsi Operasi Militer Perang (OMP / *War*) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP / *Other Then War*). Untuk pertahanan non-militer dibentuk Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung guna memperkuat Komponen Utama, sedangkan Petahanan Sipil (*Civil Defence*) untuk menghadapi ancaman non-militer.

Dalam rangka membangun pertahanan non-militer Kementerian Pertahanan Cq Direktur Jendral Potensi Pertahanan menyelenggarakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagai bagian dari *psychological defence*. Penyelenggaraannya dikordinasikan dengan Kementerian yang juga menangani pembinaan kesadaran bela negara di masyarakat, di antaranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Dalam negeri. Secara khusus juga telah diarahkan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” untuk menyelenggarakan pembinaan kesadaran bela negara untuk mahasiswa dengan memberikan mata kuliah baru yakni “Pendidikan Bela Negara”.

Bagan dibawah ini adalah visualisasi *kesemestaan* sifat pertahanan negara.



Gambar 3 : visualisasi kesemestaan bela negara

#### 4. Latihan Soal

Negara yang besar dan maju ternyata tidak ditentukan oleh besarnya sumberdaya alam (SDA) maupun umur dari suatu Negara; melainkan lebih ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya (SDM). Disisi lain, untuk menguasai suatu Negara nampaknya telah terjadi pergeseran paradigma dari "*hard power* kepada *soft power*". Sehubungan dengan hal tersebut, Pendidikan Bela Negara telah mengajarkan tentang "*leadership*" dan "*entrepreneurship*" yang berwawasan kebangsaan.

- a. Untuk membangun ketahanan nasional yang tangguh, jelaskan semampu saudara tentang peranan masing-masing dari 3 (tiga) komponen pertahanan negara, yang terdiri dari komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung dalam pengerahan dan pemberdayaan SDA dan SDM.
- b. Kemukakan beberapa indikator penting dari SDM unggul, kemudian tunjukkan peranan indikator penting tersebut dalam pembangunan nasional.
- c. Sehubungan dengan terjadinya pergeseran paradigma dari "*hard power* kepada *soft power*", coba saudara tunjukkan pentingnya pertahanan *nirmiliter* dalam membangun Ketahanan Nasional (perhatikan aspek-aspek).
- d. Berikan gambaran saudara masing-masing tentang "*leadership*" dan "*entrepreneurship*" yang diperlukan bagi Indonesia pada abad 21.
- e. Demi masa depan saudara, tegaskan langkah-langkah yang akan saudara tempuh untuk meningkatkan kadar kepemimpinan (*leadership*), dan juga kewirausahaan (*entrepreneurship*) bagi saudara.

# **BAB 4**

## **WIDYA MWAT YASA DAN JATI DIRI**

### **I. Capaian Pembelajaran (Kompetensi Dasar)**

Mahasiswa mampu memahami, mampu menjelaskan, terjadi perubahan pola berpikir tentang hak dan kewajiban bela negara, khususnya menjelaskan pengertian tentang Jati diri UPN, dan Identitas nasional, mengenal Widya Mwat Yasa sebagai jati diri UPN “Veteran”, dapat menjelaskan secara singkat sejarah UPN “Veteran”, dan dapat menjelaskan tentang pengertian karakter serta nilai-nilai /etika moral yang membentuk jati diri bangsa Indonesia.

### **II. Gambaran Umum**

Menjelaskan pengertian Jati diri UPN, dan Identitas nasional, mengenal Widya Mwat Yasa sebagai jati diri UPN “Veteran”, dapat menjelaskan secara singkat sejarah UPN “Veteran”, dan dapat menjelaskan tentang pengertian karakter serta nilai-nilai /etika moral yang membentuk jati diri bangsa Indonesia, dan integritas.

### **III. Relevansi terhadap pengetahuan**

1. Mampu Menjelaskan Widya Mwat Yasa Sebagai jati diri UPN Veteran
2. Mampu menjelaskan Jati Diri
3. Mampu menjelaskan Karakter Bangsa
4. Mampu menjelaskan Tiga pilar dalam menumbuhkan Jatidiri UPN “Veteran”
5. Mampu menjelaskan Integritas
6. Latihan Soal

### **IV. Sub-sub Bab**

#### **1. Widya Mwat Yasa sebagai jatidiri UPN “Veteran”**

Widya Mwat Yasa adalah sasanti atau semboyan dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. Semboyan ini adalah amanah dari para pejuang veteran pendiri lembaga pendidikan tinggi ini setelah mereka meletakkan senjata usai perjuangannya merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka meneruskan perjuangan dengan lebih memperhatikan masa depan bangsa melalui pendidikan. Para

pejuang veteran meletakkan fondasi pengabdian kepada bangsa dan negara. Niat luhur ini dinyatakan dengan sasanti atau semboyan **“Widya Mwat yasa”** yang berarti : *“Menuntut Ilmu dalam rangka pengabdian kepada Bangsa dan Negara dengan hati yang suci bersih serta tulus ikhlas”*. Atau dengan kalimat sederhana *“Ilmu untuk Pembangunan bangsa”*. Semboyan ini tetap dipertahankan dan sebagai jatidiri dari UPN “Veteran” Yogyakarta – Jawa Timur – Jakarta.

A. Sejarah singkat berdirinya UPN “Veteran”.

1) UPN “Veteran” Yogyakarta.

- a) Tanggal 5 Januari 1958, para veteran pejuang dan veteran pembela kemerdekaan mendirikan Akademi Veteran Nasional.
- b) Berdasarkan SKEP Menteri Urusan Veteran Nomor 139/Kpts/1958, tanggal 8 Oktober 1958, diresmikan berdirinya Akademi Pembangunan Nasional (APN) Veteran Yogyakarta dengan 5 (lima) jurusan yaitu : Geologi, Pertambangan, Ekonomi, Pertanian dan Teknologi Perusahaan.
- c) Tanggal 12 Pebruari 1959 Presiden Ir. Soekarno meresmikan APN “Veteran” Yogyakarta.
- d) Dalam perjalanan sejarah, di Surabaya dan di Jakarta juga telah berdiri perguruan tinggi yang didirikan oleh para veteran pejuang. Awal 1965 ketiga perguruan tinggi yang didirikan oleh veteran tersebut diintegrasikan dengan nama Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional (PTPN) “Veteran”. Ketiga PTPN “Veteran” tersebut dengan masing-masing dengan istilah cabang Yogyakarta, cabang Jawa Timur dan cabang Jakarta.
- e) Berdasarkan Keputusan Mehankam/Pangab Nomor Kep/1555/XI/1977 tanggal 30 Nopember 1977 nama PTPN “Veteran” Yogyakarta dirubah menjadi UPN “Veteran” Yogyakarta.
- f) Berdasarkan SKEP Menhankam/Pangab Nomor 01/II/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 UPN “Veteran” direstrukturisasi dan kata cabang dihapuskan, masing-masing berdiri sendiri menjadi UPN “Veteran” Yogyakarta, UPN “Veteran” Jawa Timur dan UPN “Veteran” Jakarta.

2) UPN “Veteran” Jawa Timur

- a) Tanggal 5 Juli 1959, para veteran pejuang Jawa Timur mendirikan Akademi Administrasi Perusahaan “Veeran”. (APPV) Surabaya.

- b) Berdasarkan SKEP Menteri Urusan Veteran dan Mobilisasi R.I. Nomor 133/Kpts/1965 tanggal 21 Maret 1965 APPV Surabaya diintegrasikan ke dalam PTPN "Veteran" Yogyakarta dan selanjutnya bernama PTPN "Veteran" cabang Jawa Timur dengan 3 (tiga) fakultas yaitu : Ekonomi, Pertanian dan Teknik Kimia.
- c) Berdasarkan SKEP Menteri Transmigrasi Veteran dan Demobilisasi Nomor 062/Kpts/Mentransvet/1968 status PTPN "Veteran" Cabang Jawa Timur dirubah menjadi Perguruan Tinggi Kedinasan dibawah Dephankam.
- d) Tanggal 30 Juni 1976 nama PTPN "Veteran " Cabang Jawa Timur dirubah menjadi UPN "Veteran" Cabang Jawa Timur.
- e) Berdasarkan Keputusan Menhankam Nomor Kep/01/II/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 UPN "Veteran" direstrukturisasi sehingga kata cabang dan kedudukan sebagai cabang dihapuskan dan masing-masing berdiri sendiri menjadi UPN "Veteran" Yogyakarta, UPN "Veteran" Jawa Timur dan UPN "Veteran" Jakarta. Dan selanjutnya dikelola oleh Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman (YKPBS). Mulai tahun 2008 pengelolaan di bawah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP).
- f) Berdasarkan Keputusan Bersama Menhankam dan Mendikbud Nomor Kep/0307/1994 – Kep/10/XI/1994 status UPN "Veteran" Jawa Timur dirubah dari Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) menjadi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan 5 (lima) fakultas : Ekonomi, Pertanian, Teknik Industri, FISIP, Teknik Sipil.

### 3). UPN "Veteran" Jakarta

- a) Sebelum 1965 di Jakarta telah ada beberapa perguruan tinggi yang didirikan oleh para veteran pejuang, yaitu Akademi Tekstil, Akademi Bank, Akademi Tata Laksana & Pelayaran "Yos Sudarso".
- b) Berdasarkan Keputusan Menteri Veteran dan Demobilisasi Nomor 09/Kpts/1965 dilaksanakan pengintegrasian perguruan tinggi tersebut diatas dalam wadah PTPN "Veteran" Cabang Jakarta.
- c) Berdasarkan Keputusan Menhankam Nomor 01/II/1993 UPN "Veteran" direstrukturisasi sehingga kata cabang dan kedudukan sebagai cabang dihapuskan dan masing-masing berdiri sendiri termasuk PTPN "Veteran" Cabang Jakarta menjadi UPN "Veteran" Jakarta.

B. “Widya Mwat Yasa” sebagai semboyan sekaligus jatidiri UPN “Veteran” mempunyai arti “*Ilmu untuk pembangunan bangsa*” atau dapat juga diartikan “*Belajar untuk membangun*”. Disini lebih dimaknai dengan membangun jiwa raga sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara secara lahir batin adil dan merata. Implementasi semboyan ini berupa proses belajar mengajar semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara, diwujudkan dalam manusia –manusia individu yang unggul, cerdas intelektual (IQ), cerdas emosional (EQ) dan cerdas spiritual (SQ), berwawasan kebangsaan agar mampu menjadi kader pembangunan atau kader perubahan.

Makna tersebut diatas merupakan amanah atau pesan dari para pendiri UPN “Veteran” yang tidak lepas dari keikhlasan, pengorbanan serta pengalaman mereka pada waktu berjuang merebut kemerdekaan kemudian mempertahankan kemerdekaan itu.

Pesan para pejuang :

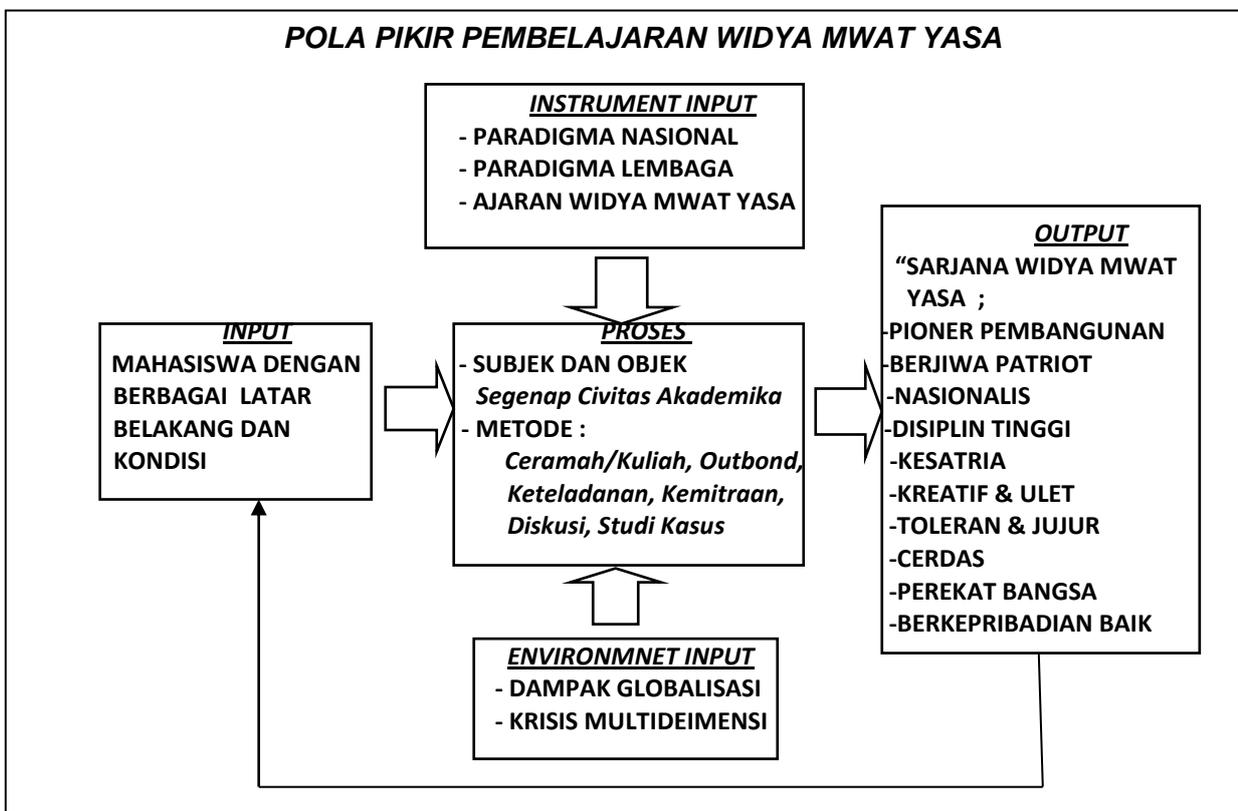
- 1). Motto pejuang :
  - Tiada kehidupan tanpa perjuangan.
  - Tiada perjuangan tanpa pengorbanan.
  - Tiada pengorbanan tanpa keikhlasan.
  - Tiada keikhlasan tanpa keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.
- 2). Hayati dan amalkan nilai-nilai kejuangan bangsa, utamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi/golongan.
- 3). Ingat amanat penderitaan rakyat.
- 4). Jadilah pelaku penentu, pelopor, pionir pembangunan.
- 5). Berikanlah yang terbaik untuk rakyat, bangsa dan negara.

C. *Visi* Widya Mwat Yasa adalah menjadikan mahasiswa sebagai individu yang unggul yakni : cerdas intelektual, berkepribadian baik, mampu bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan *kompetensi* dari pembelajaran Widya Mwat Yasa adalah :

- 1) Mahasiswa mampu menempatkan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi, golongan, daerah, suku/ras, agama dan kelompok.
- 2) Mahasiswa Mampu menempatkan dirinya sebagai insan perekat bangsa.
- 3) Mahasiswa mampu menerima keberagaman/pluralitas dan mampu saling percaya.
- 4) Mahasiswa mampu dan trampil belajar sehingga menjadi individu manusia yang cepat menguasai bidang ilmunya.

- 5) Mahasiswa menjadi toleran, disiplin, kreatif, santun, dapat bekerja sama, bertanggung jawab, bermoral, dan cinta tanah air.
- 6) Mahasiswa yang peduli lingkungan.
- 7) Mahasiswa mampu menyelesaikan konflik dalam dirinya serta mampu berpartisipasi dalam upaya penyelesaian konflik dalam masyarakat, bangsa.
- 8) Mahasiswa tanggap dalam perubahan dan perkembangan / perubahan situasi.
- 9) Mahasiswa bangga menjadi bangsa Indonesia dan mampu untuk membelanya.
- 10) Mahasiswa mau dan mampu mempertahankan kebersamaan, persatuan, ketertiban, kedisiplinan dan keharmonisan.

Proses pembelajaran Widya Mwat Yasa dan hasil yang diharapkan tidak bertentangan dengan Pendidikan Bela Negara, bahkan sangat mendukung pelaksanaan Pendidikan Bela Negara, sebagaimana digambarkan dengan pola pikir sebagai berikut :



Gambar - 4 : Pola Pikir Pembelajaran Widya Mwat Yasa

## 2. Jatidiri.

### 2.1. Pengertian jatidiri.

Jatidiri atau identitas seseorang akan membedakan dirinya dengan orang lain. Identitas atau jatidiri suatu institusi atau lembaga akan membedakan institusi atau lembaga itu dengan lembaga atau institusi lainnya. Demikian juga identitas atau jatidiri suatu bangsa akan membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya.

Identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu "*identity*" yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jatidiri. Ciri-ciri yang dimaksud adalah sesuatu yang menandai suatu benda atau orang. Contohnya, ciri-ciri fisik dan ciri-ciri non fisik seseorang. Orang Papua berambut keriting dan berkulit kehitaman, sedang orang Eropa berkulit putih dan berambut pirang. Sedang ciri-ciri non fisik misalnya gaya seseorang berbicara, cara makan dan lain-lain.

#### A. Beberapa pendapat tentang jati diri.

- 1) Soemarno Soedarsono seorang widyaiswara/dosen Lemhanas (2001) menyatakan bahwa identitas atau jatidiri adalah bahwa identitas atau jatidiri adalah (a). *Suatu ciri-ciri, sikap dan perilaku seseorang yang membedakan dengan orang lain.* (b). *Yang kemudian dapat disamakan dengan tanda diri atau bukti diri dari orang tersebut*
- 2) Parsudi Suparlan (1999) berpendapat bahwa atau jatidiri adalah (a). *Suatu pengenalan/pengakuan terhadap seseorang yang termasuk dalam suatu golongan.* (b). *Yang dilakukan berdasar serangkaian ciri-ciri yang merupakan satu kesatuan bulat dan menyeluruh.* (c). *Dengan yang menandainya sehingga masuk dalam golongan tersebut (contoh seseorang yang memakai seragam tentara / polisi).*
- 3) Menurut Hank Johnston (1994) identitas ada dua yaitu : (1). *Identitas individu → Identitas yang berkaitan dengan keseluruhan ciri seseorang. Dibentuk melalui interaksi biologi dan kehidupan sosial. Identitas individu dimiliki sejak lahir maupun melalui proses interaksi dengan yang lain.* (2). *Identitas kolektif → Identitas yang dimiliki oleh anggota-anggota kelompok yang mereka bangun melalui interaksi sesama anggotnya dan untuk kepentingan bersama atau kelompok.*

B. Kapan identitas atau jatidiri muncul ? Soemarno Soedarsono (2001) menyatakan bahwa jatidiri muncul dari dan ada ketika dalam interaksi. Seseorang mempunyai jatidiri tertentu karena diakui keberadaannya oleh seseorang atau sekelompok orang dalam hubungan yang berlangsung. Sedangkan dalam suatu hubungan yang lain yang melibatkan pelaku atau pelaku-pelaku lain yang berbeda dari pelaku-pelaku semula, maka

jatidiri berbeda dengan yang semula. Contoh seseorang mengajar disuatu lembaga pendidikan maka muncul jatidirinya sebagai seorang guru atau dosen. Sementara dilingkungan tempat tinggalnya dia muncul jatidirinya sebagai warga biasa dalam lingkungannya. Jatidiri seseorang akan tercermin dari penampilan yang terpadu dari rasa, cipta, karsa dan karya

C. Jatidiri dapat dikenali oleh masyarakat dari :

- 1) Refleksi hati nurani.
- 2) Keramahan hati yang tulus dan santun.
- 3) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 4) Keuletan dan ketangguhan.
- 5) Kecerdasan yang arif.
- 6) Harga diri.

D. Unsur-unsur jatidiri :

- 1). Sistem Nilai, yang diwujudkan oleh Olah Rasa :
  - a). Nilai refleksi hati nurani
  - b). Harga diri.
  - c). Taqwa kepada Tuhan
- 2). Sikap (attitude), yang diwujudkan oleh Olah Karsa :
  - a). Kebersamaan
  - b). Kecerdasan yang arif
- 3). Perilaku (behavior), yang diwujudkan oleh Olah Karya.
  - a). Keramahan, tulus dan santun
  - b). Ulet dan tangguh

## 2.2. Jatidiri UPN “Veteran”

Lembaga perlu jatidiri untuk menjaga kelestarian/ kelangsungan hidup atau eksistensi lembaga tersebut. Untuk itu lembaga perlu menggali nilai-nilai sejarah lembaga tersebut dan mengaktualisasikan diri dengan cara-cara :

- a. Memupuk semangat perjuangan.
- b. Memupuk semangat berprestasi.
- c. Memupuk semangat kebersamaan.

Dengan demikian UPN “Veteran” sebagai sebuah lembaga yang didirikan oleh para veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang bersemboyan “Widya Mwat Yasa” memiliki jatidiri sebagai berikut :

- a. Monumen hidup para veteran pejuang kemerdekaan.
- b. Kampus perjuangan.
- c. Kampus perekat bangsa.
- d. Kampus pioneer pembangunan.

### 2.3. Jatidiri Bangsa Indonesia.

Apa jatidiri nasional bangsa Indonesia ? - Bagaimana ? - Masih adakah ?

Bila ada yang menyatakan bahwa jatidiri bangsa Indonesia adalah Garuda Pancasila, Bendera Merah Putih, Bahasa Indonesia, Semboyan Bhineka Tunggal Ika, ataupun Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pernyataan itu betul bila yang dimaksud jatidiri secara fisik. Tetapi apa jatidiri yang ada di dalam hati nurani, di dalam jiwa bangsa Indonesia ?

Jatidiri bangsa Indonesia secara dinamis berubah dan berkembang seiring dengan perubahan jaman dan situasi yang mengiringi perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

- a. Masa kejayaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit tumbuh jatidiri religus & kesatuan.
- b. Setelah kedatangan VOC 1612 dan masa penjajahan Belanda tumbuh jatidiri anti penjajahan, rasa harga diri sebagai bangsa.
- c. Masa kebangkitan nasional tertanam jatidiri nasionalisme dan patriotisme.
- d. Masa generasi 1928 tumbuh menjadi jatidiri persatuan dan kesatuan.
- e. Masa pendudukan Jepang tumbuh jatidiri disiplin, militansi dan merdeka atau mati.
- f. Masa proklamasi menjadi jatidiri Pancasila dan UUD 1945.
- g. Pada perang kemerdekaan I dan II tumbuh menjadi jatidiri gotong royong, senasib seperjuangan.

Bung Karno (Presiden pertama RI) pernah mengatakan “*Bangsa Indonesia bukanlah bangsa tempe*” Ini dimaksudkan untuk menggugah semangat bangsa untuk berdiri tegak sebagai bangsa yang besar dan kuat. Tetapi dalam perjalanan sejarah kita tidak lepas dari pengaruh-pengaruh kehidupan dunia. Sampai saat ini di era reformasi yang berada dalam pengaruh globalisasi, jatidiri bangsa Indonesia mengalami perubahan

sebagai dampak perkembangan tata kehidupan dunia. Globalisasi telah menyebabkan bangsa Indonesia mulai kehilangan jatidirinya. Sehingga mudah dipengaruhi dan diombang-ambingkan oleh faham-faham asing yang belum tentu sesuai dengan dengan jatidiri bangsa. Fenomena-fenomena yang muncul dan berkembang antara lain : - Krisis multidimensi dengan berbagai sebab – Masuknya budaya asing – Gejala anomali sosial – Modernisasi yang mencabut budaya lokal – Melemahnya kemandirian bangsa – Semakin bebasnya masyarakat memberikan makna dan nilai – Semakin maraknya skeptisme dan sinisme terhadap Pancasila sebagai dasar Negara.

H. Kabul Santoso dkk dalam bukunya “Pembangunan Moral Bangsa Indonesia” 2005, menyatakan bahwa “Tim Perumus Jatidiri Bangsa Indonesia” dari Jawa Timur yang melakukan penelitian dan pengkajian terhadap jatidiri bangsa Indonesia pada tahun 2000 s/d 2004 merumuskan bahwa unsur-unsur jatidiri bangsa Indonesia meliputi :

1. Jatidiri Religius
2. Jatidiri Humanis.
3. Jatidiri Naturalis.
3. Jatidiri Terbuka.
4. Jatidiri Etika dan Moralis
5. Jatidiri Integrasi dan Harmoni.
6. Jatidiri Demokratis.
7. Jatidiri Komitmen terhadap Kebenaran .
8. Jatidiri Jujur & Adil.
10. Jatidiri Profesionalis & Kerja keras.
11. Jatidiri Menguasai Iptek
12. Jatidiri Mandiri.
13. Jatidiri Nasionalisme dan Patriotisme
14. Jatidiri Patuh pada Hukum
15. Jatidiri Kemasyarakatan
16. Jatidiri Berbudaya
17. Jatidiri Seni & Estetika.

Bila kita cermati rumusan unsur-unsur jatidiri tersebut dan juga pendapat – pendapat tentang jatidiri serta dinamika perkembangannya, jatidiri bangsa Indonesia sejatinya sudah ada sejak masa-masa sebelum era global. Pasang-surutnya unsur-unsur tersebut bergantung pada situasi dan kondisi perkembangan sejarah bangsa. Pertanyaan

yang muncul sekarang adalah : “*Mampukah kita dengan jatidiri tersebut menghadapi dampak negatif globalisasi ?*” Jawabannya *bisa dan mampu*, yaitu dengan jalan memberikan pendidikan karakter, antara lain dengan Pendidikan Bela Negara.

### **3. Karakter bangsa.**

#### **3.1. Pengertian karakter**

Karakter adalah ungkapan kepribadian dan merupakan sejumlah watak, tabiat, perangai yang inheren dalam diri manusia. Karakter tampak dalam tingkah laku, dalam kata dan perbuatan yang bersifat tetap. Setiap orang memiliki karakter masing-masing. Dan hanya manusia sajalah yang memiliki karakter, binatang tidak, karena karakter mengandalkan akal budi (*rationalitas*). Karakter secara tak langsung menyatakan satu kesatuan sifat, watak, tabiat, perangai dengan suatu tingkatan ketetapan tertentu dalam tingkah laku dan tindakan. Unsur asli dalam karakter yang dengannya seseorang menjalani hidupnya secara praktis identik dengan apa yang diistilahkan dengan *temperamen*.

Dalam dunia pendidikan, istilah watak atau karakter mempunyai dua aspek yaitu (1) aspek nilai atau norma, dan (2) aspek kepribadian. Nilai dan norma sesuatu yang dapat dan harus dipelajari, tetapi kepribadian (*personality*) adalah sesuatu yang pada dasarnya ada pada seseorang sebagai kodratnya. Sifat sabar atau pemarah adalah sesuatu yang sudah ada dalam diri seseorang sejak dia dilahirkan. Yang dapat dilakukan oleh pendidikan membimbing anak untuk mengendalikan dan memanfaatkan sifat-sifat yang ada padanya. Anak yang tidak sabar perlu belajar bagaimana bersikap sabar tanpa membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma-norma yang terjadi di sekitar dirinya. Dia harus belajar untuk bersikap sabar tanpa melepaskan tanggung jawab sosial moral dan sosialnya. Sebaliknya seorang anak yang pada dasarnya pemarah harus dibimbing untuk mengendalikan sifat marahnya. Jangan sampai dia melampiaskan rasa marahnya tanpa kendali. Tetapi dia tidak dapat dibuat menjadi anak yang sabar. Dan pada saat-saat tertentu dalam hidup ini, dimana kehadiran seorang pemarah, seseorang yang mampu dan berani melepaskan kemarahannya terhadap sesuatu yang seharusnya memang membuat kita semua marah, merupakan suatu anugrah bagi lingkungan sosialnya. Kita sadari bahwa ada karakter yang positif dan karakter yang negatif. Kita menghendaki karakter yang positif. Membangun dan mengembangkan karakter positif bukanlah sesuatu yang dapat kita pelajari dari buku atau mendengarkan ceramah ilmiah. Karakter hadir dalam diri manusia melalui proses transformasi diri secara sadar dan

berkelanjutan dibarengi dengan ketelatenan untuk menghayati dan mempraktekkannya secara tetap dalam keseharian kita. Karakter mengandalkan ketekunan membina diri secara berkelanjutan hingga menjadi bagian integral pribadi kita. Disinilah pembentukan karakter memegang peran penting, tepatnya melalui pendidikan karakter. Pendidikan Bela Negara merupakan salah satu upaya pembentukan karakter bangsa Indonesia. Dengan pendidikan karakter akan memahami dan menghayati tentang *nilai, norma, etika* dan *moral* dalam kehidupan.

### 3.2. Nilai – Norma – Moral – Etika.

Dalam Pendidikan Bela Negara maupun Pembelajaran Widya Mwat Yasa perlu pemahaman tentang *nilai, norma, moral* dan *etika* yang melandasi proses pendidikan tersebut guna memperoleh *outcome* seperti yang diharapkan.

#### a. Nilai.

Pendidikan berkaitan dengan nilai (*value*) sebagai intisarinnya. Nilai bukanlah keinginan melainkan apa yang diinginkan, apa yang tidak hanya diharapkan, tetapi juga dirasakan sebagai pantas, baik, benar, berguna bagi diri kita dan bagii orang lain. Oleh karena itu harus dikejar, diusahakan hingga dimiliki. Dalam arti ini, nilai pada hakikatnya adalah “kebutuhan”. Misalnya sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Dalam konteks kita sekarang, kita mengemukakan *nilai bela negara*. Nilai ini kita butuhkan dan harus kita miliki guna melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan lain-lain. Jadi nilai-nilai merupakan ukuran-ukuran yang mengatasi kemauan kita pada saat dan situasi yang berhubungan. Nilai sesuatu yang kongkrit, artinya sesuatu yang menjadi sasaran praktis usaha kita.

Nilai berhubungan erat dengan *norma* sebagai aturan kelakuan yang ditetapkan untuk menciptakan suatu ketertiban dalam kehidupan bersama yang selaras dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Norma adalah segala macam keteraturan dan segala cara pengarahan kelakuan dalam kelompok berdasarkan keyakinan-keyakinan dan sikap tertentu.

Nilai ditampilkan dalam dan melalui norma. Sebaliknya norma menjadi bermakna, karena mengekspresikan, membela dan memelihara nilai. Itulah sebabnya pendalaman nilai dan norma dilakukan bersamaan. Di belakang norma terbentang nilai yang dijunjung tinggi danyang akan dibela. Misalnya, di balik norma hak dan kewajiban bela negara terdapat nilai kedaulatan negara, keutuhan waiyah dan keselamatan bangsa yang dijunjung tinggi dan yang mau dibela. Membela negara berkaitan dengan norma moral

yang menyangkut hati nurani. Bisa saja seseorang secara lahiriah tampaknya membela negara, tetapi di balik itu, ia mencari keuntungan pribadi.

b. **Norma.**

Secara umum norma terkait dengan nilai, yang berfungsi sebagai tanda dan sarana yang menampakkan nilai, pelindung nilai dan pengantara nilai bagi pertimbangan nilai dan keputusan.

Norma sebagai *tanda dan sarana yang menampakkan nilai*, sebagai contoh dapat dilihat pada rambu-rambu lalu lintas (*traffic light*). Bila lampu merah berarti pengendara harus berhenti, bila menyala kuning berarti pengendara bersiap-siap untuk jalan dan bila menyala warna hijau berarti pengendara harus jalan. Semuanya dimaksudkan untuk menjaga ketertiban lalu lintas di jalan raya. Norma sebagai *pelindung nilai* dapat dilihat dalam segala perintah dan larangannya, yang semuanya bertujuan melindungi kepentingan umum. Misalnya kewajiban membela negara, larangan jangan korupsi, jangan menjual informasi negara dan sebagainya.

Norma adalah fenomena sosial yang kita temui di dalam semua masyarakat atau kelompok dan merupakan kebudayaan, Di dalamnya terdapat aneka anggapan kolektif yang diakui dan diterima umum dan sangat mempengaruhi manusia sebagai anggota kelompok atau anggota masyarakat : kebiasaan-kebiasaan, adat-istiadat, kesusilaan, pendirian ilmiah, keyakinan, ideologi dan lain sebagainya. Ada norma yang diikuti oleh kelompok tertentu saja, ada norma yang diikuti oleh seluruh anggota kelompok. Norma dimaksudkan untuk menjaga tertib social dan dengan begitu memperlancar kehidupan bersama, mengurangi beban sosial, dan menjamin kelangsungan dalam kelompok dan memungkinkan adanya kemajuan. Sebagai aturan kelakuan dalam hidup bersama, penghayatan norma-norma dapat diukur dengan memandang tingkah laku anggota kelompok atau masyarakat. Dalam konteks pendidikan, penghayatan norma-norma dapat diukur dengan memandang moralitas peserta didik, baik-buruknya tingkah laku mereka, bukan pada kecantikan tubuhnya. Jika tingkah laku mereka sesuai dengan norma yang telah disepakati bersama, ia akan mendapatkan pujian, sedangkan jika tidak ia mendapatkan cacian atau sanksi moral.

Ada berbagai bentuk norma, antara lain : hukum, kedudukan, peraturan, kebiasaan, larangan, ritual, tradisi, upacara dan lain sebagainya. Ada norma yang dirumuskan secara positif (perintah), dan ada norma yang dirumuskan negatif (larangan). Ada norma untuk keseluruhan anggota (hukum) dan ada norma untuk sebagian orang atau anggota tertentu

(perintah). Secara umum norma dibagi atas norma khusus dan norma umum. Norma umum dibagi menjadi *norma sopan santun*, *norma hukum* dan *norma moral*.

*Norma sopan santun atau etiket* bersifat lahiriah atau kedaerahan, artinya suatu sikap yang di satu daerah dianggap sebagai sopan santun, di daerah lain mungkin bermakna lain. Namun secara umum norma sopan santun atau norma etiket dilandasi dengan kebiasaan-kebiasaan atau kelaziman yang baik dalam pergaulan atau dalam kehidupan bersama.

*Norma hukum* bersifat positif karena tertulis, diundangkan dan berlaku dalam waktu tertentu di daerah/wilayah tertentu dan orang tertentu serta dibuat oleh lembaga yang berwenang, sehingga disebut hukum positif. Selain itu isinya bersifat perintah karena memuat kewajiban dan larangan dan dapat dikenakan sanksi bagi yang tidak mentaati atau melanggarnya, di samping itu juga memuat atau mengatur hak-hak warga negara dan penduduk. Norma hukum didasarkan pada aturan kelakuan yang disusun dengan sengaja berdasarkan pertimbangan akal budi demi kebaikan bersama ditetapkan dan diumumkan oleh instansi yang berwenang. Itulah sebanya hukum adalah norma pada taraf kesadaran paling tinggi.

*Norma moral* bertumpu pada *perbuatan* baik atau buruk dari manusia pribadi, yang dilakukan dengan bebas atau sadar, tahu dan mau. Karena itu, norma moral selalu menuntut tanggung jawab. Norma moral berfungsi memberitahu, kita mana yang baik mana yang buruk, dikarenakan itu mengikat seseorang secara batiniah (karena menyangkut hati nurani). Jika tidak sesuai dengan hati nurani, akan menimbulkan kegelisahan, ketidaktenangan, atau perasaan berdosa. Misalnya seseorang melakukan korupsi, mencuri kekayaan negara, sekalipun tidak ada yang tahu (kecuali Tuhan), ia akan mengalami kegelisahan dan merasa berdosa. Ini menandakan bahwa norma moral bersifat batiniah.

### c. **Moral.**

Setiap manusia suatu saat akan *tahu dan sadar* akan hal yang baik dan hal yang buruk. Tuhan Maha Pencipta telah menanamkan dalam diri setiap orang *daya* atau *potensi bawaan* untuk mengetahui dan menyadari hal baik dan buruk. Misalnya berbohong, menipu, mencuri, korupsi, berjudi itu buruk dan merupakan suatu pelanggaran yang melebihi pelanggaran sopan santun. Masyarakatpun pada umumnya sudah mengetahui dan mengakui kedua hal tersebut dan terus mengajarkannya kepada generasi-generasi berikutnya.

Ajaran tentang baik dan buruknya perbuatan atau sikap manusia itu disebut *moral*. Sedangkan pengetahuan tentang baik dan buruk itu disebut *kesadaran moral*. Kesadaran moral adalah kesadaran tentang diri kita, dalam mana kita melihat diri kita sendiri berhadapan dengan dengan baik-buruk. Oleh kesadarn ini kita bisa membedakan antar halal dan haram, yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan meskipun dapat dilakukan. Dalam kesadaran moral kita menyaksikan sesuatu yang khas manusiawa. Dunia hewan tidak mengenal soal patut dan tidak patut, cabul atau tidak cabul, adil atau tidak adl, sosial atau tidak sosial. Hukum moral adalah khas hukum manusia. Dengan demikian kesadaran moral adalah dan pendirian manusia terhadapnya merupakan pangkalanyang menentukancorak hidup manusia, jika dipandang dari sudut moral-kesusilaan.

Dalam kaitannya dengan Pendidikan Kesadaran Bela Negara, moralitas warga negara perlu dibina agar setiap warga negara memiliki keprihatinan, empati dan komitmen serta tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, terutama pada saat-saat negara diancam bahaya.

d. **Etika.**

Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik-buruknya tindak-perbuatan manusia sejauh selaras dengan prinsip-prinsip dasar pengertian akal budi. Etika pada dasarnya besifat praktis dan direktif. Etika menata dan mengarahkan kehendak, dan semua kesanggupan manusia. Etika adalah ilmu yang mempelajari cara manusia saling memperlakukan dan apa artinya hidup dengan baik sebagai manusia. Etika dipakai sebagai kajian terhadap sistem nilai yang ada, dalam arti bahwa segala yang dilakukan sesuai dengan moral yang ada atau tidak. Etika juga ilmu yang mempelajari masalah tingkah laku atau perbuatan manusia yang dinilai baik atau buruk. Etika membantu kita mengerti pilihan-pilihan yang kita hadapi dalam hidup sehari-hari. Etika adalah ulasan ilmiah dan filosofis tentang moralitas, tentang baik-buruknya perbuatan manusia. Etika mengajari kita tentang moral, sebab bisa saja moral yang dibangun tidak sesuai dengan prinsip moral dasar. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, barbangsa dan bernegaraterutama dalam negara demokrasi modern, setiap warga negara harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dasar negara modern yaitu kebebasan, keadilan, kesamaan dan solidaritas.

Apa perbedaan etika dan etiket ? Etika berhubungan dengan moral, sedangkan etiket berarti sopan santun atau tata karma. Namun ada persamaan antara etika dan etiket, yaitu :

- 1). Keduanya menyangkut perilaku manusia.
- 2). Keduanya mengatur perilaku manusia, artinya memberikan norma perilaku manusia.

Beberapa contoh etiket pergaulan :

- 1) *Good grooming*, yaitu cara penampilan dalam segi dandanan termasuk kerapian/kebersihan.
- 2) *On time & time to go*, artinya tepat waktu dan kapan harus meninggalkan tempat.
- 3) *Your hands and shakes hand*, yaitu berjabat tangan dan berkenalan.
- 4) *On your feet*, artinya saat kapan harus berdiri memberikan penghormatan.
- 5) *Telephone courtesy*, sopan dalam menggunakan telepon.
- 6) *Walking outdoes*, sopan santun berjalan, misalnya seorang pria berjalan dengan seorang wanita.
- 7) *Apologies*, meminta maaf atas keterlambatan, tidak dapat hadir, bertabrakan saat berjalan dan lain-lain.

#### **4. Tiga Pilar dalam menumbuhkan Jatidiri UPN “Veteran”**

Pengabdian yang tidak kenal lelah para veteran pejuang baik di medan pertempuran maupun upaya mereka mendirikan lembaga pendidikan patut kita teladani. UPN “Veteran” didirikan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia di bidang pendidikan untuk menghasilkan sarjana berkualitas dalam berbagai disiplin ilmu dengan semangat kebangsaan. Tekad ini akan terwujud dengan mengimplementasikan sasi Widya Mwat Yasa sekaligus menumbuhkan jatidiri UPN “Veteran” dengan dilandasi 3 (tiga) pilar : *Disiplin – Kreativitas – Kejuangan*.

##### **a. Disiplin.**

Disiplin adalah pintu gerbang menuju kesuksesan dalam apapun pilihan profesi yang kita inginkan. Orang-orang sukses yang ada di Indonesia maupun di belahan dunia lain, apapun latar belakang pendidikan, jabatan dan profesi mereka, dimana nama-nama mereka terukir dalam goresan pena emas dalam catatan sejarah, hampir semuanya memiliki semangat disiplin yang tinggi dan luar biasa.

*Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada putusan, perintah atau peraturan yang berlaku.* Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) macam disiplin, yaitu *disiplin pribadi atau individu, disiplin kelompok atau sosial dan disiplin nasional*. Kepatuhan seseorang terhadap keputusan atau peraturan yang dibuat dan diberlakukan bagi dirinya sendiri seperti belajar secara teratur, makan teratur, tidur teratur dan lain sebagainya. Apabila seseorang melakukan ini semua secara serba teratur maka hal ini disebut *disiplin pribadi atau perorangan*. Disiplin pribadi melekat langsung pada diri manusia. Sedangkan disiplin nasional merupakan disiplin yang melekat pada segenap warga negara. Selain itu disiplin individu dalam keluarga yang dibina oleh orang tuanya maupun oleh lembaga pendidikan dapat dikembangkan dalam lingkungan masyarakat. Misalnya disiplin kepramukaan.

Sebagai warga negara yang baik kita secara otomatis juga merupakan makhluk sosial, artinya kita berada dalam berbagai bentuk kelompok masyarakat ( keluarga, lingkungan/RT-RW, sekolah, organisasi, bangsa/negara ). Dimana di dalamnya terdapat hak dan kewajiban. Disiplin sosial adalah pernyataan sikap mental masyarakat yang mencerminkan rasa ketaatan bersamayang didukung oleh kesadaran kolektif untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama sebagai satuan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan disiplin nasional adalah pernyataan sikap patuh dan taat sebagai pribadi maupun kelompok dalam menunaikan tugas dan kewajiban yang didorong oleh kesadaran dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan mencapai tujuan nasional.

Ketiga disiplin tersebut saling terkait satu dengan yang lain. Tetapi khusus disiplin nasional dalam kaitannya dengan bidang lain adalah sikap dan perilaku yang bersumber pada kepribadian bangsa dan dikembangkan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini harus tercermin pada perilaku warga negara berupa kepatuhan dan ketaatan terhadap semua norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara.

Disiplin nasional sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional dan sebagai faktor penentu dalam kelancaran pembangunan nasional. Disiplin nasional memiliki peranan yang menentukan dalam menentukan tahapan pembangunan nasional. Dengan demikian disiplin nasional dapat memberikan suasana yang kondusif dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Kendala-kendala dalam menegakkan disiplin nasional antara lain :

- 1) Kelemahan dalam penegakan peraturan dan perundang-undangan.
- 2) Kurangnya tanggung jawab sosial masyarakat.

- 3) Kurang keteladanan para pemimpin dan orang tua.
- 4) Merosotnya kewibawaan para pemimpin dan orang tua.

Adapun upaya pembinaan disiplin nasional dapat dimulai dari lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat serta aparat pemerintahan. Pembinaan disiplin nasional pada dasarnya bertujuan tercapainya kondisi masyarakat yang *berkemampuan untuk patuh dan taat secara sadar terhadap norma-norma yang berlaku, - berkemampuan untuk menghadapi setiap ancaman – berkemampuan mengendalikan diri dalam menggunakan kewenangannya.*

Panglima Besar Soedirman tidak akan pernah dikenang sebagai Panglima Besar, seandainya beliau tidak memiliki etos “disiplin” pribadi maupun disiplin organisasi yang luar biasa dalam menata taktik dan strategi pada masa-masa perjuangan kemerdekaan. Soekarno, Hatta, Haji Agus Salim, Kartini adalah tokoh-tokoh besar Indonesia yang tidak pernah lelah untuk terus “disiplin” dalam belajar dan berkarya hingga cita-cita perjuangan mereka tercapai. Thomas Alfa Edison, Einstein, Newton tokoh-tokoh ilmuwan terkemuka dunia, mereka begitu “disiplin” dalam melakukan percobaan-percobaan meskipun mengalami kegagalan berulang kali, namun tetap berdisiplin sehingga keberhasilan dapat mereka raih. David Beckham, Rudy Hartono, Tiger Wood, Pele adalah atlet-atlet kelas dunia yang menempatkan “disiplin” dalam berlatih dan menjadi jiwa dan semangat mereka.

Keteladanan orang-orang besar tersebut tentu dapat mempertebal keyakinan kita bahwa bila ingin sukses, kita harus disiplin, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat ataupun sebagai warga negara.

#### b. **Kreativitas.**

Kreativitas adalah “*magic word*” bagi orang-orang yang ingin meraih puncak keberhasilan. Orang-orang besar selalu memiliki intelegensia. Kreativitas yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Tapi mungkinkah kreativitas itu dibentuk atau diciptakan dalam diri kita ? Ataukah kreativitas itu milik orang-orang tertentu saja ?

Kreativitas sesungguhnya milik semua orang, milik semua profesi dengan berbagai latar belakang pendidikan dan milik semua lapisan usia. Maka apa makna sesungguhnya dari kreativitas ? Sampai sejauh mana kreativitas dapat mendorong seseorang untuk meraih sukses ?

- Ada tiga pengertian kreativitas :

- 1) Kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi atau unsur yang ada.
  - 2) Sebagai suatu proses berpikir kreatif atau proses berpikir divergen.
  - 3) Suatu kemampuan manusia yang dapat membantu kemampuan yang lain.
- Terdapat dua macam karakteristik kreativitas :
    - 1) *Novelly* (baru) : merupakan modifikasi dari sesuatu yang lama, menciptakan sesuatu yang baru atau meng-erabolasi ide lama menjadi lebih baik.
    - 2) *Useful* (ada gunanya) : ketika ide tersebut mampu memecahkan persoalan-persoalan yang ada dengan cara se-efektif mungkin.
  - Beberapa perspektif kreativitas :
    - 1) Perspektif neurologis, perspektif ini melihat kreativitas sebagai sebuah mekanisme neural dalam otak kita. Perspektif ini menekankan pentingnya faktor nutrisi, stimulasi, dan latihan untuk kemampuan otak.
    - 2) Perspektif kognitif, perspektif ini menekankan pada proses kreatif, proses kognitif adalah proses berpikir divergen yaitu proses berpikir logis yang memungkinkan adanya lebih dari satu pemecahan.
    - 3) Perspektif intelegensia : perspektif ini lebih menekankan pada kemampuan intelektualnya.
  - Dalam pengembangan kreativitas ada lima hal yang harus diingat yaitu ;
    - 1) Latihan pengembangan kreativitas.
    - 2) Pemberian stimulant yang cukup terutama pada anak-anak.
    - 3) Pemberian nutrisi yang memadai untuk kesehatan jawa raga (empat sehat lima sempurna )
    - 4) Adanya suasana positif dalam pengembangan kreativitas, dalam hal ini membutuhkan suasana supportif.
    - 5) Menciptakan motivasi yang tepat..
  - Inti kreativitas :
    - 1) Puncak kehidupan seseorang adalah pada saat dia melakukan upaya puncak kreatif.
    - 2) Kehidupan kreatif menghasilkan kenikmatan dan memperkaya baik diri sendiri maupun orang lain.

3) Perlu selalu dibangkitkan dan dinyalakan daya kreativitasnya.

▪ Ciri-ciri creator :

- 1) Selalu punya rasa ingin tahu.
- 2) Ingin mencoba-coba.
- 3) Suka bertualang.
- 4) Berpikir intuitif

Dengan semangat kreatif kita akan selalu menang dalam menghadapi setiap tantangan jaman. Kita tidak akan pernah kehabisan gagasan dan ide untuk terus berkembang maju. Mereka yang kreatif selalu berpikir dan bertindak 2,3,5 bahkan 10,20 langkah kedepan dimana orang lain belum sempat berpikir.

c. **Kejuangan**

Indonesia mungkin tidak akan pernah selamanya menghirup “nafas kemerdekaan”. Kalaulah para pahlawan kita tidak mempunyai sifat mulia, nilai-nilai kejuangan yang luar biasa tingginya. Tapi benarkah kejuangan hanya bisa dimiliki oleh para pejuang kemerdekaan saja ? Tidak bisakah kita sebagai generasi penerus menyerap, mewarisi dan menerapkan nilai-nilai kejuangan tersebut dalam alam kehidupan modern sekarang untuk meraih puncak prestasi dan kesuksesan yang kita inginkan ? Wawasan kejuangan harus menjadi perhatian kita, karena adanya beberapa hal, diantaranya :

- 1) Kita bisa menikmati keadaan dan yang ada sekarang karena ada jiwa kejuangan dari para pendahulu kiat, para pejuang dan para veteran.
- 2) Orang-orang besar (Bung Karno, Mohammad Hatta, Soedirman dan lain sebagainya) dapat berhasil karena jiwa kejuangan yang tinggi.

*Kejuangan* merupakan ketahanmalangan dalam menghadapi realita hidup. (Conny 2002). Semakin tinggi ketahanmalangan seseorang semakin berpeluang untuk mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Penderitaan bukan sebagai alasan untuk sebuah kegagalan. Untuk bisa mengahdapi/mengatasi penderitaan maka ketahanmalangan/kejuangan harus tinggi.

Kejuangan berbeda dengan perjuangan. Menurut A. Osman Rahman (1995) *perjuangan* adalah memperebutkan sesuatu dengan mengadu tenaga, berperang, berkelahi. Kamus Bahasa Indonesia W.J.S Poerwodarminto menerangkan *perjuangan*

adalah dua atau lebih kekuasaan dan kekuatan yang saling berbenturan atau berlawanan dalam upaya memperebutkan sesuatu.

Semangat dan nilai-nilai kejuangan dari bangsa Indonesia adalah seperti tercermin atau terkandung dalam nilai-nilai 45 yang dapat dirinci menjadi nilai dasar dan nilai operasional.

## 5. Integritas

### 5.1. Pengertian Integritas.

Apa yang dimaksud dengan *Integritas* ? Sebagian orang menyamakan antara arti *integritas* dengan *integrasi*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *integrasi* berarti : “pembauran atau penggabungan sehingga menjadi kesatuan yang utuh” . Sedangkan “integritas” diartikan sebagai : (1) *keterpaduan, kebulatan, keutuhan* - (2) *jujur dan dapat dipercaya* → “integritas nasional” = *wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa di kehidupan bernegara*. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) “integritas” diartikan sebagai : *mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran*. → “integritas nasional” = *wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa di kehidupan bernegara*.

Dalam bahasa Inggris, The Advanced Learner’s Dictionary of Current English – Oxford University Press, mengartikan “integrity” = *the state of being honest, upright and sincere; the state of being whole or in perfect condition; soundness*. { *keadaan tentang kejujuran, keteguhan, ketulusan; keadaan yang menunjukkan keseluruhan atau dalam keadaan sempurna* } Sedangkan dalam Webster’s New World College Dictionary, “integrity” = (1). *the quality or state of being complete; unbroken condition; wholeness; entirety*. (2). *The quality or state of being unimpaired; perfect condition; soundness*. (3) *the quality or state of being of sound moral principle; uprightness; honesty and sincerity*. { (1). *kualitas atau keadaan yang lengkap; kondisi tidak terputus; keutuhan; keseluruhan* (2). *kualitas atau keadaan yang tidak terhalang; kondisi sempurna*. (3) *kualitas atau keadaan sebagai prinsip moral yang baik; kejujuran dan ketulusan* }

Mario Teguh (seorang motivator) menyatakan dengan kalimat sederhana bahwa *integritas* adalah : “*kesetiaan kepada yang benar*”. Andrian Gotick & Dana Telford dalam bukunya “*The Integrity Advantage*” antara lain menyatakan : “*Integritas adalah konsistensi antara tindakan dan nilai. Kesesuaian antara kata-kata dan perbuatan merupakan hal yang esensial*”. Masih banyak lagi pengertian dan pendapat tentang arti, makna maupun

definisi “integritas”, namun pada esensinya sama. Jadi integritas adalah : *Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga mempunyai potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran serta satunya kata dengan perbuatan*”. Dan bila dikaitkan dengan berkehidupan berbangsa dan bernegara maka muncul “*integritas nasional*” yang bermakna : “*wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dikehidupan berbangsa dan bernegara*”

## 5.2. Integritas Bangsa Indonesia

Dihadapkan pada hak dan kewajiban bela negara, setiap warga negara Indonesia yang memiliki integritas tentu dengan penuh kesadaran akan melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Permasalahannya adalah : “*Apakah setiap warga negara Indonesia sudah memiliki integritas ? Seberapa besar kadar integritasnya ?*” Dalam penunjukan pejabat pemerintahan atau suatu lembaga/instansi ada Pakta Integritas yang harus ditandatangani oleh para pejabat yang baru dan akan bekerja . Pakta Integritas yang banyak dilakukan di lembaga/instansi pemerintah ataupun swasta, pada dasarnya semacam surat perjanjian. Menurut Transparency International Indonesia (2003), Pakta Integritas adalah satu alat (*tools*). Tujuannya adalah menyediakan sarana bagi pemerintah atau lembaga/instansi dan masyarakat umum untuk mencegah korupsi – kolusi – nepotisme , penyelewengan dari tugas dan tanggung jawab. Apakah kepada setiap warga negara juga ditetapkan adanya Pakta Integritas untuk mengawasi sebagai warga negara yang baik (sesuai dengan makna integritas) ? Jawabannya tidak Karena integritas merupakan ungkapan dari sifat dan perilaku yang *jujur – setia – bertanggung jawab – menepati ucapannya sendiri*. Orang yang memiliki integritas dia harus jujur kepada dirinya sendiri dan barulah jujur kepada orang lain. Dia tentu setia kepada sasaran atau tujuan hidupnya. Dia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan bila terjadi kesalahan/kegagalan tidak melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Dia akan selalu menepati janjinya karena untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain, menepati janji sangat dibutuhkan. Jadi integritas muncul, tumbuh dan berkembang dari diri sendiri. Sehingga integritas setiap warga negara tidak memerlukan adanya Pakta Integritas sebagaimana yang terjadi di lembaga pemerintahan dan/atau swasta.

Bagaimana integritas sebagai pribadi dikaitkan dengan hak dan kewajiban bela negara ? Karena sudah memiliki integritas pribadi seperti yang diuraikan diatas, maka untuk menumbuhkan kembangkan kesadaran bela negara perlu dan harus mendapatkan

pemahaman tentang bela negara dengan melalui pendidikan bela negara baik formal maupun non-formal.

## 6. Latihan Soal

1. Dalam mencapai dan meraih "*Tujuan Nasional*" yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia senantiasa dihadapkan pada AGHT (Ancaman – Gangguan – Hambatan – Tantangan). Setiap Warga Negara memiliki keharusan *eksistensial* dan *konstitusional* untuk menghadapi AGHT tersebut dalam bentuk pembelaan Negara.

a. Apa yang saudara ketahui tentang "*Nilai-Nilai Bela Negara*" → Berikan penjelasan singkat dari masing-masing nilai tersebut !

b. Bagaimana nilai luhur Widya Mwat Yasa akan bisa menghadapi arus globalisasi dengan pengaruh positif dan negatif telah melanda di semua tata kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Dikaitkan dengan Bela Negara, bagaimana upaya kita menghadapinya ?

2. Kemandirian, kejujuran, integritas dan pantang menyerah, rela berkorban adalah ciri perjuangan para "Veteran" dalam mewujudkan kemerdekaan. Mahasiswa sebagai penerus cita-cita para pejuang tersebut, mewarisi nilai-nilai luhur jati diri yang mengalir dan membentuk jati diri saudara dan seluruh bangsa Indonesia. Jati diri luhur seperti apa yang menurut saudara terus harus dikembangkan? Bagaimana usaha yang saudara lakukan untuk memiliki jati diri luhur tersebut?

# **BAB 5**

## **KEBIJAKAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA**

### **I. Capaian Pembelajaran (Kompetensi Dasar)**

Mahasiswa Mampu memahami, mampu menjelaskan, terjadi perubahan pola berpikir tentang hak dan kewajiban bela negara khususnya tentang landasan kebijakan pembinaan kesadaran bela negara, pemberdayaan SDM dan SDA sebagai bagian dari kebijakan.

### **II. Gambaran Umum**

Menjelaskan landasan kebijakan pembinaan kesadaran bela negara, pemberdayaan SDM dan SDA sebagai bagian dari kebijakan, dan pengabdian sesuai profesi sebagai bagian dari tindakan bela negara.

### **III. Relevansi terhadap pengetahuan**

1. Mampu Menjelaskan Landasan Kebijakan
2. Mampu menjelaskan Pemberdayaan SDM dan SDA melalui latihan dasar Bela Negara dan Pengabdian sesuai profesi
3. Latihan Soal

### **IV. Sub-sub Bab**

#### **1. Landasan Kebijakan**

Betapa besar dan tak ternilai, nikmat karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia, baik nikmat kemerdekaan maupun sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang sangat beragam dengan berbagai potensi dan kearifan lokal. Segala karunia tersebut merupakan nikmat sekaligus amanat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia adalah mahluk yang paling sempurna diantara berbagai ciptaanNya. Nampak betapa pentingnya peranan manusia dengan kemampuan dan kecerdasan berpikir dan keterampilannya berbuat untuk kesejahteraan manusia, baik untuk kesejahteraan di dunia maupun akhirat. Nampak bahwa aset paling berharga adalah sumberdaya manusia, yang akan menggerakkan dan menjadikan segala sesuatu menjadi bermakna.

Banyak pihak memperbincangkan bahwa krisis multidimensi atau karut-marut bangsa ini disebabkan gagalnya pendidikan karakter. Krisis tersebut tentu tidak terjadi sekonyong-konyong, melainkan telah berproses dalam waktu yang sangat panjang. Entah kapan proses tersebut dimulai dan akan berakhir. Hampir semua orang tahu bahwa hal tersebut disebabkan karena “sistem”, yang tidak jelas ujung pangkalnya. Meskipun tidak perlu menuding pihak ketiga ataupun faktor luar yang merusak, akan sangat bijaksana jika lebih mengedepankan mawasdiri oleh setiap individu warga negara maupun oleh setiap penyelenggara negara.

Rendahnya kecerdasan dan ketahanan mental dan moral, ekonomi dan sosial-budaya, menyebabkan anasir-anasir negatif dengan sangat mudah merasuk ke alam pikiran setiap individu dan masyarakat. Lemahnya karakter masyarakat ditandai melemahnya kecerdasan dalam menelaah peristiwa, menyebabkan lunturnya nilai-nilai luhur, bahkan pudarnya kesadaran hukum. Setan yang tersembunyi di balik modernisasi dan globalisasi sudah lama diwaspadai, namun paradigma pendidikan tetap dan belum berubah secara signifikan.

Pendidikan sering dikelompokkan menjadi pendidikan formal (jenjang TK, SD/Ibtidaiyah, SMP/Tsanawiyah, SMA/Aliyah, dan Perguruan Tinggi/Ma’had ‘Aly; pendidikan non formal (kursus keterampilan bidang tertentu) dan pendidikan informal (pergaulan sejak di rumahtangga, kepemimpinan dan ketauladanan orang tua, ketokohan dan lingkungan masyarakat, negara atau pemerintahan), secara simultan diharapkan menjadi pembentuk manusia unggul karena memiliki kecerdasan dalam intelektualitas, mentalitas, moralitas dengan fisik yang kuat dan sehat. Keunggulan tidak hanya dibutuhkan oleh dunia kerja, dalam mencari dan membangun lapangan kerja, dan lebih jauh daripada itu yakni memiliki kecerdasan dalam mengatasi berbagai persoalan hidup dan kehidupan. Inilah sebenarnya yang membedakan visi pembelajar, bukan sekedar untuk memudahkan memperoleh pekerjaan ataupun membuka lapangan kerja, meraih pangkat dan jabatan tertentu; orientasinya jauh dari sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, materi, gengsi atau prestise, atau untuk sekedar memperoleh kebutuhan sebagai syarat hidup, namun yang lebih utama dan mendasar adalah kecerdasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup, baik di dunia maupun akhirat, menuju sukses hakiki yakni ridlo Tuhan YME.

## **2. Pemberdayaan SDM dan SDA melalui latihan dasar Bela Negara dan Pengabdian sesuai profesi**

Sejak era Presiden Soekarno, sebenarnya "*nation and character building*" telah dicanangkan meskipun pelaksanaannya masih mengalami banyak persoalan, baik persoalan ketauladanan dalam keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik faktor yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Rendahnya kecerdasan dan ketahanan mental dan moral, ekonomi dan sosial-budaya, menyebabkan anasir-anasir negatif dengan sangat mudah merasuk ke alam pikiran setiap individu dan masyarakat. Ledakan teknologi informasi dan komunikasi disamping manfaatnya sekaligus persoalan yang timbul juga tidak kecil. Hal ini sangat terkait dengan kedewasaan masyarakat yang sangat beragam. Fakta inilah yang sebenarnya perlu diungkap untuk memberikan pemahaman pada makna hakiki dari "pendidikan". Jadi ada 2 (dua) kategori visi pembelajar, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, bahwa pembelajar hanya untuk meraih tujuan jangka pendek, sekedar untuk memperoleh pekerjaan ataupun membuka lapangan kerja, untuk mencapai pangkat dan jabatan tertentu, atau untuk memperoleh syarat hidup berupa materi dan kepuasan nafsu belaka; dan yang ke dua, yang bertujuan meraih ridlo Tuhan, atau kebahagiaan akhirat karena belajar adalah kewajiban syariat agama. Inilah tujuan jangka panjang yang sekaligus akan meraih kesejahteraan dunia dan akhirat, dan nantinya diharapkan mempunyai pemikiran dan karakter yang visioner.

Secara berjenjang dan simultan bahwa pendidikan yang utama sebenarnya dari lingkungan rumahtangga, sebagai peletak batu petama pendidikan anak. Selanjutnya selaras dengan umur maka seorang pembelajar menempuh pendidikan dasar, menengah dan lanjutan atas, bahkan pendidikan tinggi (Strata 0, Strata-1, 2 dan 3). Di rumahtangga, orangtua yang profesional, intensif dan penuh perhatian kepada tumbuh-kembang anak sangatlah didambakan. Profesionalisme orangtua ternyata sangat beragam sesuai tingkat pendidikan dan pengalamannya. Intensitas orangtua dalam mendidik anak-anaknya saat ini semakin memperoleh gangguan yang hebat, baik karena tekanan ekonomi, tuntutan tugas seorang profesional dalam pekerjaan dan bisnis, dan bahkan tekanan akibat orientasi yang serba materi yang akan melupakan manfaat yang non materi (*intangible-benefit*). Pendidikan nonformal di masyarakat (lokal, nasional, dan global) juga mengalami persoalan yang mendasar terutama semakin berkembangnya egoisme, acuh terhadap sekitar, lemahnya kepedulian dan sekaligus lemahnya tanggung jawab sosial-kemasyarakatan, miskin ketauladanan karena perubahan *mind-set* dalam perilaku dan pola hidup yang sudah terpolusi (*pollution of mind*). Sementara itu, pendidikan informal memang mengkhususkan pada materi praktis yang spesifik, yang seharusnya juga tetap

mengedepankan nilai, ataupun norma kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan formal, sejak pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, menampakkan semakin berkurangnya materi *soft-skill* terutama yang berkaitan dengan kearifan lokal bahkan nasional. Nilai-nilai budaya luhur bangsa dan bahkan nilai-nilai agama seolah-olah dilupakan pada saat berpikir tentang orientasi hidup. Orientasi jangka pendek, seolah menganggap tidak ada kehidupan akhirat, menyebabkan lupa akan dosa. Bisa juga karena terlalu kuatnya pergeseran nilai-nilai yang selama ini terjadi, kemudian penyimpangan dianggap telah menjadi kebiasaan, pola hidup dan bahkan dianggap “adat”. Akibatnya terbangunlah “sistem” yang membudaya meskipun hal tersebut telah sesat dari nilai-nilai luhur bangsa maupun agama. Sesuai dengan jenjang pendidikan, telah terjadi asumsi yang salah bahwa semakin dewasa seseorang, atau semakin tinggi jenjang pendidikan maka kurikulum pendidikan tentang *soft-skill* terutama mentalitas dan moralitas semakin menurun.

Inilah berbagai persoalan mendasar dunia pendidikan formal, nonformal, bahkan informal, yang secara simultan membentuk karakter. Dalam implementasi dari suatu perencanaan tidak bisa dipungkiri bahwa hasil yang akan diperoleh selalu berpasangan, antara yang sesuai dan tidak sesuai perencanaan, yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki, perubahan yang mendasar dan tidak mendasar, hasil yang sifatnya *tangible* dan *intangible*, hasil yang sifatnya sementara atau tujuan antara dan tetap atau hakiki. Disinilah batu ujian seorang penentu kebijakan dan pelaksana kebijakan (*macro-policy and micro-policy*) sejak dari pemerintah pusat, daerah bahkan hingga rumahtangga. Kecerdasannya akan teruji dalam kondisi yang semakin kompleks (*complicated*). Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan semangat yang mempunyai kompetensi untuk terus menerus membangun kapasitas, menciptakan keadilan, menciptakan kondisi yang stabil, proses yang lebih efektif dan efisien, untuk memberikan rangsangan lebih produktif, memperluas kesempatan kerja, pendayagunaan sumberdaya dan investasi, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan seterusnya yang akan meningkatkan persatuan, kesatuan, dan ketahanan nasional.

Sebagai batu ujian bagi suatu negara, Ketahanan Nasional sebagai suatu kondisi dinamik suatu bangsa dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, langsung maupun tidak langsung, dari dalam maupun dari luar, yang membahayakan integritas dan kelangsungan atau eksistensi negara; memerlukan ketahanan dan ketangguhan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan bahkan pertahanan negara. Pembangunan yang lebih harmonis, membutuhkan kearifan dari

semua pihak. Keteguhan hati, istiqomah dalam memegang aturan, norma hukum pemerintahan, sejak adat-istiadat hingga nilai-nilai luhur bangsa, bahkan nilai-nilai agama, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi penentu kecerdasan individu, masyarakat maupun bangsa. Istiqomah, menunjukkan suatu disiplin pribadi yang terus menerus, dalam spirit kreativitas, untuk memperoleh kejelasan, mempertajam wawasan (visi), memfokuskan energi dan mengembangkan kesabaran pribadi untuk *melihat realita secara obyektif*. Perlu direnungkan, sebuah kata bijak, bahwa tidak akan ada dosa besar jika tidak toleran pada dosa kecil; dan sebenarnya tidak ada negara yang terbelakang, kecuali negara yang *under-manage*. Penyimpangan sekecil apapun, membutuhkan kepekaan dan kecerdasan dalam menyikapi, dan bersifat “segera”.

### 3. Latihan Soal

Dalam mencapai dan meraih “Tujuan Nasional” yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia senantiasa dihadapkan pada AGHT (Ancaman-Gangguan-Hambatan-Tantangan), SETIAP Warga Negara memiliki keharusan ***eksistensi*** dan ***konstitusional*** untuk menghadapi AGHT tersebut dalam bentuk Pembelaan Negara.

- a. Dimana pembelaan negara tersebut diamanatkan dan bagaimana penerapannya ?
- b. Bela Negara tidaklah sesuatu yang ***“taken for granted”*** melainkan diperlukan upaya penyadaran dan terencana dalam menanamkan ***“nilai-nilai Bela Negara”*** → Berikan beberapa contoh (minimal tiga contoh) upaya menanamkan kesadaran Bela Negara.
- c. Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 08 Tahun 2010, tentang UPN “Veteran” yang pada intinya : UPN “Veteran” memberdayakan Sumber Daya Nasional untuk kepentingan Pertahanan Negara dan Pembangunan Nasional melalui proses pendidikan guna mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertahanan (pasal 2), serta mewujudkan nilai-nilai dasar UPN “Veteran” antara lain ***“Kesadaran Bela Negara”*** (pasal 3) → Bagaimana pendapat Saudara, apakah Mata Kuliah Pendidikan Bela Negara relevan dengan tersebut diatas ? Berikan penjelasan pendapat Saudara.

# **BAB 6**

## **BELA NEGARA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL**

### **I. Capaian Pembelajaran (Kompetensi Dasar)**

Mahasiswa Mampu memahami, mampu menjelaskan, terjadi perubahan pola berpikir tentang hak dan kewajiban bela negara khususnya tentang pelaksanaan bela negara dalam pembangunan nasional, bela negara sebagai modal dasar pembangunan nasional, pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta kepemimpinan yang berwawasan global.

### **II. Gambaran Umum**

Menjelaskan pelaksanaan bela negara dalam pembangunan nasional, bela negara sebagai modal dasar pembangunan nasional, pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta kepemimpinan yang berwawasan global . juga dibahas tentang kewirausahaan yang menunjang kesadaran bela negara .

### **III. Relevansi terhadap pengetahuan**

1. Mampu Menjelaskan Bela Negara sebagai modal dasar Pembangunan
2. Mampu menjelaskan Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa
3. Mampu menjelaskan Kepemimpinan yang berwawasan Bela Negara
4. Mampu menjelaskan Kewirausahaan yang menunjang kesadaran bela negara
5. Mampu menjelaskan pengembangan pembinaan dan pembudayaan kesadaran bernegara
6. Latihan Soal

### **IV. Sub-sub Bab**

#### **1. Bela Negara sebagai Modal Dasar Pembangunan Nasional**

Pada hakekatnya, pembangunan nasional merupakan wujud perjuangan secara terus menerus dari setiap warga negaranya berdasarkan profesinya dengan prestasi terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya. Kesejahteraan lahir-batin, jasmani-rohani, materiil-spirituil menjadi kebutuhan hidup dan kehidupan setiap anggota masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Di

sisi lain, setiap individu, setiap kelompok masyarakat, bahkan setiap negara di dunia mempunyai kepentingan yang memungkinkan terjadinya perebutan atau persaingan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan, dan bahkan memungkinkan terjadinya pelanggaran norma, yang selanjutnya bisa menimbulkan pertikaian dan bahkan peperangan. Disinilah pentingnya membangun visi setiap warga negara dan visi bersama dalam membangun masa depan bangsanya.

Bagi bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa lain di dunia, dalam rangka pembangunan nasionalnya, setidaknya ada beberapa isu penting yang menjadi bahan pertimbangan yaitu isu tentang hak azasi manusia (HAM), supremasi hukum, lingkungan hidup, demokratisasi, dan globalisasi ekonomi. Ini menunjukkan bahwa isu-isu tersebut merupakan persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara-negara saat ini. Bagi bangsa Indonesia, diberlakukannya UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih mengutamakan azas desentralisasi kekuasaan dan kewenangan kepada daerah, juga merupakan isu yang diharapkan dapat mendorong percepatan bagi proses pembangunan nasional melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Globalisasi merupakan suatu pemikiran, ide, sistem, pandangan hidup yang menjadi universal, menjagad atau mengglobal. Berlangsung sejak akhir dekade abad 20, semakin menuntut ketahanan dan daya saing yang tinggi utamanya dalam kehidupan perekonomian bangsa-bangsa. Globalisasi merupakan tuntutan sosialisasi dalam kehidupan manusia, yang kemudian sangat besar pengaruhnya dalam memberikan corak dan arah pembangunan setiap negara. Globalisasi dapat digambarkan sebagai proses integrasi antar negara, yang nampak dari proses saling ketergantungan politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya yang berkembang diantara negara-negara di dunia. Kecenderungan globalisasi saat ini ditandai dengan semakin cepatnya perubahan lingkungan eksternal maupun internal dan semakin ketatnya persaingan. Dinamika ini menjadi fenomena baru dalam pembangunan suatu bangsa dalam rangka mencapai kemakmurannya.

Dalam proses globalisasi terdapat beberapa ciri antara lain semakin berkembangnya teknologi informasi, perdagangan, transnasionalisasi keuangan dan investasi, serta reformasi politik; yang menjadikan persaingan semakin ketat dalam perdagangan internasional. Setiap negara mempunyai kepentingan ekonomi, politik, sosial, budaya dan kelestarian lingkungan. Atas dasar berbagai kepentingan tersebut,

maka berbagai kebijakan dalam pembangunan diterapkan untuk kesejahteraan rakyat, bangsa dan negaranya.

Beberapa indikator dalam proses globalisasi antara lain semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi, perdagangan, transnasionalisasi keuangan dan investasi, serta reformasi politik. Fenomena ini dapat diamati terutama dalam globalisasi produksi dan globalisasi keuangan. Globalisasi ekonomi atau perdagangan bebas lebih berdampak luas secara internasional, melintas batas negara. Globalisasi produksi dipercepat karena adanya program-program penyesuaian struktural dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang digerakkan oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Di negara maju, permintaan dalam negerinya yang stagnan dan naiknya biaya produksi, untuk memperluas pasar dan menekan biaya produksi maka perusahaan-perusahaan ini lalu mengalihkan basis produksinya ke negara-negara sedang berkembang. Globalisasi produksi semakin dipercepat oleh kemajuan teknologi, penghematan biaya transportasi dan komunikasi. Sedangkan proses globalisasi keuangan secara nyata memiliki kekuatan yang lebih besar daripada globalisasi produksi.

Para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith yakin bahwa perdagangan internasional secara bebas akan memaksimalkan kesejahteraan dunia, sebab perdagangan bebas mengarahkan pada penggunaan sumberdaya yang lebih efisien sehingga akan memaksimalkan produksi dunia. Meskipun perdagangan bebas tersebut diperlukan, namun hal tersebut bukanlah merupakan kondisi yang cukup untuk memaksimalkan kesejahteraan dunia karena masih akan sangat tergantung pada distribusi pendapatan antar individu, antar kelompok, maupun antar negara. Dengan berbagai keunggulannya, negara maju akan lebih banyak menikmati dan mengendalikan kemajuan dunia. Dalam era global, tenaga kerja dan modal dapat bergerak bebas. Lahan atau tanahpun dapat bergerak bebas apabila yang dimaksudkan adalah penguasaannya. Melalui *foreign direct investment* (FDI) negara maju dapat mengalihkan basis produksi ke negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu diperlukan analisis internasional yang spesifik mengenai berbagai pertimbangan untuk menyusun kebijakan publik yang mampu mengantisipasi terjadinya perubahan lingkungan internal maupun eksternal.

Globalisasi dan Ketahanan Nasional. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara

menjadi biasa. Globalisasi memang memiliki sifat mengancam yang menakutkan. Dua kali perang dunia pada abad lalu dipicu oleh persaingan global untuk memperebutkan sumber daya ekonomi. Contoh paling mutakhir: pendudukan Amerika Serikat atas Irak yang telah berlangsung 4 tahun juga menunjukkan hal yang sama meskipun dibungkus dengan berbagai argumen. Pengaruh asing dapat dianalogikan sebagai virus yang menakutkan, namun selama ketahanan nasional sebagai sistem kekebalan tubuh cukup kuat, virus tersebut seharusnya tidak menjadi kekuatan yang mengancam. Polemik dan retorika tidak membantu menciptakan daya saing yang diperlukan untuk terwujudnya Kebangkitan Nasional.

Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan dalam menegjartujuan nasional Indonesia (Suradinata,2005:47)

Dalam perkembangan dan pertumbuhan negara-negara, sebenarnya tidak ada negara yang terbelakang, melainkan negara yang salah urus atau pengelolaan yang kurang baik (mismanagement, undermanage). Terdapat beberapa bukti sebagai akibat dari kekeliruan dalam kebijakan publik atau manajemen pemerintahan dan pembangunan. Sebagai contoh, terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, penyebab utamanya berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain berkaitan dengan masalah-masalah dalam negeri seperti kondisi sosial-politik dan keamanan yang tidak stabil, ekonomi biaya tinggi karena inefisiensi dalam proses produksi, praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dan sistim perekonomian yang tidak mengakar ke bawah. Faktor eksternal berkaitan dengan lembaga internasional, seperti pinjaman yang disalurkan utamanya hutang jangka pendek yang ternyata menjadi perangkap, memberatkan negara debitur karena membengkaknya hutang dan bunga hutang sebagai akibat dari terjadinya gejolak mata uang asing khususnya US\$.

Dalam sejarah politik dan pemerintahan di Indonesia, tumbangnya pemerintahan Orde Lama pada tahun 1966 disebabkan karena banyaknya tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang menyimpang dari kemurnian Pancasila dan UUD 1945, diantaranya diterapkannya *nasakom*. Tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 disebabkan karena maraknya penyimpangan dalam penyelenggaraan pembangunan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penyimpangan tersebut menjadi pendorong

terjadinya krisis ekonomi yang hingga saat ini belum terselesaikan bahkan cenderung berkembang menjadi krisis multidimesi yang semakin kompleks. Ini menunjukkan belum mantapnya ketahanan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa kita.

Hakekat pembangunan adalah membangun manusia seutuhnya, baik fisik maupun non fisik, jasmani maupun rohani, materiil maupun spirituil, maka pembangunan non fisik, rohani atau spirituil menunjukkan laju yang amat tertinggal bahkan cenderung degradasi. Terjadinya dekadensi moral dan penyakit-penyakit sosial di masyarakat dapat disebabkan karena persoalan ekonomi, ketidak pastian hukum, tidak adanya keteladanan atau rendahnya kendali informasi bagi konsumsi masyarakat yang sedang berkembang, transisi, atau sedang dalam proses modernisasi. Peradaban mengglobal, akal belum rasional, maka nilai-nilai luhur menjadi luntur. Jika mau belajar dari pengalaman, bahwa tekanan ekonomi yang berlarut, lemahnya penegakan hukum dan disiplin, rapuhnya kejujuran dan nilai-nilai moral, merupakan persoalan mendasar yang akan menjadi penyebab terjadinya keruntuhan.

Untuk menghadapi pengaruh global, masih terjadi kontroversi antara pemikiran ekonomi pasar murni (liberalisasi perdagangan) dan intervensi pemerintah (proteksionisme). Pada umumnya intervensi pemerintah atau kebijakan publik dimaksudkan untuk membangun kapasitas, menciptakan keadilan, menciptakan kondisi yang stabil, atau proses yang lebih efektif dan efisien. Termasuk didalamnya antara lain alasan untuk memberikan rangsangan khusus bagi produksi suatu barang tertentu yang masih diimpor (*import substitution*), memperluas kesempatan kerja, pendayagunaan sumberdaya dan investasi; maupun alasan non ekonomi seperti ketahanan nasional dan distribusi pendapatan atau pemerataan.

Jika diamati, kebijakan publik dalam membangun perekonomian misalnya, berbagai bentuk kebijakan sebagai intervensi pemerintah ternyata gagal untuk memberikan kesejahteraan bagi pelaku usaha maupun masyarakatnya, misalnya kesejahteraan petani, peternak, nelayan, petambak maupun usaha kecil, menengah dan koperasi yang cenderung tidak tumbuh dan bergeser dikuasai oleh "petani berdasi" atau pemodal. Tidak efektifnya berbagai kebijakan tersebut dapat disebabkan (a) berbagai distorsi yang terjadi, dan (b) terlalu kuatnya intervensi pemerintah dalam *market access* yang mengakibatkan disinsentif pada efisiensi, inovasi, teknologi maupun stabilisasi harga. Dalam kasus industri gula, untuk masa 2000–2010, kebijakan tidak menerapkan liberalisasi perdagangan (proteksionisme) ataupun diterapkannya liberalisasi perdagangan (tanpa proteksi), ternyata tidak menunjukkan dampak positif maupun negatif yang

signifikan bagi peningkatan keragaan industri gula Indonesia (Abidin, 2000). Hal ini menimbulkan pemikiran yang disebut “kebijakan tanpa kebijakan”, artinya *no action* dalam menghadapi dampak liberalisasi perdagangan, membiarkan begitu saja dampak itu terjadi secara alami, membiarkan pengaruh global itu terjadi menimpa, dan seterusnya.

Hal ini mencerminkan kuatnya dampak globalisasi, yang akan menerjang semua halangan dan rintangan. Maka persoalannya adalah kembali kepada menjawab pertanyaan mengapa berbagai kebijakan publik itu tidak efektif dalam mencapai sasarannya (*target output, target group*). Kebijakan publik yang bagaimana yang mampu melawan kekuatan globalisasi tersebut? Jawaban mendasar untuk itu adalah kebijakan publik yang mampu “*kemandirian*” yang mengandung makna lebih dari sekedar *swa sambada*, kemandirian yang mengakar ke bawah tetapi tetap berorientasi ke luar, jadi bukan *autarki* atau menutup hubungan dengan dunia luar.

Sebagai penutup, sejak awal abad 21, terjadi pergeseran paradigma pembangunan dengan persaingan yang semakin ketat. Bagi negara yang sedang berkembang, globalisasi lebih merupakan ancaman daripada peluang, karena ternyata lebih menguntungkan kepentingan negara maju, bahkan memungkinkan untuk menguasai sumberdaya di negara lain. Dalam bidang ekonomi misalnya, melalui produk-produk impor menyebabkan beberapa komoditi dan produksi di negara sedang berkembang harus keluar (*exit*) dari pasar karena tidak memiliki daya saing.

Berbagai kepentingan setiap negara, sering “rasional secara ekonomi”, namun “tidak rasional” ditinjau dari aspek sosial-budaya, distribusi pendapatan, dan Ketahanan Nasional; atau sebaliknya. Ini menunjukkan adanya trade-off antara kepentingan ekonomi dan non ekonomi, atau antara kepentingan *tangible* dan *intangible*. Globalisasi ekonomi cenderung mengutamakan efektifitas dan efisiensi (*material, tangible*) dan cenderung mengorbankan kelestarian lingkungan hidup, keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, kehidupan berdemokrasi, dan sebagainya (*immaterial, intangible*). Untuk mengatasi keterpurukan yang terjadi, dengan *knowledge* saja tidak akan cukup untuk survivalnya suatu kehidupan; bahkan memerlukan nilai-nilai moral yang lebih tangguh sebagai pengendali.

Ketangguhan moral akan membangun kemandirian, dan kemandirian akan membangun masyarakat, bangsa dan negara yang lebih hakiki. Modernisasi harus lebih diartikan sebagai *continuous improvement* dalam segala aspek kehidupan secara berimbang dengan tetap mengedepankan berbagai kearifan lokal untuk skala global.

## 2. Pemerintahan yang Baik, Bersih Dan Berwibawa

Krisis nasional yang sedang dihadapi bangsa Indonesia tidak lepas dari kegagalan mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang tidak taat azas, tidak taat pada prinsip-prinsip *good governance*. Reformasi di segala bidang sangat diperlukan untuk menciptakan terobosan baru dalam sistem administrasi negara yang handal dan profesional dengan meningkatkan komitmen dari para penyelenggara negara dan tentu tidak kalah pentingnya peran aktif positif dari seluruh jajaran masyarakat sesuai dengan profesi masing-masing.

Generasi muda sebagai salah satu komponen cadangan maupun komponen pendukung dalam pertahanan negara, diharapkan sudah mulai membentuk jati diri, watak dan kepribadian, bahkan sudah mulai berkiprah ditengah komunitas dan masyarakat dengan selalu berpikir dan berbuat yang terbaik bagi diri dan lingkungannya. Dengan demikian pada saatnya akan menjadi sosok yang dibutuhkan masyarakat karena jasa dan pengabdianya. Dalam dalam proses hidup yang penuh dengan pembelajaran, maka konsistensi memegang dan membangun komitmen individu maupun jejaring sosial akan menentukan keberhasillannya. Keberhasilan membangun sistem politik yang demokratis dan mempertahankan persatuan dan kesatuan, maka pembangunan politik tidak hanya ditentukan oleh faktor dalam negeri, melainkan juga oleh konstelasi politik internasional, sehingga memerlukan penyelenggara negara yang profesional, *clean government and good governance*.

Prinsip-prinsip utama Pemerintahan dan Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau sering pula disebut dengan "good government and good governance", yaitu:

1. Partisipasi (participation): kebebasan berasosiasi, menyampaikan pendapat dan berpartisipasi secara konstruktif dalam pengambilan keputusan (decision making)
2. Penegakan hukum (rule of law): penegakan hukum secara adil, tanpa diskriminasi dalam hukum
3. Transparency, Openess: kebebasan arus informasi untuk dipahami dan dipantau
4. Responsive: terhadap "aspirasi masyarakat", melayani stakeholders/ masyarakat
5. Consensus Orientation: menjadi perantara kepentingan yang berbeda, pilihan terbaik, untuk kepentingan yang lebih luas
6. Equity: kesetaraan, memberikan kesempatan yang sama kepada semua stakeholders
7. Effective & Efficient: berdayaguna/sangkil, dan berhasil guna/mangkus

8. Accountability: bertanggung jawab kepada publik dan stakeholders
9. Strategic Vision: mempunyai perspektif yang luas dan jauh ke depan, skenario ideal masa depan

Perkembangan ke arah *good governance dan clean government* selaras dengan perkembangan ke arah masyarakat madani, sistim politik yang lebih demokratis, lebih menghargai HAM, peraturan dan hukum sesuai dengan landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, disertai peran aktif positif dari setiap warga negara maka setiap sumberdaya atau kekuatan nasional akan sangat bermakna secara nyata bagi pembangunan. Sebagaimana tercantum dalam Tap MPR Nomor 8, tahun 1998 Bab III, beberapa indikator keberhasilan *good governance*, yaitu (a) mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas usaha nasional, (b) mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional, (c) menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, HAM menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental, serta (d) meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan, agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani.

### **3. Kepemimpinan yang Berwawasan Bela Negara**

Sudah sering kita dengar, bahwa “setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya”. Jadi setiap warga negara adalah pemimpin, yang mempunyai tanggung jawab, dengan kadar kepemimpinan yang berbeda. Kadar kepemimpinan akan menentukan kuantitas dan kualitas penyelesaian masalah. Indonesia Emas, membutuhkan pemimpin duapuluh empat karat, bukan pemimpin se-karat. Disinilah pentingnya meningkatkan kadar kepemimpinan dengan selalu mengasah akal dan fikiran untuk membangun kekuatan individu dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kepemimpinan merupakan upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan, jadi mencakup cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak, merespon, dan menimbulkan perubahan positif. Dalam kepemimpinan, kekuatan dinamis penting dalam

memotivasi, mengoordinasikan organisasi untuk mencapai tujuan. Kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan diantara bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Faktor kepemimpinan terpenting adalah: “sikap dan integritas”. Integritas berarti keadaan lengkap yang merupakan kesatuan, atau satunya kata dengan perbuatan. Jadi berbeda dengan “citra” yang berarti tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang diri kita; sedangkan “integritas” adalah *siapa diri kita sesungguhnya*, Jadi integritas bisa berarti membina kepercayaan, nilai pengaruh tinggi, menghasilkan reputasi yang kuat, menghayatinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan adalah seni bagaimana mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan. Lebih lengkapnya : *“Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”*.

Kepemimpinan merupakan topik yang selalu menarik diperbincangkan dan tidak akan pernah habis dibahas. Masalah kepemimpinan akan selalu hidup dan digali pada setiap masa dari waktu ke waktu dari generasi ke generasi. Ini dikarenakan untuk mencari formulasi sistem kepemimpinan yang aktual dan tepat untuk diterapkan pada masanya. Ini juga mengindikasikan bahwa paradigma kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat tinggi dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Kepemimpinan menjadi suatu yang krusial karena pemimpin memiliki peranan vital sebagai dinamisator, motivator, dan motor organisasi. Pemimpin juga menjadi figur panutan organisasi, menentukan kultur (budaya) organisasi serta pemecah kompleksitas atas masalah-masalah yang dihadapi organisasi.

Walaupun terjadi perubahan paradigma kepemimpinan, namun dasar-dasar dan azas-azas kepemimpinan yang sangat mendasar harus tetap dipegang teguh. Dihadapkan pada perubahan-perubahan tata kehidupan di era global, sang pemimpin harus jeli menghadapi tantangan dan mengambil keputusan agar roda organisasi tetap berjalan mencapai tujuan. Difahami bahwa kepemimpinan adalah “seni” (*art*), sekaligus “ilmu terapan” (*applied science*).

Beberapa pendapat tentang pemimpin yang ideal yang pada hakekatnya masih relevan dan sesuai untuk dipedomani para pemimpin masa kini, yaitu :

- 1) George Terry menyatakan bahwa seorang pemimpin harus : 1. *Penuh energi dan sehat jasmani – rohani*, 2. *Punya stabilitas dalam perasaan (dapat mengendalikan emosi*. 3. *Keinginan memimpin timbul dari dalam nuraninya*. 4. *Cakap dalam*

berkomunikasi, 5. Memiliki kecakapan teknis dalam perencanaan, pengorganisasian, pendelegasian wewenang, pengambilan keputusan, pengawasan dlsb. 6. Menghargai pendapat orang lain.

- 2) Keith Davis berpendapat bahwa seorang pemimpin harus : 1. Punya tingkat kecerdasan yang lebih dari yang dipimpin. 2. Memiliki kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. 3. Punya dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi, 4. Mau mengakui harga diri dan kehormatan anggotanya serta berpihak kepadanya.
- 3) Fayol menyatakan bahwa seorang pemimpin seharusnya : 1. Memiliki jasmani yang sehat dan giat, 2. Memiliki rohani yang prima, 3. Memiliki moral yang tegas mau menerima tanggung jawab, berinisiatif, setia, bermartabat, bijaksana, 4. Memiliki latar belakang pendidikan yang luas baik yang berhubungan dengan fungsinya atau tidak.
- 4) Dalam lingkungan TNI ada pedoman kepemimpinan yang disebut "11 azas kepemimpinan TNI", yaitu : 1. **Taqwa**, 2. **Ing ngarso sung tolodo**, 3. **Ing madyo mbangun karso**, 4. **Tut wuri handayani**, 5. **Waspodo purbo waseso**, 6. **Ambeg parama arta**, 7. **Prasojo**, 8. **Satya**, 9. **Gemi nastiti**, 10. **Beloko**, 11. **Legowo**.

Seorang pemimpin harus memperhatikan kesejateraan anak buahnya. Pemimpin yang berhasil harus memiliki persyaratan *Integritas – Moral – Profesional*. Integritas berkaitan dengan kesetiaan, kejujuran, satunya kata dengan perbuatan. Sedangkan moral berhubungan dengan hal yang baik atau buruk. Ada tiga perbuatan buruk yang dapat menjadikan akar permasalahan semua perbuatan tercela, yaitu → curang (*cheating*), bohong (*lying*), mencuri (*stealing*).

Pada era global ini, kehidupan manusia telah mengalami perubahan-perubahan fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan sebelumnya. Perubahan besar dan mendasar menuntut penangan yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Pada masa kini (era global) diperlukan paradigma baru dalam bidang kepemimpinan dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan baru. Dengan demikian urgensi pemahaman kepemimpinan masa kini yang berwawasan kebangsaan (yang sekaligus berwawasan bela negara) sangat mutlak diperlukan oleh para pemimpin dan kader pemimpin suatu organisasi. Kepemimpinan masa kini dan masa depan adalah seorang pemimpin yang adaptif terhadap tantangan, kondisi yang menekan, mampu memelihara kedisiplinan anggotanya, memberikan timbal balik kepada anggotanya serta menjaga kepemimpinannya.

Dari hal-hal tersebut diatas, maka kepemimpinan masa kini yang berwawasan kebangsaan hendaknya memiliki empat jenis kompetensi (disamping dilandasi dengan azas-azas kepemimpinan yang sudah ada). Pertama Kompetensi Teknis (*Technical Competence*) yaitu kompetensi mengenai bidang yang menjadi tugas pokok organisasi. Kedua Kompetensi Manajerial (*Managerial Competence*) yaitu kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas-tugas organisasi. Ketiga Kompetensi Sosial (*Social Competence*) yaitu kemampuan melakukan komunikasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas organisasi. Dan yang keempat adalah Kompetensi Intelektual (*Intellectual/Strategic Competence*) yaitu kemampuan untuk berpikir strategik dengan visi jauh kedepan. Kompetensi Intelektual ini meliputi kemampuan merumuskan visi, misi dan strategi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Untuk membentuk pemimpin yang berwawasan kebangsaan (yang sekaligus berwawasan bela negara), perlu pemahaman dan penghayatan empat kompetensi serta dilandasi dengan azas-azas dan teori kepemimpinan. Bila para pemimpin dan kader pemimpin tersebut telah memahami dan menghayati hal-hal tersebut, maka secara otomatis memiliki integritas nasional dan jatidiri bangsa.

Ujian terpenting dalam kepemimpinan adalah: menciptakan perubahan positif. Kalau anda berhenti berubah, berhenti pula kehidupan anda, Perubahan bisa bermakna pertumbuhan, perubahan tidak terjadi kalau orang berpikir negatif. Berkenaan dengan risiko, ada beberapa pelajaran dari masyarakat, antara lain: jangan berjalan – bisa kesandung, jangan lari – bisa jatuh, jangan hidup – bisa mati. Ini berarti bahwa setiap aktifitas mengandung risiko, keuntungan atau manfaat yang besar sering harus berhadapan dengan risiko yang besar pula. Maka orang yang cerdas dan cerdik akan mengalahkan orang yang bekerja keras. Artinya untuk meraih cita-cita tidak cukup hanya dengan bekerja keras, melainkan harus kecerdasan dan kecerdikan. Inilah penting “individual power”, seperti berbagai sifat unggul yang harus dimiliki, seperti: keuletan, ketangguhan, jujur, disiplin, adil, bisa bekerjasama, peduli, dan sebagainya. Keputusan yang benar, pada waktu yang benar akan mengantarkan pada kesuksesan.

Pemimpin terkemuka dilahirkan dengan kualitas kepemimpinan, telah melihat model kepemimpinan sepanjang kehidupannya, telah mempelajari tambahan kepemimpinan melalui latihan, dan mempunyai disiplin pribadi untuk menjadi pemimpin besar (Maxwell, 1995). Wawasan seseorang sangat berkaitan dengan kualitas kepemimpinan. Dalam hal inilah, betapa pentingnya peranan dan tumbuh kembang anak,

pemuda dan orang tua, peranan orangtua dalam keluarga, guru dan masyarakat, maupun aparat pemerintah dalam membangun wawasan melalui ketauladanan dan pendidikan formal.

Aktualisasi pemimpin dapat berupa menciptakan keadilan, menciptakan kondisi yang stabil, proses yang lebih efektif dan efisien, memberikan rangsangan lebih produktif, memperluas kesempatan kerja, pendayagunaan sumberdaya dan investasi, pemerataan dalam distribusi pendapatan, meningkatkan persatuan, kesatuan, dan ketahanan nasional. Hal tersebut sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seorang pemimpin yang efektif biasanya merasa tidak nyaman dengan “status-quo”. Adakah kerusakan yang perlu diperbaiki? Adakah yang bisa ditingkatkan. Adakah persoalan dalam cara menangani sesuatu? Perubahan apa agar menang dalam persaingan? Mengapa perusahaan kita belum mempunyai reputasi yang baik? Perubahan apa yang akan menaikkan status menjadi istimewa?

Cara tercepat untuk menaikkan kadar kepemimpinan adalah kemampuannya dalam pemecahan masalah. Pemecahan masalah akan memberikan makna bagi kehidupan. Kebijakan bisa berubah, tetapi prinsip tidak pernah berubah. seseorang sukses bisa jadi karena sering gagal. Disisi lain, masalah muncul untuk diatasi, bukan untuk dihindari. Semangat dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah sebelum menjadi keadaan darurat menjadi penting. Kadar kepemimpinan dapat diperhatikan dari ukuran masalah yang ditangani. Untuk membangun sikap yang benar dan tindakan yang tepat, lihat – pikir - kerjakan dengan terus mendengarkan suara hati nurani. Maka kepedulian dan tindakan seseorang untuk mengambil peran bagi kepentingan orang lain, masyarakat, bangsa dan negaranya menentukan kadar kepemimpinan seseorang (*individual power*). Seberapa bagus kemampuan anda? Untuk membangun kemampuan memberi inspirasi, milikilah daya tarik personal dan jadilah suri tauladan; untuk kemampuan membujuk (persuasi) mengubah pikiran dengan contoh, bukan dengan ancaman atau hukuman; kemampuan memengaruhi (influence), memotivasi, dengan mengubah yang biasa menjadi luar biasa dengan cara menunjukkan arah yang tepat. Sebuah kata-kata bijak perlu direnungkan oleh generasi pembelajar sebagai penerus perjuangan bangsa yaitu bahwa “tidak mungkin bisa memimpin orang lain, jika tidak bisa memimpin dirinya”.

#### **4. Kewirausahaan yang Menunjang Kesadaran Bela Negara**

Pertahanan hidup terdapat pada keinginan dan kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan mutu kehidupan, baik hidup dan kehidupan orang-perorang maupun sekelompok masyarakat, bangsa dan negara. Disinilah pentingnya peranan jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki oleh setiap orang dengan berbagai profesi, sebab jiwa kewirausahaan berarti kemampuan untuk selalu menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam mengatasi berbagai persoalan, dan tidak terkendala oleh berbagai kekurangan. Benarkah kita membiarkan diri dalam ketidaksiuksesan, kemiskinan, keterbelakangan, keterpurukan, terbelenggu oleh kemelut persoalan; atau sudah merasa puas, tidak ada kemampuan dan kemauan, tidak berani menangkap peluang? Jawabannya adalah pada keberaniannya untuk bertindak, dengan mewujudkan gagasan menjadi kenyataan, lakukan jangan hanya bercita-cita dengan penuh keyakinan dimana ada usaha, disitu ada jalan.

Di Indonesia, sumberdaya alam yang berlimpah membutuhkan kreativitas dan inovasi untuk kemakmuran rakyat, dengan selalu membangun keunggulan komparatif dan keunggulan bersaing. Kewirausahaan yang menunjang kesadaran bela negara menjadi salah satu kunci faktor penentu kemajuan suatu bangsa.

Kewirausahaan berarti kemampuan menciptakan bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian untuk memperoleh manfaat, keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumberdaya yang diperlukan untuk mendirikanannya. Profil wirausahawan nampak dari karakternya yang menyukai tanggung jawab, menyukai risiko, keyakinan atas kemampuan untuk meraih keberhasilan, menyukai kreativitas dan tantangan, terus menerus mencari pengukuhan, energik, berorientasi ke depan, indera yang kuat dalam mencari peluang, trampil mengorganisasi (kelembagaan), menilai prestasi lebih tinggi daripada uang; bukan dorongan untuk menghasilkan uang, uang hanyalah penghitung skor, tujuan adalah simbol prestasi. Karakteristik inilah yang harus kita tumbuhkan, karena begitu besarnya manfaat kewirausahaan bagi kemajuan dan kemakmuran. Beberapa manfaat kewirausahaan, antara lain: peluang mengendalikan nasib sendiri, peluang melakukan perubahan, peluang mencapai potensi sepenuhnya, peluang untuk meraih keuntungan tanpa batas, peluang utk berperan dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan, peluang melakukan sesuatu yang disukai dan menikmatinya.

Kewirausahaan akan semakin tumbuh dan berkembang jika mampu mengembangkan organisasi, mengembangkan kelembagaan yang berarti mampu

bekerjasama dengan membangun sinergitas dalam kemitraan (partnership). Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ini sangat bermakna bagi kemajuan usaha karena daripada bersaing saling mematikan, lebih baik bergandeng tangan dan bekerjasama untuk saling melengkapi dan saling menguntungkan; membangun jejaring berarti membangun sinergitas. Jadi sebenarnya membangun jejaring itu berarti memenuhi kebutuhan masyarakat, melalui keteraturan dan integrasi dalam masyarakat. Ini akan berfungsi menjadi pedoman bertindak, menjaga keutuhan dan kebersamaan masyarakat, dan menjadi dasar pengendalian atau sistem pengawasan.

Kreativitas setiap warganegara menjadi kebutuhan untuk keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Kreativitas adalah kekuatan untuk menghubungkan sesuatu yang tampaknya tidak berhubungan (William Plomer). Kreativitas: kemampuan untuk mengembangkan gagasan baru untuk menemukan cara baru dalam melihat masalah dan peluang (memikirkan hal-hal baru). Inovasi: kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang tersebut untuk meningkatkan atau untuk memperkaya kehidupan orang-orang (mengerjakan hal-hal baru). Setiap orang bisa belajar teknik dan perilaku untuk menghasilkan gagasan dan pandangan baru yang lebih banyak, dan kemudian melakukannya. Pemikiran kreatif dapat tumbuh dengan selalu mengajukan pertanyaan: adakah cara yang lebih baik?, menantang kebiasaan, rutinitas, dan tradisi; imajinatif, bersemangat bebas, mempunyai jiwa kewirausahaan; menjadi pemikir yang produktif; melihat suatu masalah dari perspektif yang berbeda, menyadari adanya kemungkinan munculnya beberapa jawaban yang tepat, memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, memandang bahwa suatu masalah adalah batu loncatan bagi ide baru, menghubungkan beberapa gagasan yang nampaknya tidak terkait. Dalam hal inilah imajinasi sangat penting, bahkan imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedang imajinasi melingkari dunia (Albert Einstein).

Terkait dengan kesejahteraan ekonomi, perberbedaan dalam cara memperoleh penghasilan, membutuhkan kerangka berfikir yang berbeda, ketrampilan teknik yang berbeda, pendidikan yang berbeda, pandangan yang berbeda. Dalam proses belajar, betapa pentingnya mendorong mahasiswa berpikir kritis, rasional dan kreatif sebagai warganegara, menanamkan sikap nasionalisme demi membangun dan mempertahankan keutuhan bangsa dan negara; berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti korupsi, narkoba, kenakalan remaja dan perilaku tidak terpuji lainnya; menciptakan atmosfer akademik yang memberikan peluang untuk berkembang secara positif dan

demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; memotivasi para siswa untuk menerapkan etika dan budi pekerti; mengaktifkan mahasiswa untuk menularkan dan memberi teladan penerapan budi pekerti kepada mahasiswa lainnya.

Mengembangkan sifat-sifat pribadi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan atau *entrepreneurship*, dapat dilakukan dengan keberanian memulai dengan mengambil keputusan yang tegas: tekad mendapat sifat yang diinginkan, tekad menepati janji; segera bertindak melaksanakan keputusan itu; kemauan kuat harus dijadikan kebiasaan, jangan menanggukkan keputusan, laksanakan untuk membentuk sifat-sifat yang baru; lakukan sesuatu yang sukar dengan sengaja: sesuatu yang besar, hasil besar; sesuatu yang berat akan memperkuat kemampuan.

## **5. Pengembangan Pembinaan dan Pembudayaan Keasadaran Bela Negara**

**Pendahuluan.** Di Indonesia maupun bangsa-bangsa di dunia, dalam rangka pembangunan nasionalnya, setidaknya terdapat beberapa isu penting yaitu isu tentang hak azasi manusia (HAM), supremasi hukum, lingkungan hidup, demokratisasi, dan globalisasi ekonomi. Isu-isu tersebut merupakan persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara-negara saat ini. Bagi bangsa Indonesia, diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih mengutamakan azas desentralisasi kekuasaan dan kewenangan kepada daerah, juga merupakan isu yang diharapkan dapat mendorong percepatan bagi proses pembangunan nasional melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Sebenarnya globalisasi merupakan suatu pemikiran, ide, sistem, pandangan hidup yang menjadi universal, menjagad atau mengglobal. Berlangsung sejak akhir dekade abad 20, semakin menuntut ketahanan dan daya saing yang tinggi dalam segenap aspek kehidupan bangsa-bangsa. Dalam proses globalisasi terdapat beberapa ciri antara lain semakin berkembangnya teknologi informasi, perdagangan, transnasionalisasi keuangan dan investasi, serta reformasi politik; yang menjadikan persaingan semakin ketat. Setiap negara mempunyai kepentingan, misalnya kepentingan ekonomi, politik, sosial, budaya dan kelestarian lingkungan. Atas dasar kepentingan setiap negara, maka berbagai kebijakan dalam pembangunan diterapkan untuk kesejahteraan rakyat, bangsa dan

negaranya, melalui pembangunan fisik maupun non fisik, materiil maupun spirituil, atau jasmani maupun rohani. Jadi pada dasarnya globalisasi merupakan tuntutan sosialisasi dalam kehidupan manusia, yang kemudian sangat besar pengaruhnya dalam memberikan corak dan arah pembangunan setiap negara. Globalisasi dapat digambarkan sebagai proses integrasi antar negara, yang nampak dari proses saling ketergantungan politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya yang berkembang diantara negara-negara di dunia. Kecenderungan globalisasi saat ini ditandai dengan semakin cepatnya perubahan lingkungan eksternal maupun internal dan semakin ketatnya persaingan. Dinamika ini menjadi fenomena baru dalam pembangunan suatu bangsa dalam rangka mencapai kemakmurannya.

**Kondisi Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.** Di Indonesia, dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara terus tumbuh dan berkembang seiring dengan kepentingan rakyat, baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki, yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan sehingga menambah semakin kompleksnya permasalahan. Beberapa penyimpangan dapat diamati dari berbagai aspek seperti adanya upaya penggantian landasan ideologis bangsa, separatisme (politik), persaingan ketat dalam liberalisasi ekonomi, hedonisme (sosial-budaya), minimnya sarana prasarana pertahanan-keamanan, lemahnya kepastian hukum, ketergantungan pada teknologi negara maju, dampak dari sistem informasi dan komunikasi, persoalan SARA, ketergantungan dan rasa tidak aman, dan sebagainya. Hal ini merupakan gambaran kuatnya pengaruh dari luar negeri atau sekaligus karena lemahnya kondisi internal negara.

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, penyebab utamanya berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain berkaitan dengan masalah-masalah dalam negeri seperti kondisi sosial-politik dan keamanan yang tidak stabil, ekonomi biaya tinggi karena inefisiensi dalam proses produksi, praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dan sistem perekonomian yang tidak mengakar ke bawah. Faktor eksternal berkaitan erat dengan kepentingan negara-negara kuat yang juga berdampak besar bagi aspek-aspek kehidupan. Dalam pemerintahan Orde Lama pada tahun 1966 banyak tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang menyimpang dari kemurnian Pancasila dan UUD 1945, diantaranya diterapkannya *nasakom*. Dalam pemerintahan Orde Baru banyak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pembangunan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penyimpangan tersebut menjadi pendorong terjadinya krisis ekonomi yang hingga saat ini belum terselesaikan bahkan cenderung berkembang menjadi krisis

multidimesi yang semakin kompleks. Ini menunjukkan belum mantapnya ketahanan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa kita.

Hal itu semua tentu akan berdampak pada rasa nasionalisme yang nampak dari semakin melemahnya kemampuan menentukan nasib sendiri, kurangnya rasa kebersamaan atau gotong royong, pudarnya karakter bangsa, yang menjadi penyebab munculnya gejala disintegrasi bangsa. Pada hal hakekat pembangunan adalah membangun manusia seutuhnya, baik fisik maupun non fisik, jasmani maupun rohani, materiil maupun spirituil, maka pembangunan non fisik, rohani atau spirituil menunjukkan laju yang amat tertinggal bahkan cenderung degradasi. Terjadinya dekadensi moral dan penyakit-penyakit sosial di masyarakat dapat disebabkan karena persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, ketidak pastian hukum, tidak adanya keteladanan atau rendahnya kendali informasi bagi konsumsi masyarakat, transisi, atau sedang dalam proses modernisasi. Peradaban mengglobal, akal belum rasional, maka nilai-nilai luhur menjadi luntur, misalnya lemahnya disiplin, etika dan budi pekerti yang luntur tidak sesuai jati diri bangsanya. Persoalan politik, tekanan ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan disiplin, rapuhnya kejujuran dan nilai-nilai moral, komitkem spiritual yang semakin melemah, kepemimpinan yang semakin kurang berwibawa, semakin rendahnya kesadaran kolektif berbangsa dan bernegara merupakan persoalan mendasar yang akan menjadi penyebab runtuhnya bangsa dan negara.

**Pengembangan Nilai-Nilai Dan Pembudayaan Bela Negara.** Setiap negara mempunyai kepentingan. Oleh karena itu menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan serta berbagai dampak globalisasi memerlukan pemikiran dua arah, yaitu pemikiran untuk kepentingan nasional (ke dalam) dan komitmen pada kepentingan dunia. Untuk menghindari dampak yang lebih besar dalam menghadapi ketidakpastian dunia mendesak untuk memperluas dan memperdalam cakrawala berpikir sebagai warganegara Indonesia pejuang bangsa dalam usaha menciptakan, meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara demi terwujudnya aspirasi perjuangan nasional, memupuk kesadaran bela negara dan berpikir komprehensif integral (terpadu) dalam rangka ketahanan nasional.

Sebagai salah satu upaya startegi mewujudkan hal tersebut yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan, yang akan membangun kompetensi kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan akan merevitalisasi wawasan kebangsaan yang akan menanamkan kebanggaan sebagai bangsa pejuang, menjadikan Pancasila sebagai acuan kritis dan etika politik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menegakkan

kedaulatan rakyat, serta menata nilai-nilai fundamental spiritual segenap komponen bangsa melalui pengakuan terhadap kebhinnekaan bangsa. Dengan demikian melalui revitalisasi wawasan kebangsaan ini diharapkan akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik intelektualitas, mentalitas, moralitas maupun fisik/jasmani yang kuat; meningkatkan kesejahteraan dan percaya diri, dan pada akhirnya akan mengembalikan kedaulatan negara setara dengan negara maju, meningkatkan integritas dan mewujudkan satu kesatuan sistem pertahanan negara untuk mencapai tujuan nasional.

Berdasarkan Tap MPR Nomor 8, tahun 1998 Bab III, beberapa indikator keberhasilan *good governance*, yaitu (a) mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas usaha nasional, (b) mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional, (c) menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, HAM menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental, serta (d) meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan, agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani.

Dalam implementasinya, maka kebijakan pemerintah sebagai fasilitator, melalui lembaga-lembaga pendidikan maupun organisasi profesi dan sebagainya mengambil peran aktif untuk mensosialisasikan Pendidikan Kewarganegaraan melalui jalur formal (pendidikan formal), non formal (ketauladanan), sistem pendidikan, efektifitas komunikasi yang integratif. Dengan *good governance* maka akan mengarahkan pada terciptanya masyarakat madani, sistim politik yang lebih demokratis, lebih menghargai HAM, peraturan dan hukum, serta integritas negara kesatuan Republik Indonesia.

**Penutup.** Kualitas sumberdaya manusia yang meliputi intelektualitas, mentalitas, moralitas maupun fisik/jasmani yang sehat kuat akan menjadi penentu utama keunggulan bangsa dan negara dalam percaturan politik bangsa-bangsa di dunia. Pelembagaan nilai-nilai Pancasila khususnya melalui Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian maupun mata kuliah lainnya menjadi kebutuhan yang bersifat segera dari setiap warga negara, penyelenggara pemerintahan, dan seluruh kekuatan nasional.

#### 4.1. Keterampilan Kepemimpinan di Era Global

Keterampilan memimpin, sangat tergantung pada kemampuan memahami pihak yang dipimpin. Pemahaman akan “*cultur system*” di Indonesia, meliputi: kebiasaan, selera, norma, nilai-nilai sosial, adat istiadat, heterogenitas, dan sebagainya.

Tugas baru pemimpin adalah berupa peran baru bahwa pemimpin sebagai perancang, guru, penolong; dan keterampilan baru yang nampak dari kompetensi, menjadi “*mental model*” sebagai tauladan, dan memiliki visi dan skill global (*Global Leadership Skills*); kemampuan mewujudkan untuk membangun visi bersama (organisasi); berperan dalam pembelajaran; berpikir sistemik dengan piranti-piranti baru yang berbasis ICT atau teknologi informasi dan komunikasi.

Pemimpin masa depan adalah pemuda transformasional menjadi harapan bangsa dan negara, yang selalu berpikir tegas, cepat, tepat dan besar. Pemuda multikultural dengan *Global Leadership Skills: Continuous capacity to transform, Global Mindset, and Global Networks*. Tidak kalah pentingnya sebagai warga negara yakni menciptakan perubahan dan pergeseran positif dalam organisasi untuk mewujudkan cita-cita nasional. *Together We Make it Happen: Develop your self, Develop your business, Develop your future*. “Memang baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik”.

#### 4.2. Membangun Kemandirian di Era Globalisasi

Menghadapi globalisasi memerlukan pemikiran dua arah, yaitu pemikiran untuk kepentingan nasional dan komitmen pada kepentingan dunia. Sementara itu *fair trade* disadari oleh semua pihak tidak akan pernah dicapai dalam *free trade* karena berbagai persoalan dan konflik kepentingan masing-masing negara. Untuk menghindari resiko ketidakpastian inilah mendesak semua negara termasuk Indonesia untuk memacu produksi berbagai macam barang yang dianggap mempunyai keunggulan atau yang bernilai strategis.

Menghadapi pasar global, untuk meningkatkan kesejahteraannya, suatu negara menempuh berbagai cara yang pada hakekatnya terletak pada pilihan diantara kebijakan pasar terbuka (*trade liberalization*) atau tertutup (*autarki*). Beragamnya jenis maupun tingkat kesiapan berbagai komoditi, ataupun kemampuan suatu negara dalam menghadapi pasar global menyebabkan timbulnya *proteksionisme*.

Proteksionisme tidak hanya diterapkan oleh negara sedang berkembang melainkan juga oleh negara maju. Baik di negara maju maupun negara yang sedang berkembang, umumnya pemerintah selalu turut campur dalam produksi dan perdagangan

untuk berbagai kepentingan pemerintah dan negaranya. Negara-negara yang memiliki berbagai kemampuan permodalan, teknologi dan keunggulan sumberdaya lain, selalu berupaya memperluas pasarnya dan sangat memungkinkan timbulnya persaingan ketat di pasar negara lain.

Kuatnya intervensi pemerintah, baik di negara eksportir maupun importir, menyebabkan terdistorsinya pasar dunia dan ketidak pastian dalam penawaran maupun permintaan barang, yang selanjutnya menyebabkan ketidak pastian dalam harga barang. Menghadapi ketidak pastian pasar dunia dan tuntutan kepentingan domestik diperlukan suatu kebijakan publik yang harmonis, dalam arti tetap memelihara komitmen pada ketentuan WTO, tetapi tidak mengorbankan kepentingan domestik.

Skema perbandingan masyarakat pasca-industri, terdiri dari masyarakat (a) pra-industri atau ekstraktif, yaitu kelompok masyarakat yang modus produksi sektor ekonominya tergolong produk primer seperti pertanian, pertambangan, perikanan, kayu, minyak dan gas; (b) industri, yaitu kelompok masyarakat yang modus produksi sektor ekonominya tergolong produk sekunder seperti menghasilkan barang olahan, proses manufaktur dan konstruksi berat; dan (c) pasca-industri, yaitu kelompok masyarakat yang modus produksi sektor ekonominya tergolong produk tersier (seperti jasa transportasi dan kegunaan), kuarterner (seperti perdagangan, keuangan, asuransi, dan real estate), serta kuinare (seperti kesehatan, riset, pendidikan, pemerintahan, dan rekreasi). Dalam hal tersebut sudah tentu terdapat perbedaan nilai tambah yang cukup signifikan.

Bagi Indonesia sebagai negara pengeksport produk primer dari pertanian, gas, minyak bumi dan mineral, ternyata kurang memberikan manfaat yang layak dibanding dengan manfaat yang dinikmati oleh negara importir produk primer tersebut. Negara importir dan pengolah produk primer ternyata memperoleh manfaat yang jauh lebih besar dibanding negara eksportir produk primer. Maka untuk memperoleh nilai tambah yang lebih besar, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan maka sudah saatnya Indonesia menerapkan langkah (a) untuk mensubstitusi impor, dan selanjutnya mengarahkan produk-produk untuk (b) promosi ekspor.

Di negara sedang berkembang, membangun kemandirian biasanya terkendala oleh permodalan, teknologi dan sistim penyelenggaraan pemerintahan. Selaras dengan pergeseran paradigma pembangunan, maka dalam rangka membangun kemandirian bangsa dan negara, diantara ketiga pilar pembangunan (a) *public sector*, (b) *privat sector* dan (c) *civil society* juga mengalami pergeseran peran masing-masing. Peran pemerintah bukan semakin berkurang melainkan perlu penyesuaian dengan dinamika

kehidupan masyarakat dan bangsa-bangsa di dunia. Pengertian *berkurang* lebih diartikan pada pemahaman bahwa sektor swasta dan masyarakat secara bertahap semakin mandiri dari bantuan dan dukungan pemerintah, seperti berbagai bentuk subsidi input (BBM, tarif listrik, tarif telepon, harga pupuk), subsidi output atau *price support* (harga gabah, harga gula) dan proteksi dari pemerintah (pajak impor atau bea masuk beras, gula, dan sebagainya) yang lebih cenderung menciptakan *distorsi*. Dalam hal tersebut bukan berarti bahwa petani, peternak, nelayan, UKM dan koperasi dibiarkan melawan kekuatan raksasa di hulu maupun di hilir, melainkan bahwa pemerintah sebagai fasilitator berarti sebagai penyedia infrastruktur maupun suprastruktur, termasuk sarana dan prasarana, peraturan-peraturan yang memungkinkan berkembangnya sektor riil, UKM dan koperasi, dan sebagainya; yang pada gilirannya juga akan membangun kemandirian masyarakat, bangsa dan negara.

Perekonomian merupakan faktor mendasar, yang sekaligus merupakan titik terlemah diantara faktor lainnya. Lemahnya sistem perekonomian domestik dengan berbagai persoalannya antara lain *high cost economy*, maraknya aktivitas *directly unproductive profit seeking*, dan *morale hazard* yang menyebabkan tidak semakin dewasanya *infant industry* yang selama ini diproteksi dengan sangat kuat.

Di Indonesia, kunci keberhasilan membangun kemandirian ekonomi dalam era global antara lain terletak pada (a) upaya peningkatan efisiensi melalui restrukturisasi, rasionalisasi, bahkan reengineering; (b) *good-will* dari berbagai pihak untuk mencegah terjadinya sistem *kapitalisme*, atau memberi kesempatan kepada pihak yang lemah untuk mampu berkembang dengan layak, karena tujuan akhirnya adalah meningkatnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan kelangsungan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia; (c) kemampuan untuk mengambil langkah korektif yang tepat waktu, yang secara politis dapat diterima oleh sebagian besar lapisan masyarakat dan secara ekonomis diterapkan (meskipun secara suboptimal, *the theory of second best*) demi kepentingan pertumbuhan dan stabilitas (*growth and stability*); (d) mencegah terjadinya *directly unproductive profit seeking (DUP) activities* yaitu aktivitas untuk memperoleh keuntungan tanpa melakukan kegiatan produktif secara langsung, misalnya lobi merubah tarif, lobi untuk memonopoli, atau berupaya bebas tarif melalui penyelundupan; serta (e) perlu upaya menghapus sikap *morale hazard* dikalangan petani dan produsen, yaitu rendahnya kemauan untuk melakukan secara mandiri perbaikan, rendahnya kemauan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang merugikan karena merasa ada pihak lain yang bertanggung jawab atau melindungi.

Kemandirian bangsa setara dengan kemerdekaan yang hakiki, lepas dari keterpengaruh yang merugikan bangsa, jauh dari pengaruh imperialisme dan kolonialisme, atau sekarang lebih sering disebut penjajahan gaya baru, atau neo-kolonialisme. Kemandirian bangsa merupakan syarat wajib bagi kedaulatan bangsa.

#### **4.3. Mempertahankan Kedaulatan Bangsa dan Negara**

Kewaspadaan merupakan sikap mental suatu bangsa yang selalu siap menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang timbul setiap saat. Hal ini sangat erat hubungannya dengan ketahanan nasional dan kedaulatan bangsa dan negara. Dalam mencapai tujuan nasional, kewaspadaan nasional juga meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan negara. Menghadapi tantangan dan ancaman pembangunan dalam rangka mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, memerlukan sikap dan tindakan yang dibangun dari kepedulian dan tanggung jawab setiap warga negara. Tantangan dan ancaman tersebut mulai dari rendahnya kualitas sumberdaya manusia, cepatnya dinamika perubahan masyarakat, gejala disintegrasi bangsa, merebaknya tindak kekerasan dan aksi massa yang memaksakan kehendak, rentan konflik vertikal maupun horizontal, berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan negara. Merosotnya semangat nasionalisme menjadi keprihatinan semua pihak karena hal tersebut berdampak pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai permasalahan terus menerpa pembangunan nasional, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Krisis kepemimpinan dan krisis multidimensi merupakan problema mendasar yang sangat merongrong kemandirian dan kedaulatan bangsa dan negara. Oleh karena itu diperlukan kemampuan mendeteksi dan mengantisipasi terhadap berbagai bentuk ancaman yang berasal dari golongan ekstrim kiri, ekstrim kanan maupun golongan ekstrim lainnya.

Mencermati kecepatan pertumbuhan negara-negara maju, terjadinya kesenjangan yang semakin curam antar negara kaya dan miskin, tindakan konsumerisme, dekadensi moral, berbagai bentuk penyimpangan di masyarakat dan penyelenggara negara, bahkan ancaman ideologi nampak semakin gencar. Untuk hal tersebut, paling tidak memerlukan dua arah antisipasi yaitu perbaikan ke dalam dan sekaligus berorientasi keluar. Menegakkan kembali nilai-nilai dan prinsip-prinsip kewargaan (*citizenship*) dalam pemberdayaan sumberdaya dan kekuatan nasional mutlak diperlukan. Betapa pentingnya peranan pendidikan karakter dan "nation and character building" yang diarahkan untuk diterapkannya prinsip-prinsip utama pemerintahan dan kepemimpinan yang baik, bersih

dan berwibawa; dan menciptakan kondusifnya pembangunan nasional yang memperkuat daya saing nasional.

Kepemimpinan masa depan memerlukan *strong leaderships*, dengan integritas, dan berbagai sifat unggul, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, visioner, kemampuan mengenali masalah sebelum menjadi keadaan darurat, menciptakan perubahan positif, transformasional: berpikir tegas, cepat, tepat dan besar; menyadari ada perbedaan (*Bhinneka Tunggal Ika*), standard kerja tinggi, membangun sinergitas (*team work*) : orientasi hubungan harmonis (*hablun inannaas*) dan orientasi tugas tinggi (*produktivitas*). Dengan demikian perpaduan yang harmonis dari intelektualitas, mentalitas, moralitas dalam fisik yang kuat dari setiap warga negara akan membentuk pribadi unggul: jujur (*shiddiq*), dapat dipercaya (*amanah*), menyampaikan (*tabligh*), dan cerdas (*fathonah*), menuju cita-cita nasional, dalam negara kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang tangguh niscaya kemandirian dan kedaulatan bangsa dan negara akan tumbuh dan berkembang.

## 6. Latihan Soal

Di era pembangunan, tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*good governance & clean government*) sangat diperlukan untuk membangun kemandirian dan kedaulatan bangsa dan negara. Memperhatikan berbagai permasalahan yang terjadi, diperlukan pengembangan nilai dan kebudayaan bela negara yang lebih kuat oleh berbagai komponen bangsa.

- a. Tunjukkan sedikitnya 5 (lima) contoh solusi mendasar yang saudara sarankan untuk mengurangi bahkan menangkal berbagai penyimpangan!. Sertai dengan pembahasan agar lebih mudah dipahami!
- b. Kemukakan masing-masing 3 (tiga) gagasan saudara sebagai solusi atau langkah “pengembangan nilai dan kebudayaan bela negara” untuk mendewasakan pikiran dan mengasah kecerdasan bela negara utamanya bagi pemuda-pemudi Indonesia di era globalisasi melalui: (1) kearifan lokal, (2) kepemimpinan global, (3) kemandirian bangsa, dan (4) mempertahankan kedaulatan bangsa.
- c. Sehubungan dengan keadaan dan kemampuan penduduk (sumberdaya manusia), serta kekayaan alam yang berlimpah (komponen pendukung), kemukakan pendapat dan pembahasan saudara untuk membangun kemandirian dan kedaulatan bangsa dan negara di era modernisasi dan globalisasi.



# **BAB 7**

## **PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

### **I. Capaian Pembelajaran (Kompetensi Dasar)**

Mahasiswa Mampu memahami, mampu menjelaskan, terjadi perubahan pola berpikir tentang hak dan kewajiban bela negara khususnya tentang pengertian korupsi, tindak korupsi, memahami nilai-nilai dan prinsip anti korupsi serta kesiapan mencegah dirinya dari tindak korupsi.

### **II. Gambaran Umum**

Menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi pada diri individu mahasiswa, membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang bebas dari ancaman korupsi.

### **III. Relevansi terhadap pengetahuan**

1. Mampu menjelaskan pengertian korupsi dan mendiskripsikan bentuk korupsi.
2. Mampu menjelaskan nilai-nilai dan prinsip anti korupsi
3. Mampu menjelaskan Pencegahan dan Gerakan Anti Korupsi
4. Mampu mengambil bagian dalam gerakan anti korupsi dalam lingkup keluarga, kampus dan lingkungan masyarakat.
5. Latihan Soal

### **IV. Sub-sub Bab**

#### **1. Pengertian Korupsi**

Dasar atau landasan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri. Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian korupsi berdasarkan definisi umum dan pendapat para pakar.

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruption*” atau “*corruptus*” (*Webster Student Dictionary*:1960). Selanjutnya dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris),

“corruption” (Perancis) dan “corruptive/korruptie”(Belanda). Dalam bahasa Indonesia, secara harfiah kata korupsi diartikan sebagai : kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Pengertian lainnya “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya” ( WJS Peorwadarminta: 1978).

Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa ( Muhammad Ali: 1998) :

- a. **Korup** artinya busuk, suka menerima suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.,
- b. **Korupsi** artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya,
- c. **Koruptor** artinya orang yang melakukan korupsi.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut factor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

### 1.1. **Bentuk-bentuk korupsi**

Menurut buku saku yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK :2006), bentuk-bentuk korupsi meliputi: kerugian keuangan negara; Suap menyuap; Penggelapan dalam jabatan; Pemerasan; Perbuatan curang; Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan Gratifikasi.

### 1.2. **Faktor Penyebab korupsi**

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik yang berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Ketika perilaku materialistic dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi ( Ansari

Yamamah: 2009). ICW mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi yaitu faktor politik, hukum, ekonomi dan birokrasi dan faktor transnasional.

Teori yang membahas perilaku korupsi dihadirkan oleh Jack Bologne (2006), yang dikenal dengan teori GONE, yaitu : Greeds (keserakahan), Opportunities (kesempatan), Needs (Kebutuhan) dan Exposure (pengungkapan).

### 1.3. Dampak Masif Korupsi

Berbagai studi komprehensif mengenai dampak korupsi terhadap ekonomi serta variable-variabelnya telah banyak dilakukan hingga saat ini. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktek korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, citra buruk dimata internasional , sehingga mengurangi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi, dan negara menjadi semakin miskin.

Dampak ekonomi meliputi : lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi; menurunnya produktivitas; rendahnya kualitas barang dan jasa bagi public; pendapatan negara dari sektor pajak menurun; hutang negara meningkat. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat meliputi : harga jasa dan pelayanan public mahal,; pengentasan kemiskinan berjalan lambat; angka kriminalitas meningkat; solidaritas social langka dan demoralisasi. Dampak terhadap runtuhnya otoritas pemerintah politik dan demokrasi: matinya etika sosial politik; peraturan dan perundang-undangan tidak efektif; birokrasi tidak efisien, kepemimpinan korup; ketidakpercayaan public pada demokrasi; hancurnya kedaulatan rakyat. Dampak terhadap penegakan hukum : fungsi pemerintahan mandul; hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara; Dampak terhadap pertahanan dan keamanan : Hankamnas rawan karena rendahnya alusista dan sdm; garis batas negara terancam; kekerasan dalam masyarakat.

Dampak pada kerusakan lingkungan hidup dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup.

## **2. Nilai dan Prinsip Anti Korupsi**

Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi factor penyebab, baik penyebab dari dalam ( internal) maupun dari luar ( eksternal). Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut meliputi : *kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan*. Nilai-nilai baik tersebut perlu dipahami dan dijalankan oleh setiap individu sebagai penangkal faktor eksternal, agar korupsi tidak terjadi atau agar individu berani mengatakan TIDAK pada ajakan atau kesempatan Korupsi.

Prinsip-prinsip anti korupsi meliputi : Akuntabilitas, Transparansi, kewajaran, kebijakan, Kontrol kebijakan untuk mencegah terjadinya tindak korupsi.

## **3. Pencegahan dan Gerakan Anti Korupsi**

Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian massif di suatu negara. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan dimana mereka bekerja atau beroperasi. Ada begitu banyak strategi , upaya atau cara mencegah dan memberantas korupsi, yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks, masyarakat maupun organisasi yang dituju.

Di Indonesia, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yaitu: Penanggulangan korupsi dengan hokum pidana; pembentukan lembaga anti korupsi ( KPK), Pencegahan di sector public, Pencegahan dengan melibatkan social dan pemberdayaan masyarakat; Mengembangkan instrument hokum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi ( misal UU Tipikor, PPATK)

#### 4. Peran dan keterlibatan Mahasiswa pada gerakan Anti korupsi

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peran penting mahasiswa tersebut tidak terlepas dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealism. Dalam konteks gerakan anti korupsi mahasiswa juga diharapkan tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi yang mereka miliki diharapkan mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi *watch dog* lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu : di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat local/nasional.

**Lingkungan keluarga** dipercaya dapat menjadi tolok ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga adalah ketaatan seseorang terhadap aturan/tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan/tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi **di lingkungan kampus** dapat dibagi kedalam dua wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya sendiri, dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti nyontek dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab dan kemandirian. Kantin kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitarnya, misal: apakah kantor pemerintah menjalankan fungsi layanan kepada masyarakat dengan wajar?

Apakah biayanya wajar dan transparan sehingga semua masyarakat tahu? Apakah infrastruktur sudah memadai?, apakah pelayanan publik untuk rakyat miskin sudah sesuai?

Ditingkat Nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang massif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimiliki dapat menjadi pemimpin (leader) dalam gerakan anti korupsi, baik yang bersifat local maupun nasional. Yang perlu digaris bawahi adalah hendaknya gerakan tersebut dilakukan secara beradab, sopan, teratur, taat pada kaidah aturan dan hukum yang berlaku dan tidak anarkis.

## 5. Latihan Soal:

- 5.1. Perebutan kekuasaan tidak hanya melibatkan kekuasaan politik, melainkan juga kekuatan ekonomi baik dalam maupun luar negeri. Kondisi ini sangat potensial memicu terjadinya korupsi yang menggurita.

*Bentuklah dalam beberapa kelompok dalam satu kelas, tiap kelompok membuat slogan dalam bentuk poster/ video pendek yang bertema ajakan kepada penguasa agar berhenti dari sekedar berpolitik dan berperilaku korup.*

- 5.2. Masyarakat mau membayar uang semir (pelican) yang jumlahnya tidak besar dengan senang hati, misal dalam mengurus KTP, SIM dll. Hal ini tidak berarti mereka setuju dengan cara itu, tetapi hanya merasakan bahwa dengan cara itu mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan.

*Perilaku lain apa saja yang berpotensi mendorong terjadinya korupsi? Bagaiman seharusnya cara menghindari perilaku yang demikian. Belilah contoh dan upaya menanganinya. Diskusikan dengan dosen dan teman di kelompokmu.*

- 5.3. Diskusikan pendapat kelompok saudara tentang hal berikut:

a. *Seorang mahasiswa mendatangi dosennya dan membawa bingkisan, beberapa hari menjelang ujian.*

- b. *Bila terdapat lebih banyak lagi gerakan "anti korupsi" maka apakah saudara yakin bahwa negara kita akan bisa mengurangi kebocoran dan menganggap bahwa Indonesia adalah negara yang kaya?*
- c. *Apakah saudara siap memberikan kontribusi untuk tidak melakukan korupsi?*

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Surata, dkk, 2003. *Widya Mwat Yasa*, Ypgyakarta, UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- As'ad Said Ali, dkk., 2010. *Nasionalisme dan Pembangunan Karakter Bangsa*. Editor: Surono. Yogyakarta.PSP Press.
- Bratakusumah.D.S. dan D. Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Gramedia
- Caves, R., Jeffrey A. Frankel and Ronald W. Jones. 1993. *World Trade and Payments: An Introduction*. Sixth Edition, New York, Harper Collins College Publishers.
- Dirjen Pothan Departemen Pertahanan RI, 2005, Jakarta Himpunan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertahanan,
- Dirjen Pothan Dephan RI , 2006, *Tataran Dasar Bela Negara*. Dephan RI, Jakarta
- Dirjen Pothan Dephan RI, 2007, *Pendidikan Kesadaran Bela Negara: Pedoman bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan.*, Dephan RI, Jakarta
- Dirjen Pothan Departemen Pertahanan RI, 2010, Jakarta, *Pedoman Pendidikan Bela Negara*
- Islam, Nurul. 1990. *Progress of the GATT Negotiations on Agriculture and Developing Countries: Options and Strategies*. Quarterly Journal of Internatinal Agriculture. ( 29) (4). Massachusetts, Washington D.C.
- Kabul Santoso dkk, 2005, *Pembangunan Moral Bangsa*, PT. Java Pustaka Media, Surabaya
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2001. *Akuntabilitas dan Good Governance: LAN dan BPK*, Jakarta.
- Mander, J. and Edward Goldsmith (Ed), 1996. *The Case Againts the Global Economy, and Turn Towards the Local*. Sierra Club Books, San Fransisco.
- Mustopadidjaja, AR. 2001. *Manajemen Proses Kebijakan*. LAN RI, Jakarta.
- Puspito Nanang T, dkk, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Penerbit Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Jakarta
- Soemarsono dkk., 2005. *Pendidkan Kewarganegaraan*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Sutaryo, dkk., 2011. *Sistem Pendidikan Nasional untuk Membangun Peradaban Bangsa Indonesia yang Dijiwai Nilai-nilai Pancasila*. Edisi Revisi. Univeritas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Singh, Kavaljit, 1998. *Memahami Globalisasi Keuangan, Panduan untuk Memperkuat Rakyat*. Edisi Indonesia, Alih Bahasa oleh Frederik Ruma. Yokohama-PGI, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, B. 2001. *Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Cetakan Kedua. LAN RI, Jakarta.